LAPORAN AKHIR

KEGIATAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2011-2015

KERJASAMA ANTARA

KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 3305240
Website : http://lemlit.unlam.ac.id email : lemlit_unlam@yahoo.co.id

dengan

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. Bhakti No. 09 Telepon (0517) 41836

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala pertolongan dan pertunjuk-Nya sehingga dapatlah menyelesaikan laporan penelitian ini.

Tujuan laporan penelitian ini adalah untuk mengetahui Capaian Kinerja pada tahun 2013 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2011- 2015.

Dalam laporan penelitian ini, tim peneliti mengakui adanya beberapa kekurangan yang memerlukan penyempurnaan berikutnya. Untuk itulah, tim peneliti sangat mengharapkan berbagai masukan guna penyempurnaan laporan penelitian ini.

Penelitian ini dapat terlaksana karena mendapat bantuan dan dukungan dana dari kerjasama Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk ini Tim Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Tim Peneliti mengharapkan agar kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dimasa-masa yang akan datang.

Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Ruang Lingkup 4
1.5. Metode Kajian 4
1.6. Sistimatika 6

BAB II GAMBARAN CAPAIAN AGREGATIF PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 7

BAB III CAPAIAN KINERJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 80

BAB IV EVALUASI PROGRAM PRIORITAS RPJMD DENGAN PROGRAM PROGRAM PRIORITAS RKPD 104

BAB V KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI 114

BAB VI PENUTUP 133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan kabupaten/kota untuk setiap tahunnya, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015 adalah :

“ Menuju Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang semakin Sejahtera, Mandiri, Unggul dan Istiqamah”

Melalui :

“GERBANG DATA ERA”

(Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan)

Visi tersebut dijabarkan kedalam 6 Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2011-2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berakhlak Mulia, Kreatif, Inovatif, Terampil dan Menguasi Ipteks
2. Menumbuhkan dan Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pemanfaatan dan Distribusi SDA dengan Menjaga, Memelihara Dan Melestarikan Lingkungan
4. Mengembangan Kehidupan Sosial, Politik dan Budaya Bermartabat
5. Penyelenggaraan Otonomi Luas dan Menerapkan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik
6. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang Merata

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015 memasuki pelaksanaan tahun ketiga. Dalam rangka memastikan pencapaian target capaian RPJMD pada berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan, diperlukan evaluasi hasil pembangunan dengan mendasarkan pada target RPJMD yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RPJMD menjadi sangat penting untuk mengetahui indikator mana yang tercapai, dan indikator mana yang tidak tercapai sehingga memerlukan perhatian pada tahun mendatang.

Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun ketiga mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Evaluasi RPJMD dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja masing-masing program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program, upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD, dan dapat diperoleh umpan balik (*feed back*) dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang sehingga capaian hasilnya menjadi lebih baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 -2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan evaluasi hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2015. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian misi jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan tahun 2015.

2. Mendeskripsikan tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan upaya pemecahan yang telah dilaksanakan di masing-masing SKPD.

3. Memberikan masukan berdasarkan hasil evaluasi dalam meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data capaian indikator pembangunan daerah, mencakup:

   a. Indikator capaian visi-misi pembangunan daerah.

   b. Indikator capaian urusan pembangunan daerah.

2. Melakukan kompilasi dan pengolahan data dan informasi.

3. Melakukan analisis kondisi dan permasalahan pembangunan daerah, mencakup:

   a. Analisis pencapaian visi-misi pembangunan daerah.

   b. Analisis pencapaian target masing-masing urusan pembangunan daerah.

4. Menyusun masukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan tahun 2015 sesuai hasil evaluasi.

5. Menyusun rekomendasi dari hasil kajian evaluasi RPJMD.

E. Metode Kajian

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun waktu 2011-2015 sebagaimana telah direncanakan di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut ini :

1. Daftar isian.
   Berupa blangko isian data *performance* masing-masing indikator, disampaikan kepada SKPD pengampu urusan untuk diisi sesuai dengan data kondisi capaian tahun 2011- 2015

2. Dokumentasi.
   Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan melalui pencatatan data dari SKPD atau sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan.

b. Tahapan Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi ini adalah:

1. Editing.

   Pada tahap ini dilakukan pengecekan kembali atau melakukan koreksi data apabila terjadi kesalahan format ejaan atau versi penulisan angka desimal dan sebagainya agar data benar-benar sesuai dengan kondisi senyatanya.

2. Tabulasi.

   Tabulasi ini dilakukan untuk menyusun data dalam bentuk tabel agar memudahkan untuk dilakukan analisis.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi ini adalah sebagai berikut :

1) Analisis perbandingan

Pada kajian ini analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan target RPJMD tahun 2015 dengan realisasi capaian kinerja. Hasil perhitungan antara target RPJMD dengan realisasi capaian kinerja dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator yang dapat dikelompokan menjadi 2 kategori yaitu :

a) Tercapai, apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 seluruh target RPJMD tahun 2015 telah tercapai 100% atau lebih (>= 100%).

b) Tidak Tercapai, apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 seluruh target RPJMD tahun 2015 tercapai <100 %

2) Analisis kecenderungan

Pada evaluasi Tahun ke-5 RPJMD ini analisis kecenderungan digunakan untuk melihat kecenderungan yang terjadi pada masing-masing capaian indikator kinerja program.

3) Analisis kebijakan

Analisis kebijakan digunakan untuk menjabarkan kebijakan - kebijakan pada masa yang lalu dan merumuskan kebijakan pembangunan pada masa mendatang.

F. Sistematika

Sistematika Laporan terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan metode kajian.

Bab II Gambaran Capaian Agregatif Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menggambarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, jumlah penduduk miskin, dan pengangguran terbuka.

Bab III Capaian Kinerja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggambarkan capaian hasil-hasil pembangunan.

Bab IV Evaluasi Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RKPD Tahun 2013, menggambarkan indikator dan target program prioritas yang termuat dalam RPJMD dan RKPD tahun 2015

Bab V Penutup berisi rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN CAPAIAN AGREGATIF PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ibukota di Barabai. Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai julukan "Bandung *Van Borneo*" ini memiliki *progress* pembangunan daerah yang belum menunjukkan hasil *optimal* terutama jika dibandingkan dengan *regional* Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dalam mengkaji berbagai gambaran umum kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai *potret* hasil pembangunan selama ini, diharapkan dapat memberi dampak positif dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah periode saat ini.

Sejarah terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki napak tilas yang tidak singkat. Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September 1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut Barabai *Plaatslijke*. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai musyawarah dibentuk panitia pendirian daerah Barabai. Selanjutnya, dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan *resolusi* menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Setelah perjuangan yang cukup panjang tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem-20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri mengukuhkan ketetapan tersebut pada tanggal 5 Desember 1959 Nomor Des-575-1-9. Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima jabatan antara pejabat bupati Hulu Sungai Selatan dengan daerah *Swatantra* Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagai daerah *otonom* yang melaksanakan pembangunan daerah nya sendiri hingga saat ini.

Perjalanan sejarah daerah ini dijadikan sebagai sebuah pendorong semangat yang tak lekang oleh waktu dimana pembangunan daerah harus terus diupayakan untuk kesejahteraan masyarkaat Hulu Sungai

Tengah. Oleh karena itu, rumusan kebijakan daerah melalui data dan informasi yang tersaji pada gambaran umum kondisi daerah ini menjadi titik tolak pengembangan berbagai program *prioritas*. Pembahasan gambaran umum kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan dijabarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 yang terdiri dari aspek *geografi* dan *demografi*, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah sebagai berikut:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Dalam pengkajian fenomena pembangunan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan, data dan informasi terkait *geografi* dan *demografi* wilayah menjadi landasan dan dasar kajian yang penting. Aspek *geografi* dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi *strategis*, utamanya dalam memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek *geografi* memberikan gambaran utuh bagaimana *karakteristik* wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak *geografis*, *topografi*, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga *identifikasi* wilayah rawan bencana.

Aspek demografi dalam pembangunan daerah memberikan ukuran, struktur, maupun *distribusi*/persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek *demografi* ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara *demografi* dengan aspek-aspek lain menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama utamanya dalam partisipasi sumberdaya manusia dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi *geografis* Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Karakteristik* lokasi dan wilayah menjelaskan berbagai hal terkait *potret* daerah mulai dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi *geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi* hingga penggunaan lahan di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1.472,00 km^2 dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 247,94 km^2 atau mencapai 16,80% dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah jika

dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan cukup kecil mengingat hanya sebesar 3,92% dari total wilayah provinsi.

Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Kecamatan Barabai dimana hanya memiliki luas wilayah 54,57 km^2. Meskipun begitu, jumlah wilayah administrasi desa/kelurahan di Berabai mencapai 6 kelurahan dan terdapat 12 wilayah yang statusnya desa. Jika dilihat secara *agregrat*, jumlah keseluruhan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 11 kecamatan dengan wilayah administratif terkecil sebanyak 169 dengan rincian sebanyak 8 kelurahan dan 161 desa.

Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (km2)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1. Haruyan	Haruyan	148,63	0	17
2. Batu Benawa	Pagat	99,00	0	14
3. Hantakan	Hantakan	191,98	0	12
4. Batang Alai Selatan	Birayang	189,80	1	18
5. Batang Alai Timur	Tandilang	247,94	0	11
6. Barabai	Barabai Utara	54,57	6	12
7. Labuan Amas Selatan	Pantai Hambawang Timur	86,54	1	17
8. Labuan Amas Utara	Kasarang	162,40	0	16
9. Pandawan	Pandawan	144,24	0	21
10. Batang Alai Utara	Ilung	70,00	0	14
11. Limpasu	Limpasu	77,49	0	9
Hulu Sungai Tengah		**1.472,00**	**8**	**161**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara *administratif*, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Balangan

Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara

b. Letak dan kondisi *geografis*

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27'5.213" -2°46'54.559" Lintang Selatan dan 115°8' 56.965" - 115°53' 32.520" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan daerah hulu sungai yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini memiliki jarak sepanjang 165 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yaitu: kawasan rawa, dataran rendah dan wilayah pegunungan Meratus. Semuanya berada pada ketinggian antara terendah (-6) -7 m seluas 24.586,15 Ha, >7-25m seluas 30.839,69 ha, >25-100 m seluas 22.251,72 ha, >100-500 m seluas 49.030,5 ha, >500-1.000 m seluas 41.216,73 ha dan tertinggi > 1.000 m seluas 9.152,63 ha, berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus ± 1.851 m di atas permukaan laut. Kemiringan tanah bervariasi yaitu terendah 0-2 % seluas 132.517,72 ha, >2-15 % seluas 20.168,37 ha, >15-40 % seluas 21.336,86 ha dan >40 % seluas 3.054,46 ha.

Untuk *topografi* rawa yang tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan *hortikultura*. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya.

d. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari Histosol - HS seluas 8.601,52 ha dan Acrisol – AC (terdiri atas *Ferric Acrisols, Humic Acrisols, Lithosols, Humic Ferralsols*

dan Orthic Acrisols) seluas 168.475,92 ha. Jenis batuan yang terdiri dari formasi batuan, sandi, penyusun, endapan dan luasan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Formasi	Sandi	Penyusun	Endapan	Luas (Ha)
Formasi Pudak	Kap	*Extrusive: intermediate: poymic*	*Volcanism: submarine*	3.491,26
Formasi Haruyam	Kvh	*Extrusive:mafic: lava*	*Volcanism: submarine*	13.854,10
Granit Kelai	Kgr1	*Intrusive: felsic*	*Plutonism: sub-volcanic*	27.518,15
Tonalit Sepauk	Kls	*Intrusive: felsic: granitoid*	*Plutonism: batholiths*	2.970,46
Intrusi Sintang	Toms	*Intrusive: intermediate*	*Plutonism: sub-volcanic*	11.089,80
Malihan Pinoh	PzTRp	*Metamorphic: schist*	*Metamorphism: regional: high-grade*	8.703,95
Ofiolit Jura	Mub	*Ophiolite*		3.135,90
Endapan alluvium	Qa	*Sediment: clastic: alluvium*	*Terrestrial: alluvial*	56.531,49
Formasi Pitap	Ksp	*Sediment: clastic: flysch*	*Neritic*	30.249,47
Formasi Warukin	Tmw	*Sediment: clastic:sandstone*	*Littoral: delta*	18.352,75
Batu Nunggal	Kpb/LAUT			1.180,13
TOTAL LUAS				177.077

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

e. Hidrologi

Secara *hidrologi*, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu: Sungai Batang Alai, Sungai Barabai dan Sungai Haruyan serta satu saluran (*kanal*) pengendali banjir yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu, ada 1 bendungan yaitu Bendungan Batang Alai dan 3 daerah *irigasi* di kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu: di

intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, di Haruyan dan di Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedang di kewenangan kabupaten adalah di baruh di Kecamatan Limpasu, di kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan di telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air dengan debet di atas 100 liter/detik meliputi sumber mata air sungai batang alai dan Sungai Barabai.

f. Klimatologi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki jumlah curah hujan tahunan rata-rata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2014 adalah sebanyak 228,2 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 14 hari per bulan. Dengan intensitas hujan tetinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan rata-rata 362,0 mm dengan jumlah hari hujan 23 hari, hal ini terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2014

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
1	Januari	323,0	22
2	Februari	245,5	14
3	Maret	117,0	8
4	April	294,6	9
5	Mei	188,4	17
6	Juni	134,5	10
7	Juli	282,0	14
8	Agustus	204,5	12
9	September	154,0	12
10	Oktober	212,0	12
11	November	220,5	15
12	Desember	362,0	23
Jumlah		**228,2**	**14**

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

Intensitas suhu udara di Hulu Sungai Tengah antara 26,4ºC sampai dengan 27,7ºC, ini menunjukkan bahwa daerah Hulu Sungai Tengah berhawa sejuk. Sedangkan rata-rata kelembapan udara di Sulu Sungai Tengah adalah 86,40%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rata-rata kelembapan udara dan rata-rata suhu udara selama setahun di Hulu Sungai Tengah.

Tabel 2.4
Rata-Rata Kelembaban Udara dan Suhu Udara

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014

No	Bulan	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Rata-rata Suhu Udara (^oC)
1	Januari	90,6	26,6
2	Februari	86,8	26,9
3	Maret	87,3	27,0
4	April	87,2	27,3
5	Mei	88	27,0
6	Juni	84,8	27,5
7	Juli	86,5	26,4
8	Agustus	85,6	26,5
9	September	84,6	26,9
10	Oktober	81,9	27,7
11	November	85,6	27,3
12	Desember	87,9	26,9
Jumlah		**86,40**	**27,00**

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

g. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2014 terbagi atas: kampung seluas 2.363 ha, industri 1 ha, pertambangan 305 ha, sawah 32.368 ha, pertanian tanah kering 743 ha, kebun campuran 8.884 ha, perkebunan 18.315 ha, padang (semak, alang-alang, rumput) 17.107 ha, hutan 63.939 ha, perairan 237 ha, lain-lain 61.915 ha. Luas kawasan budidaya

tersebar di semua kecamatan sehingga kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat lebih terjaga dan *konsisten* dalam pengembangannya.

Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa hutan lindung seluas ± 60.622 ha, yang meliputi: kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, Haruyan dan Batang Alai Selatan; kawasan lindung berupa kawasan resapan air seluas 656 ha di Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai seluas 22.033 ha, kawasan sekitar mata air dan kawasan RTH; kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana berupa rawan tanah longsor, banjir dan kebakaran. Kawasan rawan tanah longsor seluas 1.500 ha, meliputi wilayah pegunungan di kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan dan Haruyan. Kawasan rawan banjir seluas 29.930 ha khususnya pada kawasan sekitar aliran sungai Batang Alai, Barabai dan Haruyan.

Penggunaan kawasan lahan untuk budidaya terbagi atas kawasan hutan produksi tetap seluas 8.599 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 13.709 ha, kawasan budidaya pertanian seluas 34.994 ha, lahan pekarangan/untuk bangunan seluas 6.413 ha, tegalan 13.372 ha, ladang seluas 12.015 ha, padang rumput seluas 1.075 ha, rawa yang tidak ditanami seluas 1.288 ha, kolam 108 ha, perkebunan 25.020 ha

2.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki berbagai pendukung pencapaian tujuan pembangunan seperti kebijakan *spasial* yang berfokus pada pengembangan potensi setiap daerah. Berdasarkan *deskripsi* wilayah pada masing-masing daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah diidentifikasi memiliki berbagai *potensi* sumberdaya untuk dikembangkan sebagai kawasan *strategis* pembangunan yang terencana dan terpadu dalam rumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan, berbagai rencana kawasan *strategis* telah disusun sebagai penunjang maupun motor utama pembangunan. Kawasan *Strategis* Provinsi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdapat di provinsi adalah berupa kawasan *strategis* provinsi sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan hidupnya. Adapun Kawasan *Strategis* Kabupaten Hulu Sungai Tengah diantaranya kawasan *strategis* kabupaten sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan *strategis* kabupaten sosial budaya, dan kawasan *strategis* kabupaten sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tabel 2.5
Rencana Kawasan Strategis

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2031

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
Provinsi	Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan Pegunungan Meratus	Kecamatan Hantakan; Kecamatan Haruyan; Kecamatan Batang Alai Timur; Kecamatan Limpasu; dan Kecamatan Batu Benawa
Kabupaten	Kepentingan pertumbuhan ekonomi	Perkotaan Barabai sebagai ibukota kabupaten	
		Kawasan *agropolitan*	Kawasan Banua Kupang di kecamatan Labuan Amas Utara
			Sub terminal agribisnis di Kecamatan Barabai
			Desa Cukan Lipai di Kecamatan Batang Alai Selatan

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
		Kawasan pergudangan	Kelurahan Barabai Timur dan Desa Mandingin Kecamatan Barabai
			Desa Kapar dan Desa Kias kecamatan Batang Alai Selatan;
			Desa Sungai Rangas Kecamatan
			Labuan Amas Selatan
			Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan.
		Kawasan terminal Pantai Hambawang	Kelurahan Pantai Hambawang Barat kecamatan Labuan Amas Selatan
		Kawasan *strategis* ekonomi jalan lingkar barat ruas walangsi- kapar	
		Kawasan perkebunan karet	Kecamatan Batang Alai Selatan
			Kecamatan Hantakan
			Kecamatan Batang Alai Timur
			Kecamatan Limpasu
	Kepentingan Sosial Budaya	Makam Pahlawan Divisi IV ALRI berada di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan	
		Mesjid Karamat Pelajau di desa Pelajau kecamatan Pandawan	

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi
		Mesjid Karamat Desa Jatuh kecamatan Pandawan
		Makam Wali Katum di desa Tabudarat Hulu kecamatan Labuan Amas Selatan
		Makam Tumenggung Jayapati di desa Abung kecamatan Limpasu
	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan Rehabilitasi Lingkungan Hidup meliputi Hutan Lindung Meratus Kecamatan Batang Alai Timur

Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2031

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Total luas hutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan tahun 2009 adalah sebesar 49.279 Ha, yang diantaranya seluas 46.270 Ha merupakan hutan lindung. Dari luas kawasan hutan tersebut hampir 55,59% atau 27.394 Ha sudah mengalami kerusakan dan 10.277 Ha berupa hutan dan lahan kritis. Pengelolaan lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap kerawanan terjadinya bencana alam. Bencana alam yang rawan terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor.

Dalam rangka perlindungan masyarakat maka dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana. Selama 5 tahun ini, bencana alam yang terjadi masih bersifat lokal, bukan berskala nasional. Bencana yang sering terjadi yaitu: kebakaran hutan terjadi sebanyak 158 kali dengan korban 412 KK, tanah longsor 4 kali dengan korban 4 KK dan angin puting beliung 5 kali dengan korban 7 KK.

2.1.3. Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumberdaya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (*subyek*) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (*obyek*). Oleh karena itu, penting untuk melihat *karakteristik demografi* penduduk, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sebagai bagian dari pengkajian potensi sumberdaya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya

Demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan-persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi *kuantitas*, *distribusi* hingga komponen-komponen perubahannya. Kondisi *demografi* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup *kompleks*, dimana pemerataan distribusi penduduk cukup timpang antar kecamatan yang mengindikasikan kurangnya pemerataan capaian hasil pembangunan di penjuru wilayah. Meskipun begitu, hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam membuat kebijakan kependudukan agar setiap capaian pembangunan dirasakan setiap lapisan masyarakat.

a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, meskipun secara *agregrat* pertumbuhan penduduknya belum cukup tinggi. Berdasarkan hasil *proyeksi* kependudukan, jumlah penduduk Hulu Sungai Tengah tahun 2014 mencapai 257.107 jiwa, dimana pada lima tahun sebelumnya sebanyak 240.460 jiwa. Dalam kurun waktu lima tahun, Kabupaten Hulu Sungai tengah hanya mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 16.647 jiwa atau meningkat sebanyak 6,92% saja. *Fenomena* ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah utamanya dalam rangka meningkatkan daya tarik wilayah agar semakin tinggi migrasi masuk.

Gambar 2. 1
Jumlah Penduduk

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2010-2014

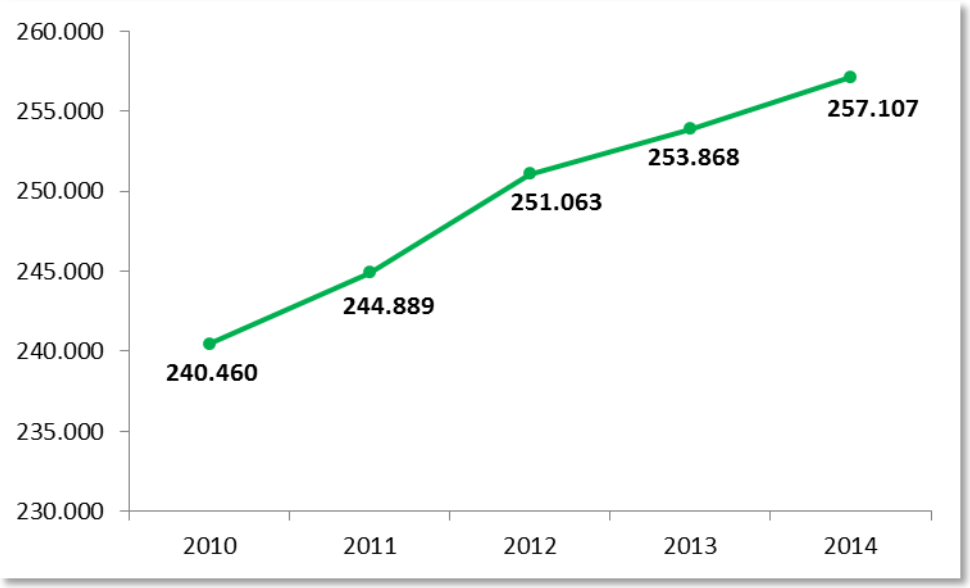

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebagian besar penduduk menghuni wilayah Kecamatan Barabai dimana jumlah penduduk

mencapai 56.740 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.040 jiwa per km^2. Selain itu, jumlah penduduk secara *agregrat* sebagian besar adalah berjenis kelamin perempuan (128.643 jiwa) dengan nilai *sex ratio* sebesar 99,86 yang menunjukan diantara 100 penduduk laki-laki terdapat 99-100 penduduk perempuan.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan

di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014

No	Kab/Kota	Luas (Km2)	Penduduk			Sex ratio	Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Haruyan	148,63	10.760	10.742	21.502	100,17	145
2	Batu Benawa	99,00	9.605	9.667	19.272	99,36	195
3	Hantakan	191,98	6.175	6.053	12.228	102,02	64
4	Batang Alai Selatan	189,80	11.250	11.561	22.811	97,31	120
5	Batang Alai Timur	247,94	3.807	3.807	7.614	100,00	31
6	Barabai	54,57	28.424	28.316	56.740	100,38	1.040
7	Labuan Amas Selatan	86,54	13.462	14.091	27.553	95,54	318
8	Labuan Amas Utara	162,40	14.656	14.161	28.817	103,50	177
9	Pandawan	144,24	15.842	15.902	31.744	99,62	220
10	Batang Alai Utara	70,00	9.120	9.110	18.230	100,11	260
11	Limpasu	77,49	5.363	5.233	10.596	102,48	137
Jumlah		1.472,00	128.464	128.643	257.107	99,86	175

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup rendah bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan maka pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada posisi paling rendah dimana pertumbuhan penduduk tahun 2013-2014 hanya sebesar 1,28%. Angka ini juga cukup jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk level provinsi dimana jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh hingga 1,77% pada tahun 2013-2014.

Gambar 2. 2
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2013-2014

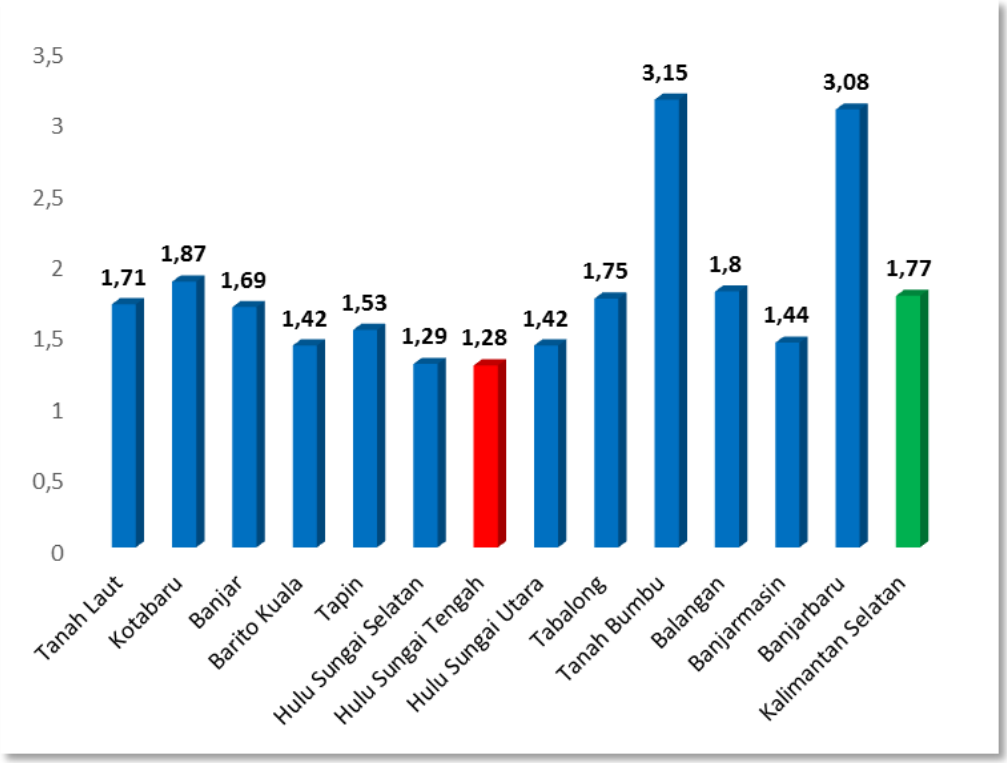

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

c. Distribusi Penduduk

Secara kasat mata, sebenarnya persebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup merata. Namun jika dilihat kembali, terdapat *gap* yang cukup tinggi antara kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak (Kecamatan Barabai sebanyak 56.740 jiwa atau 22,07%) dengan kecamatan yang *minim* penduduk (Kecamatan Batang Alai Timur sebanyak 7.614 jiwa atau 2,96%).

Sebagian besar penduduk tinggal di Kecamatan Barabai yang *notabene* merupakan ibukota kabupaten sekaligus pusat perekonomian wilayah. Selain itu, penduduk juga banyak tinggal di Kecamatan lain, seperti: Kecamatan Pandawan (12,35%), Kecamatan Labuan Amas Utara (11,21%) dan Labuan Amas Selatan (10,72%). Ketimpangan distribusi penduduk ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai salah satu landasan pemerataan capaian pembangunan agar setiap wilayah memiliki daya tarik hunian penduduk.

Gambar 2. 3
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2014

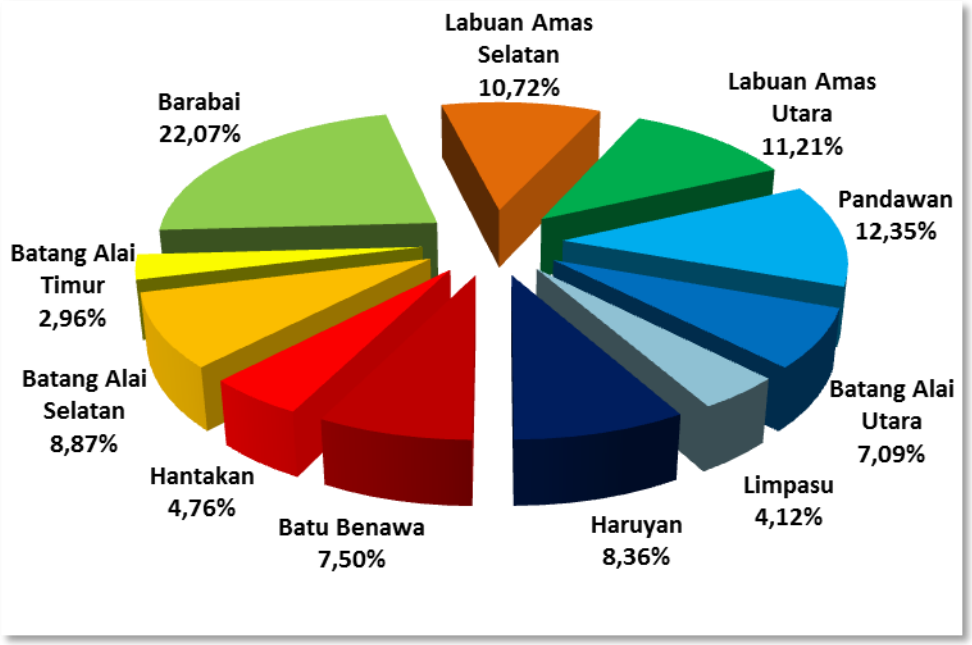

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

d. Piramida Penduduk (Analisa struktur umur)

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai *struktur* umur penduduk, baik untuk dianalisis mengenai *produktivitas* umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini, utamanya Keluarga Berencana. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terlihat bahwa *struktur* umur penduduk didominasi oleh kelompok umur muda dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur 10-14 tahun yang mencapai 24.764 jiwa dan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 24.399 jiwa.

Dari *piramida* penduduk dapat terlihat beberapa kajian umum kependudukan mengingat *pola struktur* penduduk yang didominasi kelompok umur muda, kemudian kelompok umur dewasa (*produktif*) hingga akhirnya rendahnya penduduk kelompok umur tua. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk banyak melakukan *migrasi* ke luar daerah dimana terlihat pada usia sekolah/kuliah yang mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi penduduk dalam *migrasi* keluar cukup tinggi baik *migrasi* karena ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik maupun juga didorong oleh penduduk yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Gambar 2. 4

Piramida Penduduk

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2014

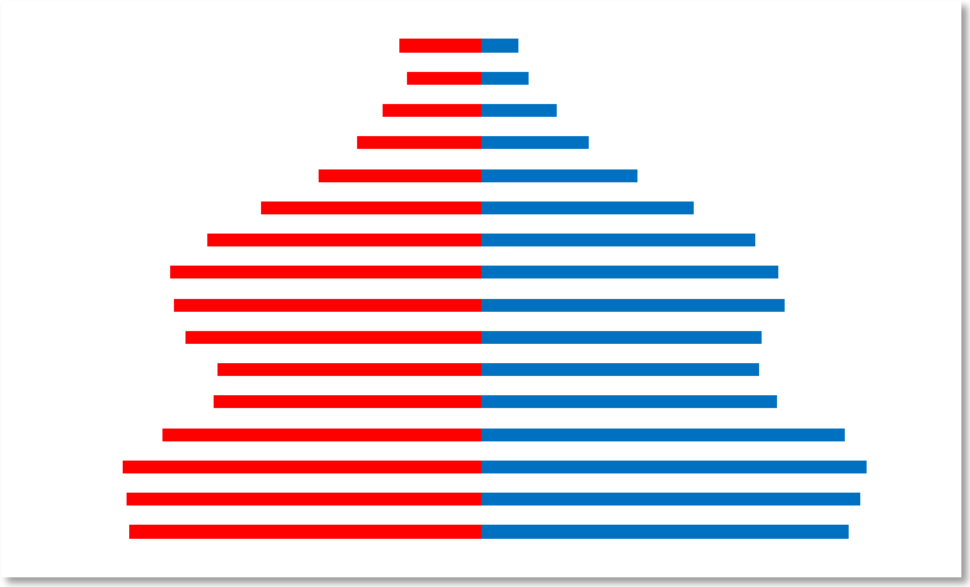

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari capaian pembangunan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini terlihat sebuah *fenomena* daerah serta *analisis* dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan *distribusi* pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi *regional* dan *transformasi* kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, kajian terkait pembangunan perekonomian wilayah dapat memberikan gambaran utuh tentang kesejahteraan masyarakat sehingga perumusan kebijakan berbasis ekonomi *makro* maupun *mikro* dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara lain: Produk *Domestik Regional Bruto* (PDRB), struktur

perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju *inflasi* hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam *monitoring* dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

a. Nilai Produk *Domestik Regional Bruto*

Produk *Domestik Regional Bruto* (PDRB) merupakan suatu *indikator* kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah *bruto* (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu *regional* yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah, baik dalam pengelolaan sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam. Kemampuan, potensi dan kinerja sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan *metodologi* penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa *revisi* dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis *periodik* juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perkembangan nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup signifikan, dimana pada tahun 2014 nilai PDRB mencapai 4,58 trilyun rupiah. Peningkatan nilai produk *domestik* daerah di seluruh sektor lapangan usaha menjadi pemicu utama pencapaian nilai PDRB, terutama pada sektor-sektor dominan pada struktur perekonomian daerah seperti kategori pertanian, kehutanan dan perikanan maupun kategori industri pengolahan.

Tabel 2.7
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 – 2014 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	962.866,9	1.046.436,6	1.159.132,9
B	Pertambangan dan Penggalian	25.840,4	28.921,5	32.265,0
C	Industri Pengolahan	569.513,3	604.349,5	688.268,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.092,1	3.071,9	3.703,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.808,3	19.423,8	22.216,5
F	Konstruksi	306.784,3	335.585,3	399.831,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	354.985,5	399.298,7	472.760,5
H	Transportasi dan Pergudangan	179.031,1	200.222,0	231.571,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126.172,0	137.785,1	160.116,2
J	Informasi dan Komunikasi	149.981,1	166.747,3	189.102,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	70.252,5	84.322,5	87.313,5
L	Real Estat	121.936,6	135.948,9	153.856,1
M,N	Jasa Perusahaan	7.002,2	7.766,2	8.863,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	373.480,5	428.647,0	513.949,9
P	Jasa Pendidikan	244.388,4	271.607,5	312.880,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.519,8	74.698,2	83.785,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	48.711,2	51.569,3	60.681,2
Total		3.627.365,2	3.996.401,3	4.580.298,1

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam melihat pergerakan perekonomian daerah dimana kajian dan analisisnya dapat memberikan masukan yang signifikan bagi perumusan kebijakan perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator *makro* dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itulah, *indikator* ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara *periodik* maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial.

Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam tiga tahun terakhir ini cukup baik dan stabil dimana pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 5,00 %. Pertumbuhan ekonomi wilayah berdasarkan tahun dasar 2010 ini didukung utamanya oleh pertumbuhan ekonomi sektoral utamanya sektor dominan dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 3,00 % dan industri pengolahan mencapai 5,00 %. Selain itu, pertumbuhan tertinggi berada pada sektor pengadaan listrik dan gas dan pertumbuhan terendah berada pada sektor pertanian (meskipun sebagai sektor dominan). Pertumbuhan *positif* pada seluruh sektor lapangan usaha memberikan kontribusi dan harapan yang tinggi bagi peningkatan perekonomian daerah utamanya sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2. 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2014

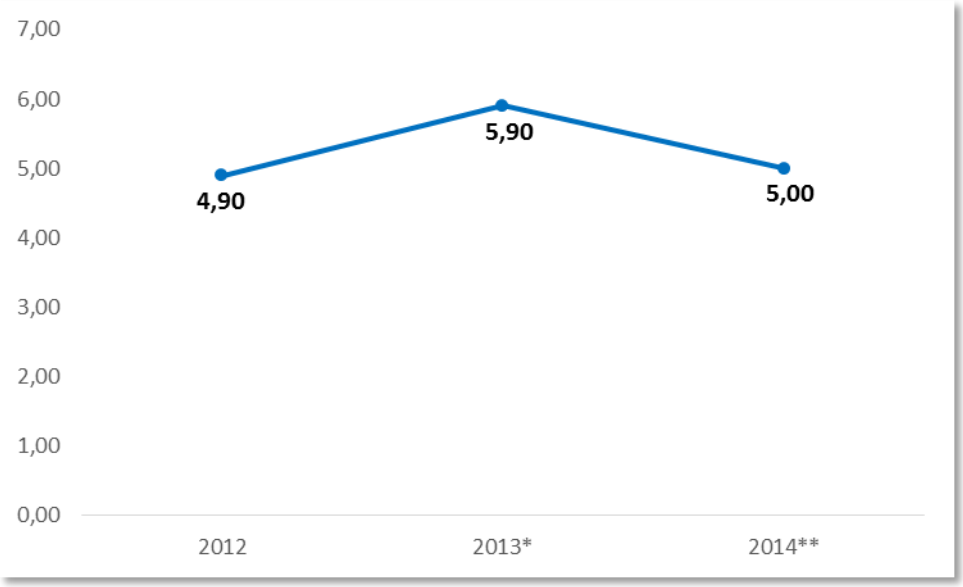

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2014

No	Kategori	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,60	5,00	3,00
B	Pertambangan dan Penggalian	10,00	6,10	6,00
C	Industri Pengolahan	4,90	4,60	5,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,70	4,60	11,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,90	4,30	7,00
F	Konstruksi	5,70	5,10	6,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, *Reparasi* Mobil dan Sepeda Motor	7,70	6,80	7,00
H	Transportasi dan Pergudangan	7,10	6,00	5,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	6,20	6,00
J	Informasi dan Komunikasi	4,00	8,90	7,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,40	14,70	6,00
L	*Real Estat*	6,70	6,40	6,00
M,N	Jasa Perusahaan	6,70	6,40	5,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,20	5,90	6,00
P	Jasa Pendidikan	5,20	7,90	8,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,20	9,30	6,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,20	2,60	7,00
Total		**4,90**	**5,90**	**5,00**

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

c. Struktur ekonomi wilayah

Struktur perekonomian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dimana pada tahun 2014 memiliki *kontribusi sektoral* terhadap struktur ekonomi wilayah sebesar 25,31 %. Selain itu, sektor dominan perekonomian lainnya adalah sektor industri pengolahan dimana memiliki *kontribusi* perekonomian sebesar 15,03 %. Sedangkan sektor perekonomian yang hanya memiliki andil minim dalam pembentukan perekonomian daerah adalah sektor pertambangan dan penggalian (0,70%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,49%), sektor jasa perusahaan (0,19%), dan paling kecil kontribusinya adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,08%).

Tingginya andil kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki harapan yang positif pada perkembangan pembangunan perekonomian berkelanjutan karena selain merupakan sumberdaya alam tak terbaharui, juga pada sektor ini memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat dari perekonomian hulu hingga hilir. Namun, untuk lebih mengoptimalkan pembangunan perekonomian daerah, perlu adanya *inovasi* dalam memberikan nilai tambah sektor-sektor tertentu sebagai bagian pengembangan daya saing *sektoral*.

Tabel 2.9
Distribusi Persentase PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 – 2014

No	Kategori	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,54	26,18	25,31
B	Pertambangan dan Penggalian	0,71	0,72	0,70
C	Industri Pengolahan	15,70	15,12	15,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,49	0,49	0,49
F	Konstruksi	8,46	8,40	8,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,79	9,99	10,32
H	Transportasi dan Pergudangan	4,94	5,01	5,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,48	3,45	3,50

J	Informasi dan Komunikasi	4,13	4,17	4,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,94	2,11	1,91
L	Real Estat	3,36	3,40	3,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,19	0,19	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,30	10,73	11,22
P	Jasa Pendidikan	6,74	6,80	6,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,81	1,87	1,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,34	1,29	1,32
Total		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

d. PDRB per kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian *makro* suatu wilayah yang *identik* dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara *makro* berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara *makro* sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata, namun setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara *makro*.

Peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara umum mengindikasikan bahwa selain peningkatan perekonomian *makro*, juga terjadi peningkatan perekonomian secara *mikro* yang diindikasikan melalui peningkatan angka PDRB per kapita yang cukup tajam. Pada tahun 2012, angka PDRB per kapita hanya sebesar Rp.14,45 juta, sedangkan pada tahun 2014 meningkat cukup tajam hingga mencapai Rp.17,81 juta. Meskipun begitu, perlu adanya kajian lebih mendalam terkait pemerataan pendapatan hingga pengeluaran konsumsi masyarakat agar terlihat *relevansi* pemerataan kesejahteraan masyarakat secara *riil*.

Gambar 2. 6
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 – 2014

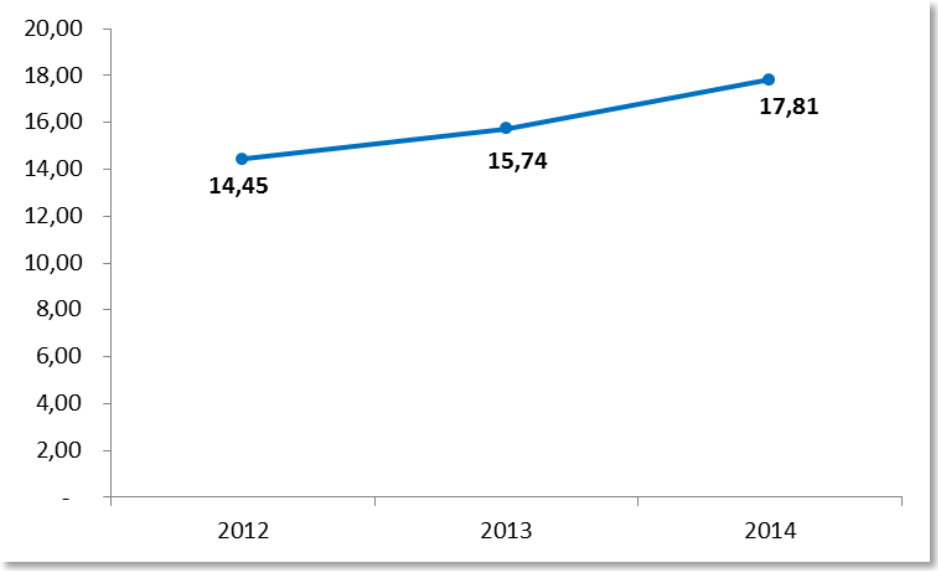

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

e. Indeks Gini

Pembangunan, baik ekonomi maupun sosial, yang dilakukan pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara *horisontal*. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah "rasio gini". Rasio ini menganalisis nilai dengan *interpretasi* semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, secara umum terlihat bahwa indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan kesejahteraan masyarakat (pendapatan). Meskipun masih berada pada *skala* cukup merata karena berada pada kisaran angka "0,3", namun peningkatan indeks gini ini perlu diwaspadai dan menjadi perhatian serius bagi pengambil kebijakan.

Gambar 2. 7
Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2006-2013

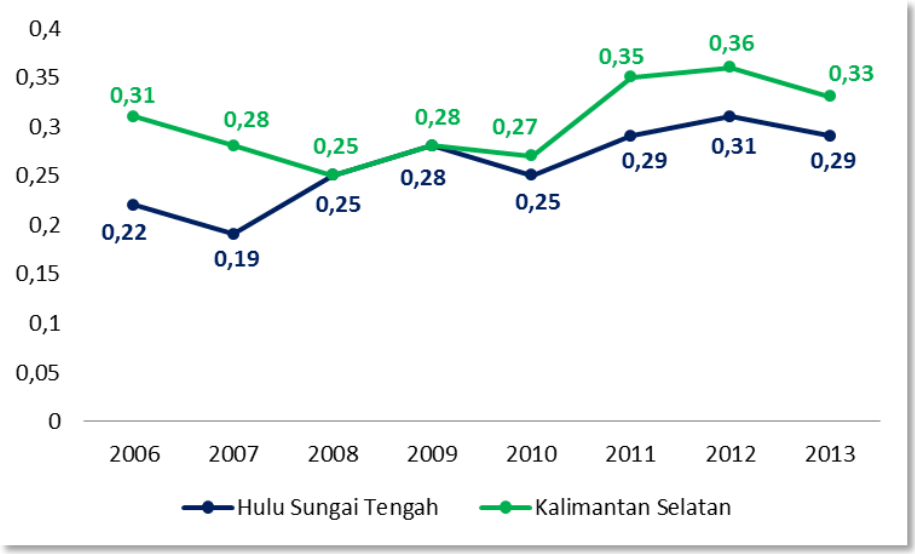

Sumber: Hulu Sungai Tengah dalam Angka, 2014

f. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimana hal ini merupakan sebuah permasalahan *klasik* dan *kontinyu* yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan yang menyatakan *persentase* penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 2.10
Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006 – 2013

Tahun	Penduduk Miskin (org)	%	Penurunan (org)
2006	24.881	10,39	-
2007	19,275	8,14	5.606
2008	17.151	7,12	2.124
2009	13.924	5,73	3.227
2010	15.400	6,32	+1.476

Tahun	Penduduk Miskin (org)	%	Penurunan (org)
2011	14.891	5,98	509
2012	14.195	5,68	696
2013	14.181	5,57	14
2014	14.557	5,65	+376

Sumber: BPS Hulu Sungai Tengah

Tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin sebanyak 14.181 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 5,57 %. Meskipun terus mengalami penurunan, angka ini masih berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 4,77 % pada tahun 2013.

2.2.2. Fokus kesejahteraan masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara *vertikal* (menyeluruh di semua lapisan masyarakat maupun *horizontal* (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri dapat tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik *primer, sekunder* maupun *tersier*. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks *komposit* yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programes (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks *komposit* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan *metodologi* baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), dan Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Gambar 2. 8
Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2010-2014

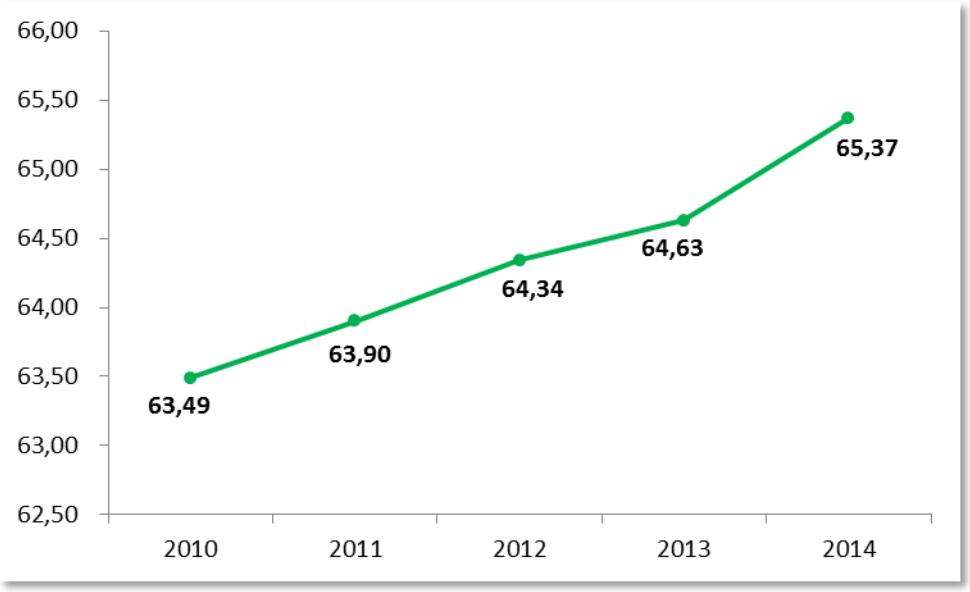

Sumber: BPS Hulu Sungai Tengah, 2015

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki capaian peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2014 memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 65,37. Peningkatan ini merupakan rapor *positif* bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program kegiatan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas individu, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Meskipun begitu, jika dilihat dan diperbandingkan dalam *regional* Provinsi Kalimantan Selatan maka IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai ranking 9 (sembilan) dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota dimana IPM Provinsi Kalimantan Selatan sendiri mencapai 67,63.

b. Pendidikan

Pembangunan pendidikan daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumberdaya manusia utamanya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih

baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

- Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat pada kurun waktu lima tahun terakhir dan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai rata-rata lama sekolah selama 7,27 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerataan dan peningkatan partisipasi pendidikan meningkat dimana penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah rata-rata telah bersekolah hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas dua semester satu.

Gambar 2. 9
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2010-2014

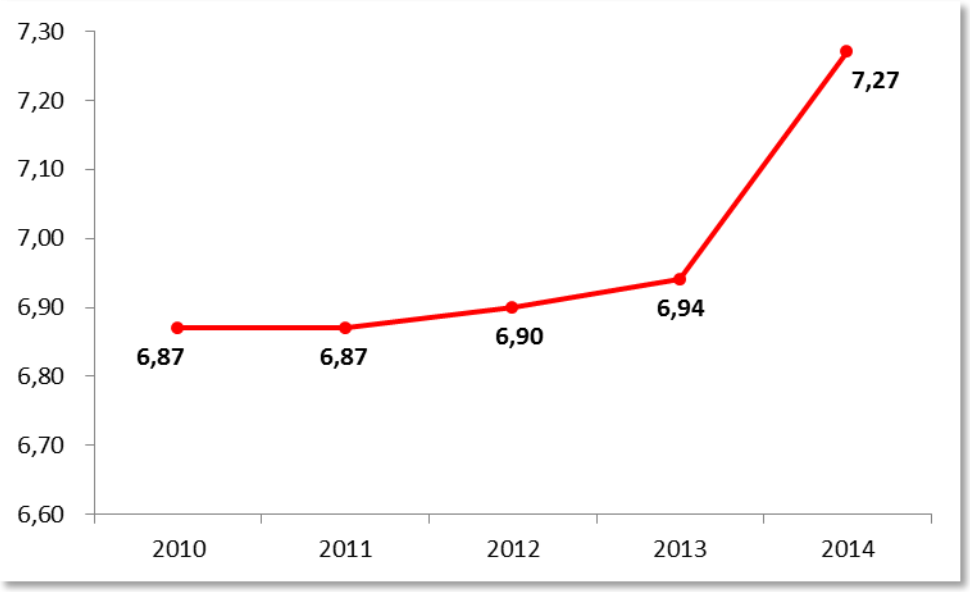

Sumber: BPS Hulu Sungai Tengah, 2015

- Harapan Usia Lama Sekolah

Harapan Usia Lama Sekolah merupakan salah satu *indikator* baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mengimplementasikan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh.

Harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 11,42 pada tahun 2014. Hal ini merupakan rapor *positif* bagi *stakeholder* maupun instansi pembangunan pendidikan dimana meningkatnya harapan lama sekolah menjadikan potensi sumberdaya manusia generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang masuk usia sekolah pada tahun 2014 memiliki kesempatan mengenyam bangku pendidikan formal hingga 11-12 tahun dimana lama sekolah 11-12 tahun berarti hampir mencapai kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Gambar 2. 10
Harapan Usia Sekolah (Tahun)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2010-2014

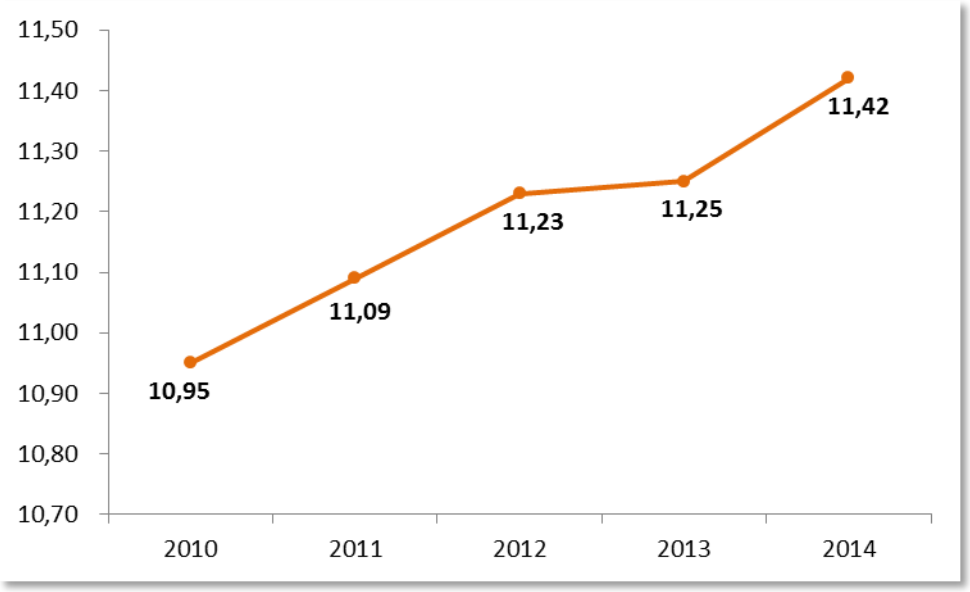

Sumber: BPS Hulu Sungai Tengah, 2015

- Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Melihat lebih dalam terkait partisipasi pendidikan masyarakat, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial, khususnya dimensi pengetahuan adalah indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) anak-anak usia sekolah yang menggambarkan keterjangkauan pelayanan pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan jumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umurnya. Sedangkan, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator pendidikan yang mengindikasikan jumlah penduduk suatu wilayah yang mengenyam jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan batasan usia sekolahnya.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, APK untuk jenjang Sekolah Dasar lebih dari 100 % yang mengindikasikan cukup tingginya penduduk yang mengenyam pendidikan SD bahkan pada usia diluar 7-12 tahun. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APK akan semakin menurun. Ini mengindikasikan adanya penurunan atensi penduduk dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006 - 2014

No.	Tahun	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM
1.	2006	102,06	92,06	89,78	69,11	44,00	34,00
2.	2007	102,06	92,21	84,62	77,05	82,00	67,00
3.	2008	110,05	95,90	91,16	74,88	86,00	74,00
4.	2009	112,38	97,08	95,67	77,00	87,09	75,00
5.	2010	113,51	98,23	96,21	76,90	88,01	79,87
6.	2011	114,11	99,18	98,43	77,94	91,13	82,81
7.	2012	111,43	97,49	97,50	85,36	86,43	78,81
8.	2013	117,52	87,07	97,47	85,69	82,75	81,63
9.	2014	103,91	87,06	100,53	78,90	80,00	67,10

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Di setiap jenjang pendidikan, secara umum pada setiap tahunnya terjadi tren menurun pada APM yang mengindikasikan cukup rentannya penduduk pada usia sekolah untuk mengenyam jenjang pendidikan sesuai tingkatan usia sekolahnya. Selain itu, semakin meningkat jenjang pendidikan maka semakin menurun pula nilai APM. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dalam merumuskan program *prioritas* pembangunan bidang pendidikan agar lebih berdaya saing dan optimal.

Secara umum, perlu kerja lebih keras dalam rangka peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan sehingga terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah yang dapat bersekolah baik melalui peningkatan sarana prasarana, pembiayaan maupun peningkatan minat bersekolah.

c. Kesehatan

- Angka Harapan Hidup

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan

diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir dalam mencapai usia harapan hidup selama sekian tahun.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 mencapai angka harapan hidup selama 64,33 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2014 akan memiliki harapan hidup hingga usia 64-65 tahun.

Gambar 2. 11
Angka Harapan Hidup (Tahun)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2010-2014

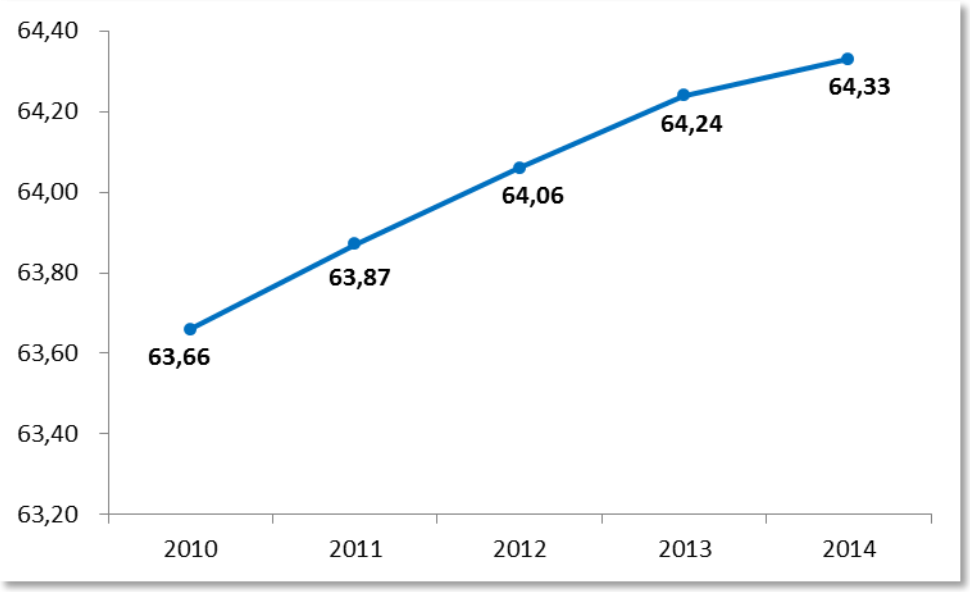

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

- Angka Kematian Ibu dan Bayi

Aspek kesejahteraan masyarakat lainnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin tinggi angka kematian yang dicapai berarti tingkat kesejahteraan masyarakat utamanya dalam bidang kesehatan semakin rendah karena berkaitan dengan kemampuan pengetahuan tentang pentingnya pelayanan kesehatan dan kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Perkembangan AKI dan AKB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Angka Kematian Ibu Tahun 2006 - 2014
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Tahun	Jumlah Ibu Melahirkan	Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan	Perkiraan AKI per 100.000 melahirkan
1.	2006	4.363	9	206
2.	2007	3.860	7	181
3.	2008	4.931	8	162
4.	2009	4.829	6	124
5.	2010	4.881	3	61
6.	2011	4.625	9	194
7.	2012	4.335	3	69
8.	2013	4.260	6	140
9.	2014	4.379	12	274

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Pencapaian angka kematian ibu belum menunjukkan angka yang stabil tetapi masih berfluktuatif, dengan *fluktuasi* yang cukup besar. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 kembali terjadi penurunan, tetapi pada tahun 2013 dan 2014 meningkat lagi secara tajam. AKI pada tahun 2011 adalah sebesar 194/100.000 ibu melahirkan, turun pada tahun 2012 menjadi 69/100.000 ibu melahirkan tetapi pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 140/100.000 ibu melahirkan dan pada tahun 2014 melonjak menjadi 274/100.000 ibu melahirkan. Begitu pula dengan angka kematian bayi juga masih berfluktuatif. Sama dengan kasus angka kematian ibu, angka kematian bayi pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010, tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2012 dan stagnan pada tahun 2013 pada angka 12/1000 kelahiran, tetapi kemudian melonjak tajam pada tahun 2014 yang mencapai 18/1.000 kelahiran.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2006-2014
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Tahun	Jumlah Bayi Dilahirkan	Angka Kematian Bayi (AKB)	Perkiraan AKB per 1.000 kelahiran
1.	2006	4.395	32	7
2.	2007	3.990	47	12
3.	2008	4.933	67	14
4.	2009	4.829	53	11
5.	2010	4.888	51	10
6.	2011	4.633	61	13
7.	2012	4.369	51	12
8.	2013	4.278	53	12
9.	2014	4.365	80	18

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran untuk memeriksakan kehamilan pada 3 bulan pertama dan keterlambatan rujukan sehingga perlunya peningkatan jangkauan dan akses pelayanan kesehatan. Kendala lainnya adalah banyaknya kasus kehamilan yang tidak dikehandaki, dimana ibu hamil sehingga seringkali terlambat ataupun tidak memeriksakan kehamilannya. Tetapi pencapaian tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan angka Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional. Pencapaian yang berfluktuasi ini tentunya memerlukan kerja keras dengan upaya yang lebih sistematis dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil yang rentan.

2.2.3. Fokus seni budaya dan olahraga

a. Kebudayaan

Kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan daerah. Pada tahun 2014, jumlah penyelenggaraan *festival* seni dan budaya dilaksanakan sebanyak tiga kali. Selain itu, sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Sungai Hulu Tengah sebanyak 10 unit. Penemuan-penemuan benda, situs dan kawasan cagar budaya juga semakin meningkat sehingga menurunkan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 80 %.

Tabel 2.14
Indikator Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	10 bh	10 bh	10 bh	10 bh	10 bh
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	100 %	50 %	71,43 %	80 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

b. Pemuda dan Olahraga

Generasi muda yang sehat dan berdedikasi merupakan salah satu cerminan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, utamanya dalam menyiapkan pelaksanaan pembangunan masa mendatang. Berbagai sarana dan prasarana untuk pengembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus dikembangkan dimana pada tahun 2014 terdapat 20 organisasi kepemudaan serta 25 organisasi olahraga. Berikut *progress* pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 – 2014.

Tabel 2.15
Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	22	22	20	20	20
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	28	29	30	25	25
3.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0,045%	0,045%	0,055 %	0,057 %	0,012 %
4.	Lapangan olahraga	0,078%	0,53%	0,63 %	0,65 %	0,02 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan mengenai perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baik pada urusan pelayanan wajib maupun urusan pilihan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

2.3.1. Fokus layanan urusan wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hingga *aksesibilitas* wilayah. Berikut *indikator* kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah daerah hingga saat ini.

a. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS yang terus mengalami trend kenaikan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang memang seharusnya bersekolah semakin meningkat.

Keberhasilan peningkatan angka partisipasi pendidikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan pemerintah secara langsung dapat dilihat dari pemberian Bantuan *Operasional* Sekolah Daerah, pemberian beasiswa kepada pelajar hingga peningkatan *insentif* tenaga pengajar. Sedangkan dukungan pemerintah secara tidak langsung dapat dilihat pada peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan, seperti: perbaikan jalan menuju akses pendidikan, peningkatan jangkauan listrik ke desa-desa terpencil dan sebagainya.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	98,23 %	99,18 %	97,49 %	87,07 %	87,06 %
2.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	76,90 %	77,94 %	85,36 %	85,69 %	78,90 %
3.	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA	79,87 %	82,81 %	78,81 %	81,63 %	67,10 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Hulu Sungai Tengah cukup tinggi meskipun secara umum terjadi penurunan APS pada kurun waktu lima tahun terakhir. Selain penurunan secara series pada jenjang yang sama, terjadi juga penurunan APS pada setiap kenaikan jenjang pendidikan utamanya pada tahun 2012 hingga tahun 2014 yang mengindikasikan penurunan *partisipasi* sekolah pada usia pendidikan yang lebih tinggi.

2. Rasio Guru-Murid

Rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ketersediaan sekolah cukup menunjang dalam mengembangkan pendidikan masyarakat. Namun, masih minim dan tidak meratanya penyebaran fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas dan kompeten di seluruh kecamatan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan belajar mengajar.

Tabel 2.17
Jumlah Sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru-Murid
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	**Pendidikan Wajar 9 Tahun**					
1.1.	Jumlah SD/MI	305 bh	305 bh	312 bh	311 bh	310 bh
1.2.	Jumlah SMP/MTs	58 bh	58 bh	66 bh	67 bh	57 bh
1.3.	Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah	76,37	82,04	98,79	110,83	87,28
1.4.	Rasio Guru /murid	819,04	928,27	817,93	772,68	686,67
2.	**Pendidikan Menengah**					
2.1.	Jumlah SMA/MA/SMK	27 bh	27 bh	31 bh	31 bh	32 bh
2.2.	Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah	23,95	25,37	37,01	32,44	26,64
2.3.	Rasio Guru /murid	573,84	607,85	695,80	932,57	1.159,11

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

3. Kondisi Sekolah

Peningkatan berbagai sarana dan prasarana pendidikan cukup digalakkan dan direalisasikan sebagai bagian dari usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari kondisi fasilitas sekolah yang selalu meningkat kondisinya, dimana pada tahun 2014 pada setiap jenjang pendidikan lebih dari 80 % kondisi sekolah dalam keadaan baik.

Tabel 2.18
Kondisi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	**Fasilitas Pendidikan**					
1.1	Sekolah SD/MI Kondisi baik	75 %	75 %	80 %	36,42 % *)	80 %
1.2	Sekolah SMP/MTs Kondisi baik	49 %	50 %	83 %	46,05 % *)	80 %
1.3	Sekolah SMA/MA/SMK Kondisi baik	71 %	71 %	80 %	68,75 % *)	82,5 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup fluktuatif meskipun memiliki tren yang menurun secara umum. Pada tahun 2014, terdapat 0,15 % murid SD/MI yang putus sekolah; 0,40 % murid SMP/MTs yang putus sekolah; dan 0,23 % murid SMA/SMK/MA yang putus sekolah.

Tabel 2.19
Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	**Angka Putus Sekolah**					
1.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,93 %	1,41 %	0,15 %	0,14 %	0,15 %
1.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,42 %	1,55 %	0,38 %	0,30 %	0,40 %
1.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,58 %	1,45 %	0,92 %	0,88 %	0,23 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

5. Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan

Jika dilihat dari angka kelulusan, maka hasil yang cukup menggembirakan pada jenjang sekolah SD/MI dimana seluruh murid selama empat tahun terakhir berhasil lulus sekolah, sedangkan pada SMP/MTs hanya sebanyak 99,86 % yang lulus pada tahun 2014 dan sebanyak 99,19 % yang lulus pada tahun yang sama. Sedangkan pada angka melanjutkan sekolah, terlihat

penurunan angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs namun terjadi kenaikan angka melanjutkan pada jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.

Tabel 2.20
Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	**Angka Kelulusan**					
1.1.	Angka Kelulusan SD/MI	99,19 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.	Angka Kelulusan SMP/ MTs	100 %	100 %	99,97 %	100 %	99,86 %
1.3.	Angka Kelulusan SMA /SMK/MA	99,95 %	99,95 %		99,92 %	99,19 %
2.	**Angka Melanjutkan**					
2.1	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	85,59 %	83,87 %	100,77 %	100,77 %	88,49 %
2.2	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	82,99 %	74,10 %	86,74 %	86,74 %	86,74 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

6. Kualifikasi Guru (Jumlah guru yang berpendidikan DIV/S1/S2/S3)

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus meningkatkan capaian bidang pendidikan sebagai motor peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini terlihat dari meningkatnya *persentase* guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang mencapai angka 75,92 % pada tahun 2014.

Gambar 2. 12
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2010-2014

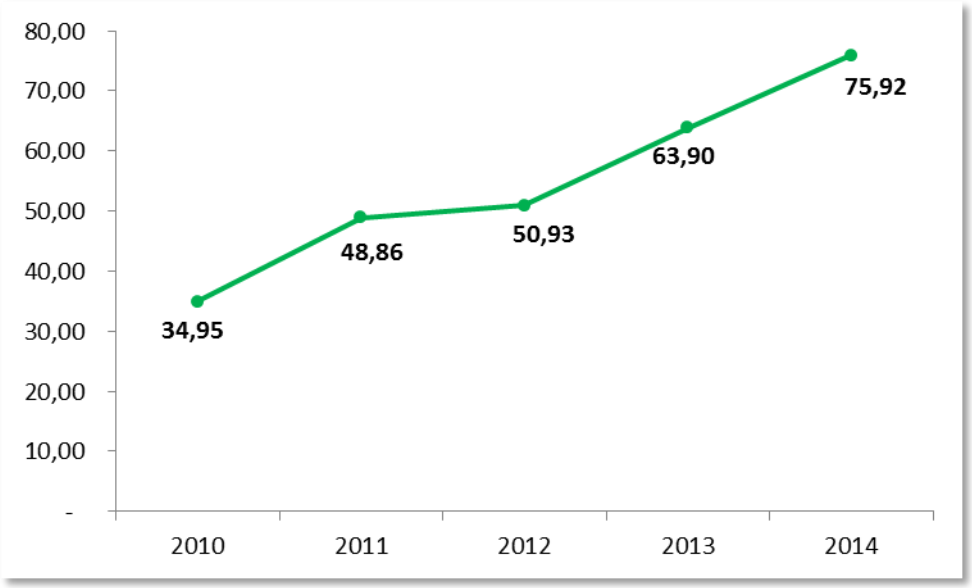

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumberdaya manusia dalam melaksanakan *aktivitas* untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan ke depannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakatnya, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan maupun tingkat kesehatan penduduk. Peningkatan berbagai pelayanan kesehatan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Meskipun begitu, perlu adanya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti: peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut *indikator* pembangunan kesehatan yang mengindikasikan peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 2.21

Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rasio Posyandu / balita	18,55	18,63	14,97	15,08	16,88
2.	Rasio puskesmas, pustu, poliklinik per satuan penduduk	0,73	0,73	0,23	0,09	0,25
3.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,13	0,13	0,094	0,17	0,12
4.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,31	1,31	1,82	2,29	2,51
5.	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,85 %	77,94 %	83,1 %	80,30 %	83 %
7.	Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	79,88 %	79,90 %	87 %	81,07 %	91,1 %
8.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 % (6 org)	100 % (5 org)	100 % (1 org)	100 % (5 org)	100 % (6 org)
9.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	33,21 %	33,1 %	33,85 %	31,2 %	27,59 %
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100 % (74 org)	100 % (30 org)	100 % (141 org)	100 % (74 org)	100 % (169 org)
11.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	35,29 %	34,10 %	0,72 %	18,44 %	115,5 %
12.	Cakupan kunjungan bayi	99,09 %	74,50 %	61,66 %	84,02%	68,79 %
13.	Cakupan puskesmas	172,73 %	172,73 %	172,73 %	172,73 %	172,73 %
14.	Cakupan Pembantu Puskesmas (Pustu, Poskesdes, Polindes dll)	94,08 %	94,08 %	95,86 %	97,63 %	57,14 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Dalam bidang pekerjaan umum, *aksesibilitas* wilayah terkait perhubungan darat masih menjadi "pekerjaan rumah" yang cukup penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah. Jalan sebagai penghubung utama antar wilayah khususnya daerah terpelosok masih belum *optimal* pengadaannya bahkan kondisi jalan masih banyak yang belum layak.

Dari sepanjang 753,46 km jalan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebanyak 662,03 sudah di aspal. Meskipun begitu, masih terdapat 20,05 % kondisi jalan yang rusak bahkan sepanjang 1,16 % jalan mengalami rusak berat. Oleh karena itu, perlu adanya porsi lebih terkait pengadaan jalan maupun pengawasannya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar infrastruktur perhubungan dapat terealisasi dengan baik.

Tabel 2.22
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2014

No.	Jenis Permukaan Jalan	Jalan Kabupaten	Jalan Provinsi/Negara	Jumlah
1.	Aspal	588,55	73,48	662,03
2.	Kerikil	70,20	0	70,20
3.	Tanah	20,48	0	20,48
4.	Tidak Dirinci	0,75	0	0,75
Jumlah		679,98	73,48	753,46

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

Gambar 2. 13
Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014

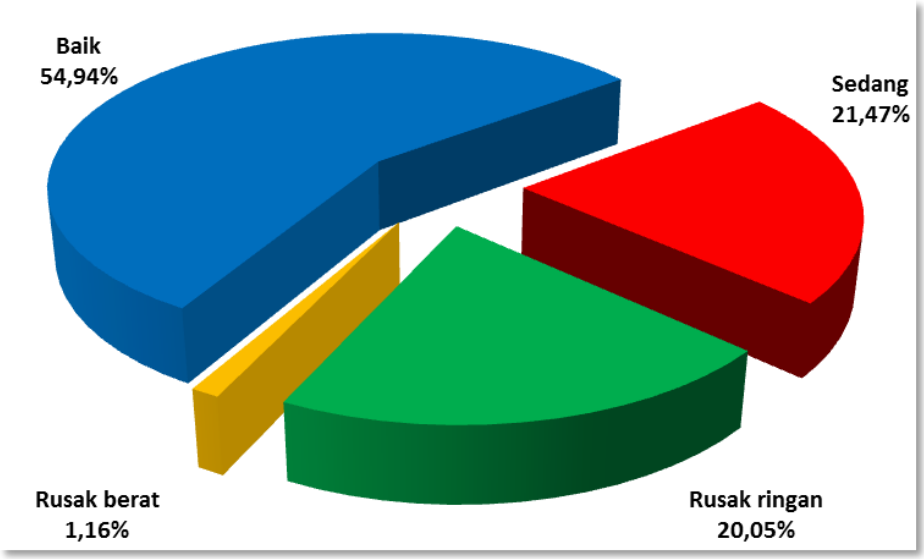

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

Salah satu infrastruktur yang menunjukkan kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan masyarakat adalah perumahan yang layak untuk dihuni. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu secara *konsisten* melakukan pengawasan dan *monitoring* dalam hal pengadaan perumahan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan pendidikan maupun pengetahuan terhadap masyarakat terkait perumahan yang layak huni, baik dari segi kesehatan, sanitasi dan sebagainya.

1. Rumah tangga pengguna air bersih

Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup mengkhawatirkan karena hanya sebanyak 31,70 % saja masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun angka ini dirasa cukup rendah sehingga berefek pada minimnya derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 2. 14
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

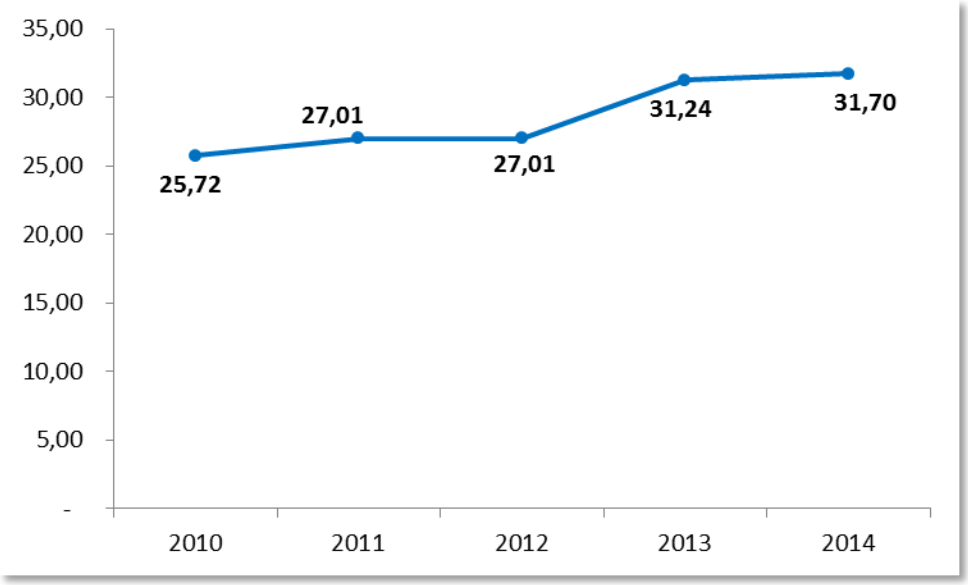

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

2. Rumah tangga bersanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki *sanitasi* baik di rumahnya mengalami penurunan yang signifikan. Persentase rumah tangga yang bersanitasi mencapai 52,73 % pada tahun 2014, padahal pada tahun 2012 telah mencapai 71,22 %. Hal ini harus menjadi perhatian penting pemerintah terhadap pemukiman masyarakat agar menjadi antisipasi mewabahnya penyakit akibat minimnya sanitasi layak di lingkungan masyarakat.

Gambar 2. 15
Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

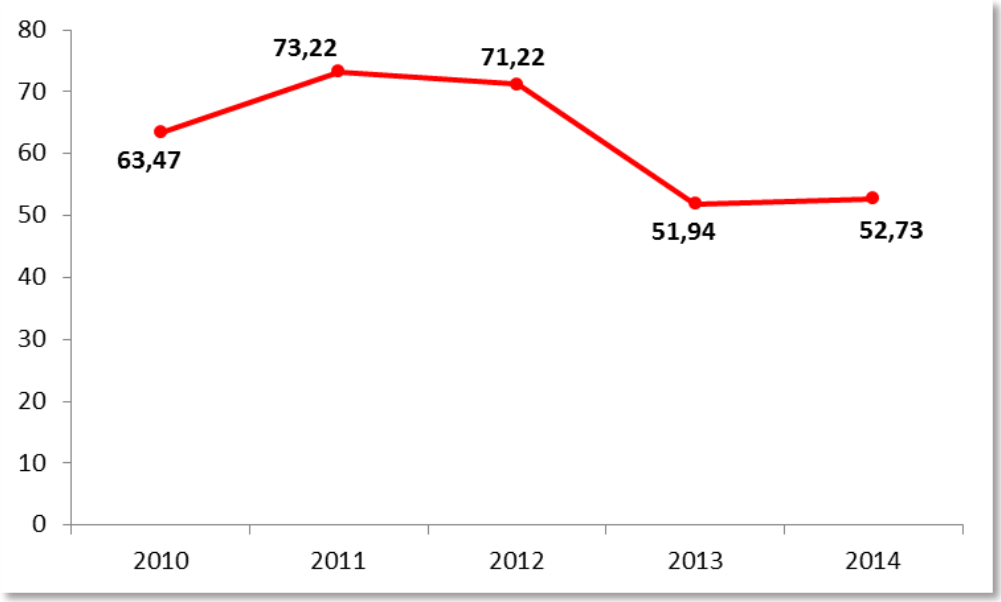

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

3. Rumah layak huni

Jika dilihat dari rumah layak huni yang dimiliki oleh masyarakat, sebanyak 79,97 % masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memilikinya. Hal ini menjadi catatan penting dalam *progress* pembangunan karena meskipun fasilitas air bersih cukup minim dan sanitasi layak juga belum optimal, namun rumah layak huni memiliki *persentase* cukup tinggi dalam ketersediaannya. Kajian pemerintah daerah terhadap fenomena ini menjadi salah satu bahan dalam perumusan kebijakan, utamanya terkait bidang perumahan agar program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa sejalan dengan tujuan dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Gambar 2. 16

Persentase Penduduk Memiliki Rumah Layak Huni

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

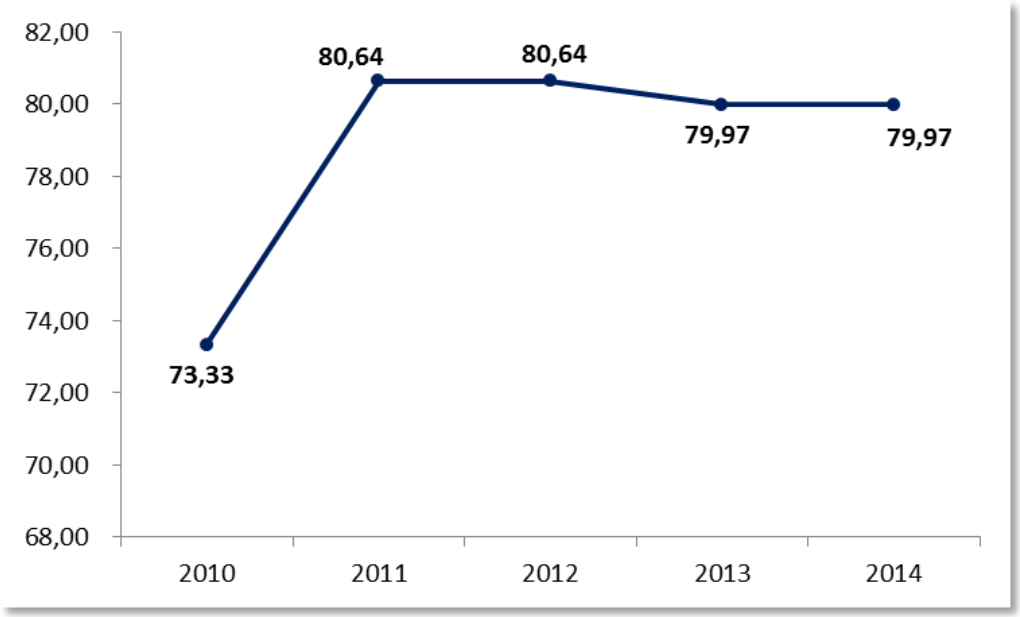

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

e. Perhubungan

Sebagian besar masyarakat memiliki sepeda motor sebagai salah satu sarana praktis dalam menunjang kehidupan masyarakat. Sebanyak 44.416 unit sepeda motor telah dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sebanyak 2.876 unit mobil penumpang juga beredar dengan rincian 2.502 unit mobil pribadi dan 374 mobil umum.

Tabel 2.23
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2014

No.	Jenis Kendaraaan	Pribadi	Umum	Jumlah
1.	Mobil Penumpang	2.502	374	2.876
2.	Mobil Beban	1.007	220	1.227
3.	Sepeda Motor	44.416	0	44.416

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

f. Lingkungan hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan meningkatkan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkesinambungan.

Penanganan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara umum mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar 82,36 %. Namun angka ini sebenarnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan fokus yang lebih utamanya dari dinas/instansi terkait.

Gambar 2. 17
Persentase Penanganan Sampah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014

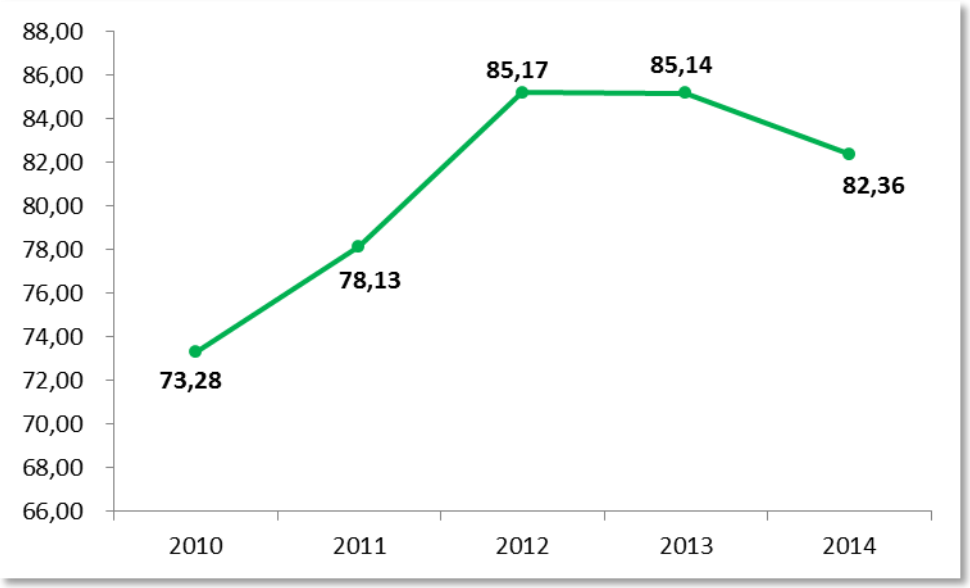

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Tabel 2.24
Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penanganan sampah	73,28 %	78,13 %	85,17 %	85,14 %	82,36 %
2.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	9,99	2,64	2,15	0,63	0,05
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	0	100	100	100	100

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam melaksanakan pembangunan periode saat ini, perlu adanya fokus pemerintah pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan isu kesetaraan *gender* menjadi perhatian dunia internasional dimana penggalakan *emansipasi* wanita dapat memberikan suatu akselerasi *positif* bagi pembangunan daerah. Berikut capaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 – 2014 yang dilihat dari *partisipasi* terhadap pembangunan daerah.

Tabel 2.25
Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	86,46 %	77,52 %	74,32 %	84,91 %	92,3 %
2.	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	95,83 %	95,83 %	97,25 %	97,41 %	97,41 %
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	73,02 %	79,78 %	79,91 %	93,89 %	93,89 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

h. Sosial

Aspek sosial dalam pembangunan menjadi penting karena terkait dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan, baik secara fisik maupun *psikologis*. Berikut beberapa indikator terkait aspek sosial sebagai hasil dari pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode sebelumnya.

Tabel 2.26
Indikator Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	96,81 %	71,38 %	5,25 %	5,40 %	13,18 %
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 %	100 %	43,22 %	38,51 %	13,18 %
3.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	14 bh	14 bh	14 bh	13 bh	13 bh

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

i. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumberdaya manusia suatu wilayah. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat cukup tajam hingga tahun 2014. Pada tahun tersebut, TPAK meningkat hingga mencapai 71,12. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya dan bisa disebabkan penimbangnya yakni jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Gambar 2. 18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

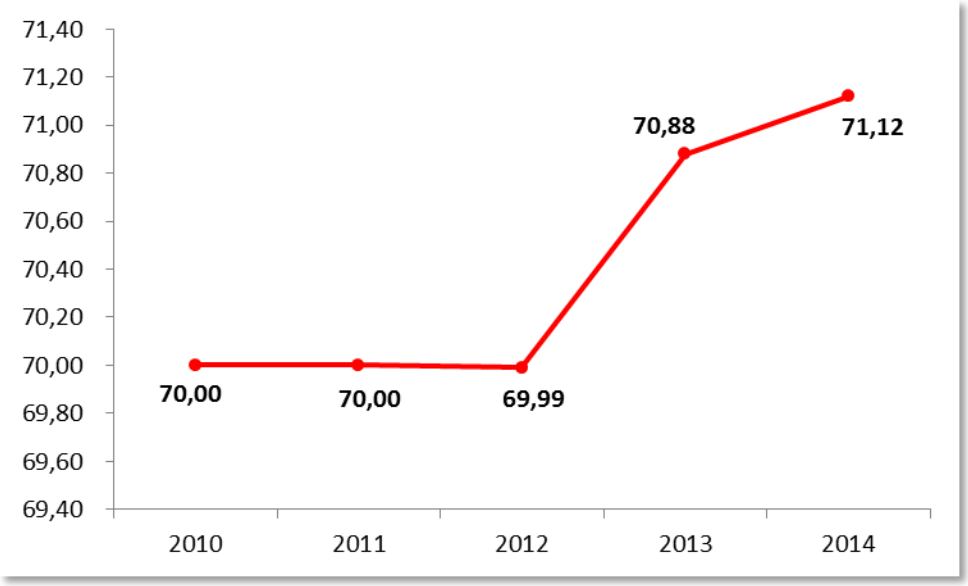

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Persentase pencari kerja yang ditempatkan juga cukup minim dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Padahal pada tahun 2012 penyeraan tenaga kerja cukup tinggi yang terdeteksi dari tingginya persentase pencari kerja yang ditempatkan hingga mencapai 79,49 %.

Gambar 2. 19
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

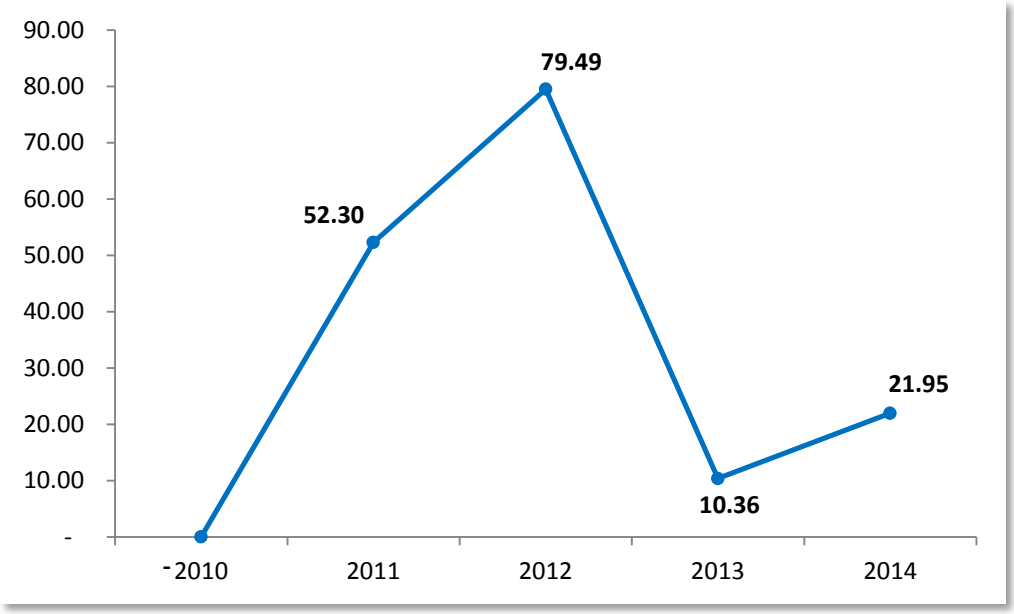

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat *mikro* adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, koperasi berjalan secara *stagnan* dimana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir persentase koperasi yang aktif hanya pada kisaran 47,75 %. Lain halnya dengan usaha mikro dan kecil yang meningkat cukup tajam jika dibanding dengan UKM.

Tabel 2.27
Indikator Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Koperasi aktif	47,22 %	52,00 %	47,75 %	47,75 %	47,75 %
2.	Usaha Mikro dan Kecil dibanding UKM	74,36 %	74,36 %	92,42 %	50,34 %	84,40 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

k. Penanaman modal

Penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2014 meningkat lebih dari 2 kali lipat dimana peningkatan nilai *realisasi* Penanaman Modal Dalam Negeri mencapai 103,44 %. Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan karena dengan meningkatnya investor masuk ke wilayah maka semakin berkembang perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Gambar 2. 20
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

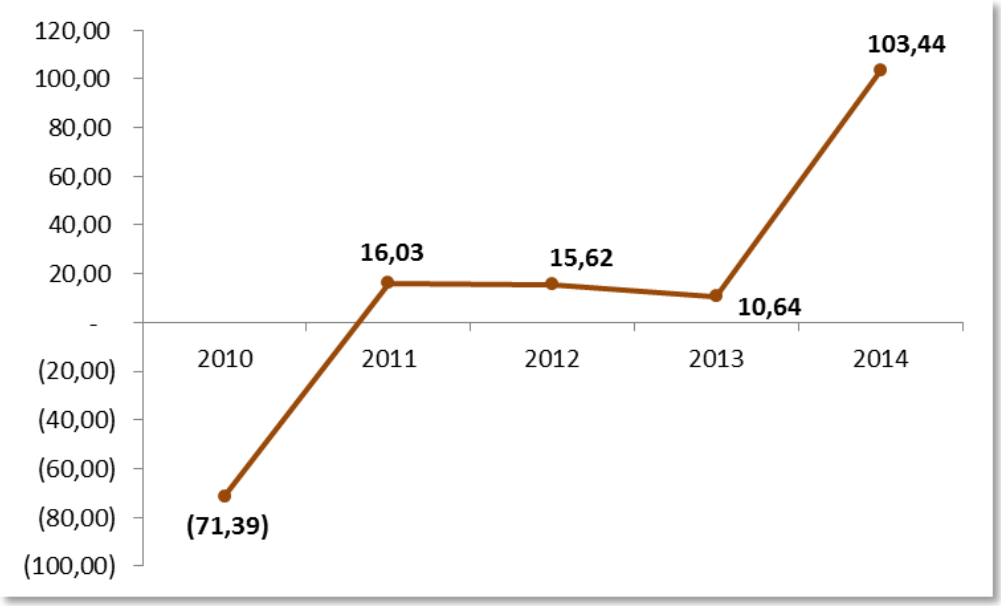

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

l. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan kualitas wilayah perdesaan merupakan salah satu komitmen penting dari presiden terpilih yang tertuang dalam program prioritasnya NAWACITA secara *eksplisit* dalam "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagian besar wilayah desa masih merupakan desa tertinggal yang mencapai 62,11 %, bahkan terdapat pula 11,80 % desa yang sangat tertinggal. Selain itu, hanya 1 desa saja yang memiliki status desa maju dan sebesar 25,47 % desa berstatus desa berkembang.

Gambar 2. 21
Status Desa

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

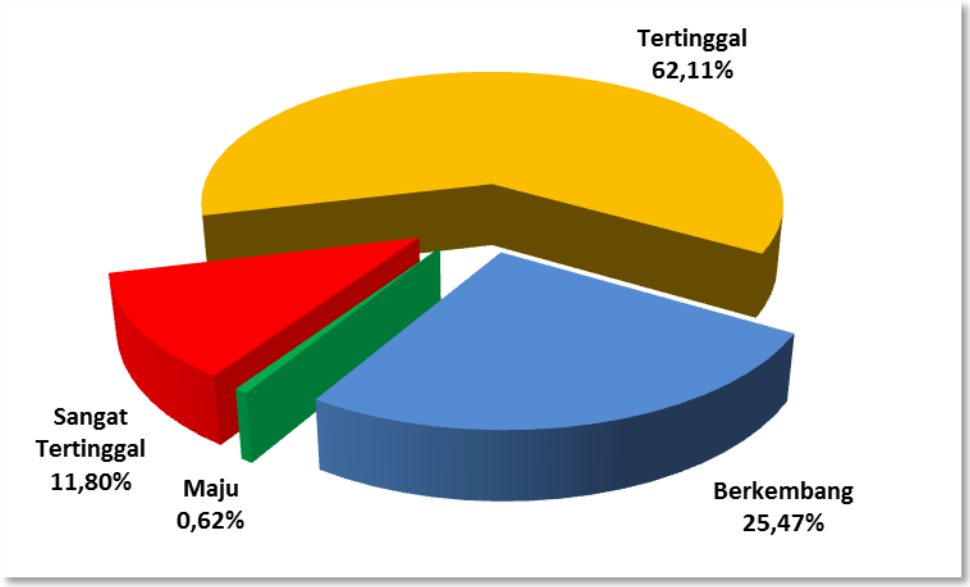

Sumber: IDM Nasional

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 - 2014 dapat dilihat dari beberapa *indikator* yaitu:

Tabel 2.28
Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	PKK Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Posyandu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

m. Ketahanan pangan

Ketersediaan bahan pangan utama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan utamanya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2012 merupakan puncak tertinggi ketersediaan bahan pangan utama dimana pada tahun tersebut ketersediaan mencapai 1.871 kg

per 1.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2014 hanya mencapai 1.670 kg per 1.000 penduduk. Salah satu pemicu meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama ini tidak terlepas dari adanya *regulasi* ketahanan pangan sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Gambar 2. 22
Ketersediaan Bahan Pangan Utama per 1.000 penduduk (kg)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

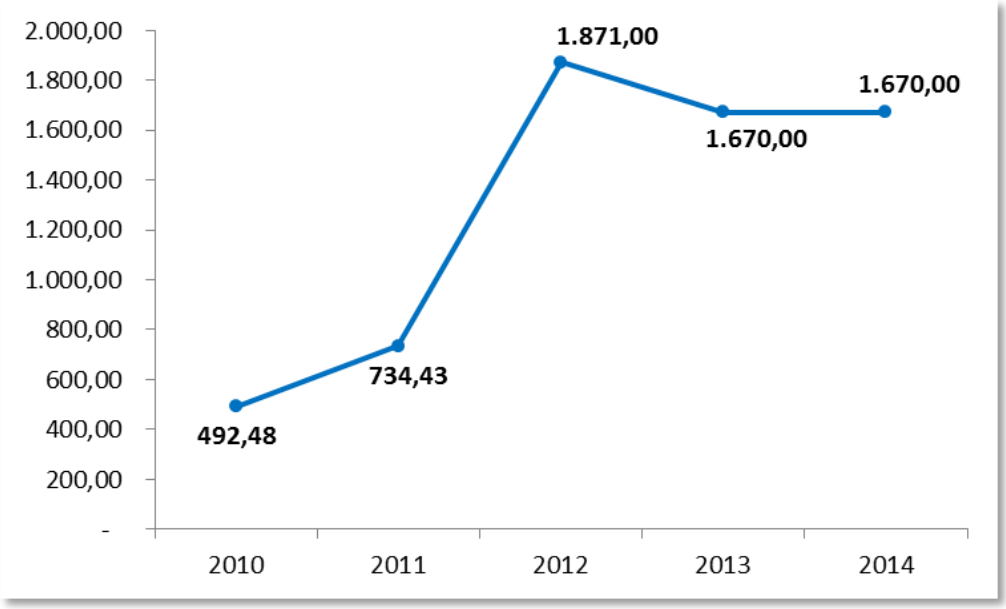

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

n. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu penunjang penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, koleksi pustaka yang tersedia dalam perpustakaan daerah meningkat hingga menjadi 42,34 %. Hal ini juga berimbas pada pengunjung perpustakaan yang juga meningkat menjadi 13,97 % pada tahun 2014.

Tabel 2.29
Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustaaan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	39,89 %	40,90 %	41,93 %	42,13 %	42,34 %
2.	Pengunjung perpustakaan	4,57 %	5,4 %	11,26 %	13,97 %	13,97 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

2.3.2. Fokus layanan urusan pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan yang ada di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berikut fokus layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Pertanian

Meskipun kontribusi beras terhadap nilai Produk *Domestik Regional Bruto* (PDRB) mengalami penurunan, tetapi produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya masih tetap stabil, bahkan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2014, *produktivitas* padi dan bahan pangan utama lainnya meningkat hingga mencapai 4,86 ton per hektar. Sebagian besar produksi tanaman pangan didominasi oleh padi sawah yang mencapai produksi 208.669 ton pada tahun 2014. Sedangkan *produktivitas* terbesar dicapai oleh komoditas ubi kayu yang mencapai 14,12 ton per hektar.

Gambar 2. 23
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton/Ha)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

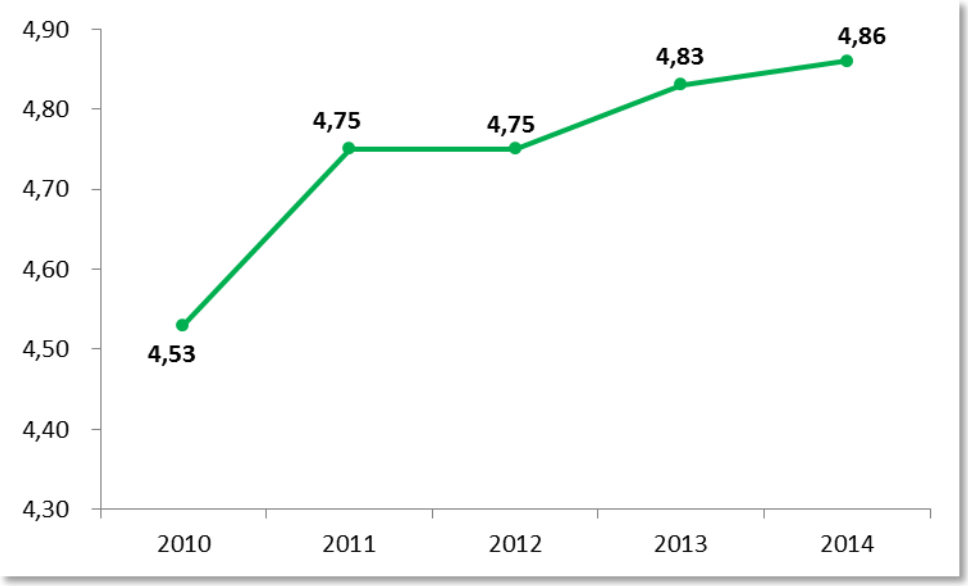

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Gambar 2. 24
Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2014

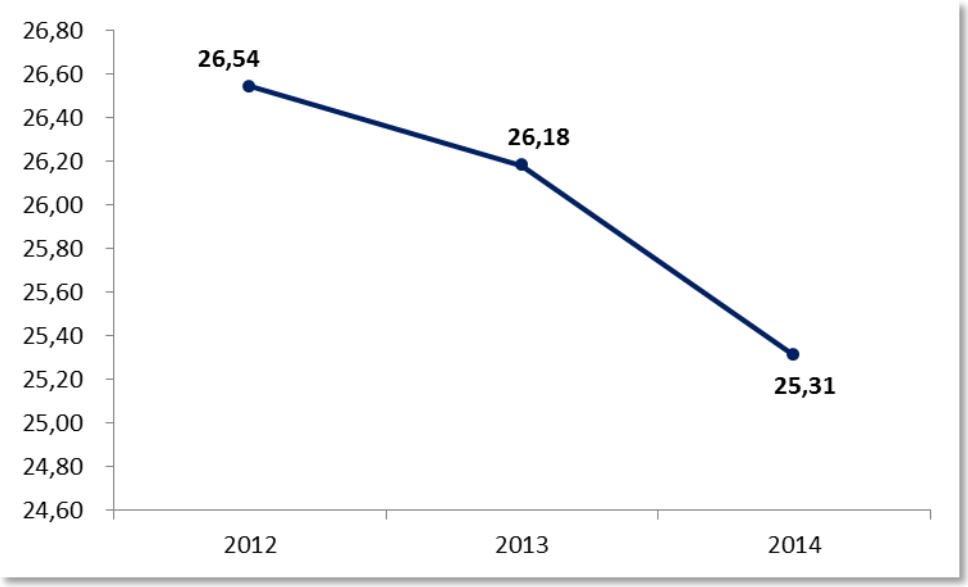

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

Tabel 2.30
Produktivitas Pertanian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013

Jenis Tanaman	Luas tanam (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata produksi per luas tanam (ton/ha)
Padi sawah	41.516	208.669	5,03
Padi gogo	4.173	13.536	3,24
Padi sawah + Gogo	45.689	222.204	4,86
Jagung	483	1.807	3,74
Ubi Kayu	200	2.824	14,12
Ubi Jalar	159	1.720	10,82
Kacang Tanah	561	681	1,21
Kacang Kedelai	1.292	1.648	1,28
Kacang Hijau	213	235	1,10

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka Tahun 2014

b. Kehutanan

Rehabilitasi hutan terus digalakkan pemerintah daerah dimana luas kawasan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi mencapai 37,45 %. Peningkatan ini tentu saja berbanding terbalik dengan luas kawasan hutan yang rusak maupun kritis yang terus menurun hingga mencapai 19,55 % saja.

Tabel 2.31
Persentase Rehabilitas Hutan-Lahan Kritis dan Kerusakan Kawasan Hutan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rehabilitasi hutan & lahan kritis	26,41 %	26,41 %	19,73 %	35,91 %	37,45 %
2.	Kerusakan kawasan hutan	20,78 %	20,78 %	20,56 %	20,37 %	19,55 %

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

c. Energi dan sumberdaya mineral

Penertiban pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus dilakukan demi terciptanya perekonomian yang stabil dan tidak merusak kualitas lingkungan hidup. Salah satu caranya adalah dengan menekan terjadinya penambangan liar dimana pada tahun 2014 diperkirakan telah meningkat hingga mencapai 68,38 %.

Gambar 2. 25
Persentase Pertambangan Tanpa Ijin (Liar)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014 (%)

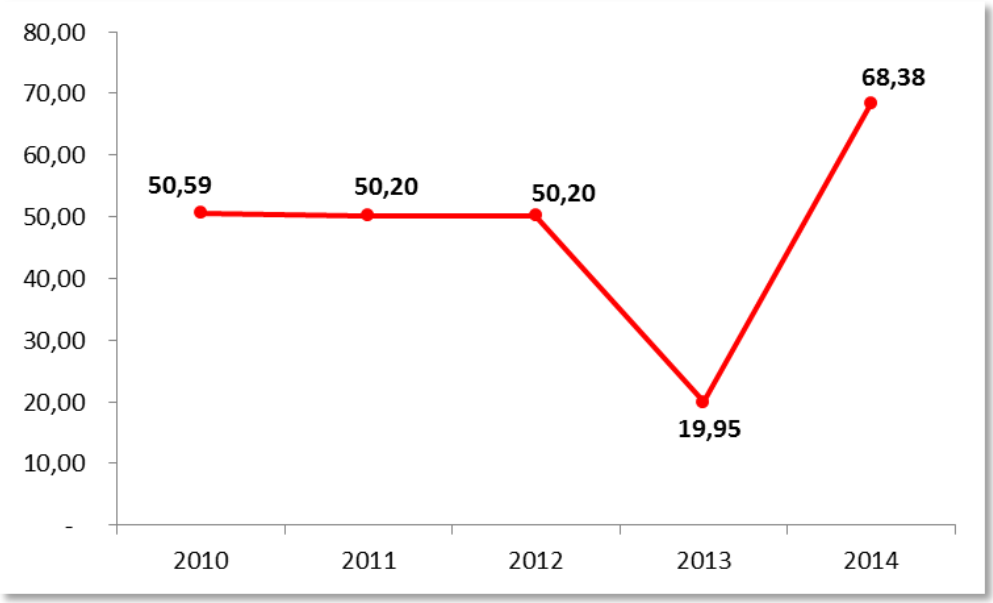

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Kontribusi kategori pertambangan dan penggalian dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga tidak terlalu signifikan dimana pada tahun 2014 hanya sebesar 0,70 % saja andilnya.

Gambar 2. 26
Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2014

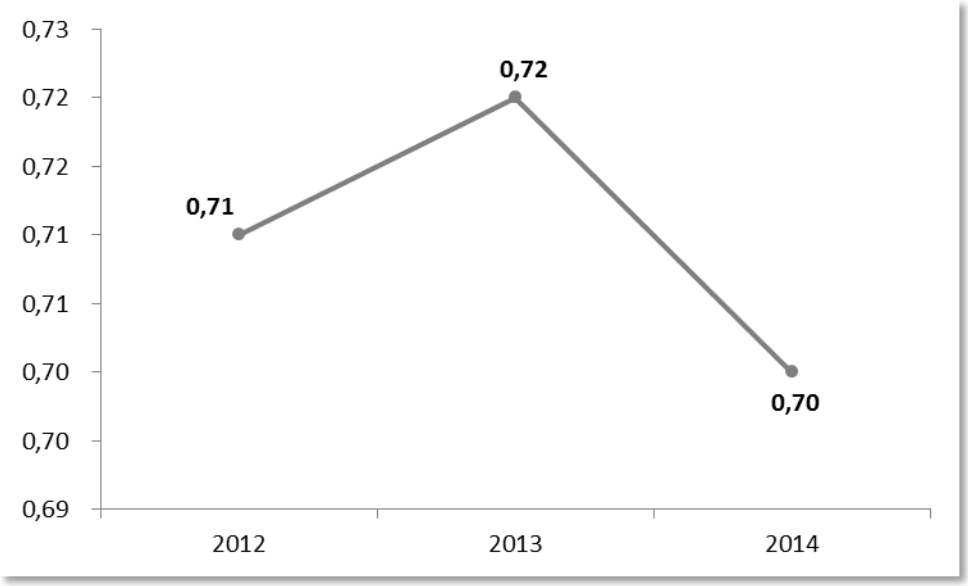

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

d. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus dikelola dengan baik dimana capaian jumlah kunjungan wisatawan mulai meningkat meskipun sempat mengalami *fluktuatif*. Pada tahun 2014, jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 52.209 wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Meskipun angka ini menurun dari tahun sebelumnya, tetapi secara umum peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung menjadikan program dan kegiatan yang telah ada perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas maupun *optimalisasi* pelaksanaannya.

Gambar 2. 27
Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2014

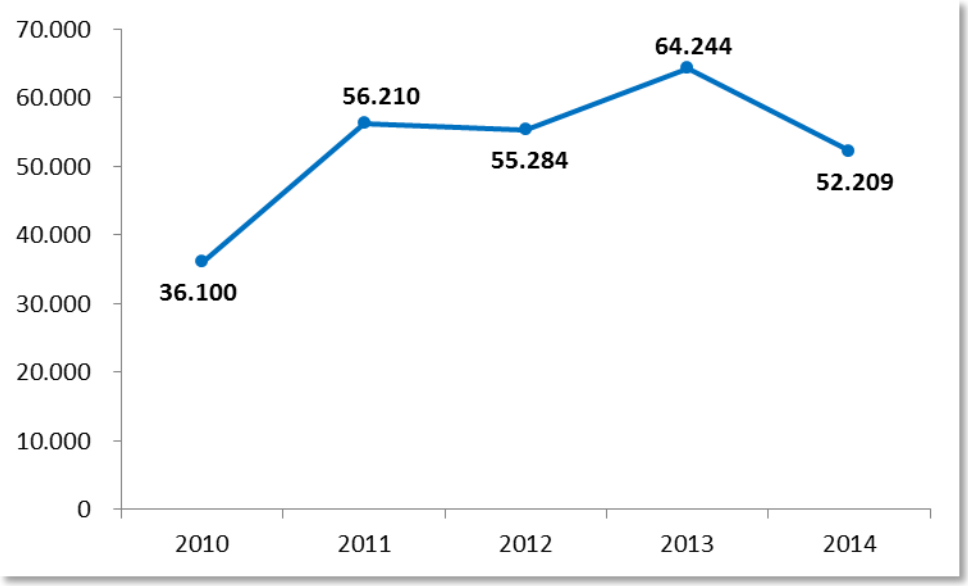

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

e. Kelautan dan perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup tinggi dan terus meningkat hingga mencapai 105,74 % dimana konsumsi ikan masyarakat hanya sebesar 102,65 %.

Gambar 2. 28
Persentase Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan (%)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

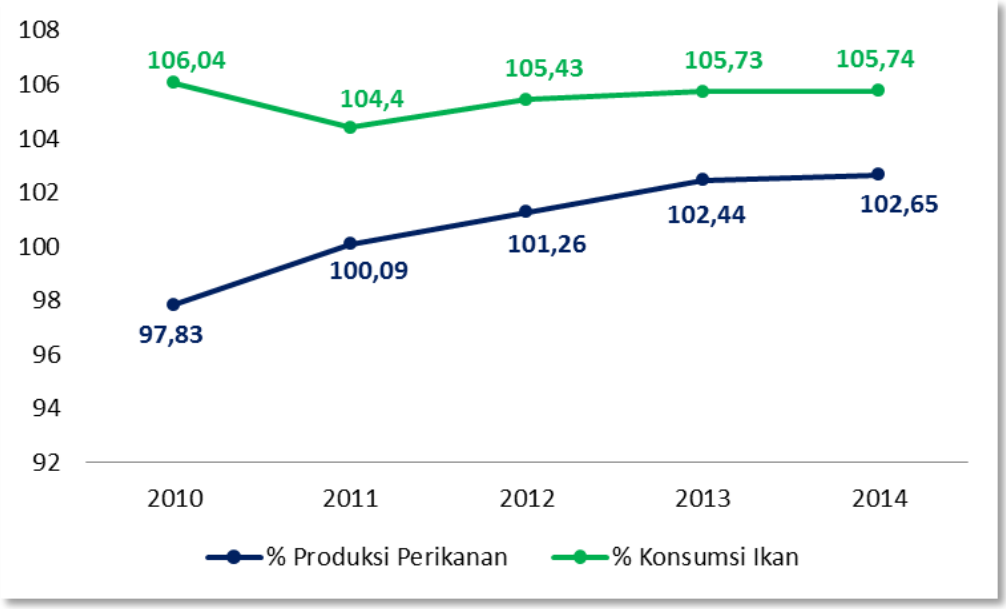

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

f. Perdagangan

Peningkatan *kontribusi* kategori perdagangan besar dan eceran mengindikasikan semakin bergeraknya perekonomian berbasis perdagangan yang notabene cukup banyak usaha mikro kecil yang berperan. Pada tahun 2014, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkatn hingga mencapai 10,32 % dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih berada pada kisaran 9 % saja.

Gambar 2. 29
Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

(Termasuk Reparasi Mobil dan Motor)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2014

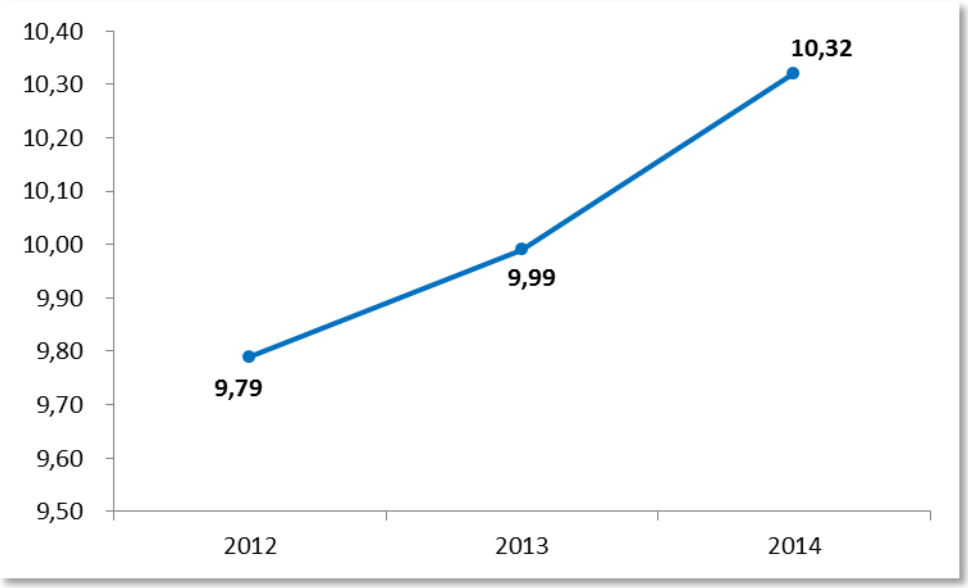

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

g. Perindustrian

Lain halnya dengan kategori industri pengolahan, *kontribusi* kategori industri pengolahan menurun hingga mencapai 15,03 %. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengkaji penyebab menurunnya sektor tersebut termasuk menelaah *sub*sektor industri mana yang memiliki andil dalam penurunan tersebut.

Gambar 2. 30
Kontribusi Kategori Industri Pengolahan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2014

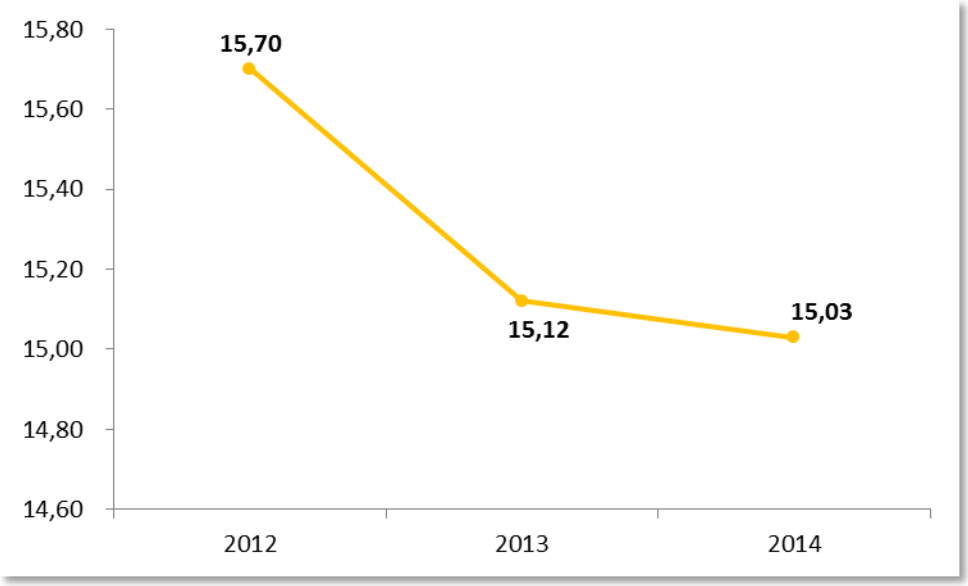

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

Meskipun begitu, secara umum pertumbuhan ekonomi sektoral di kategori industri pengolahan cukup stabil dimana capaian pada tahun 2014 sebesar 5,00 %.

Gambar 2. 31
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2014

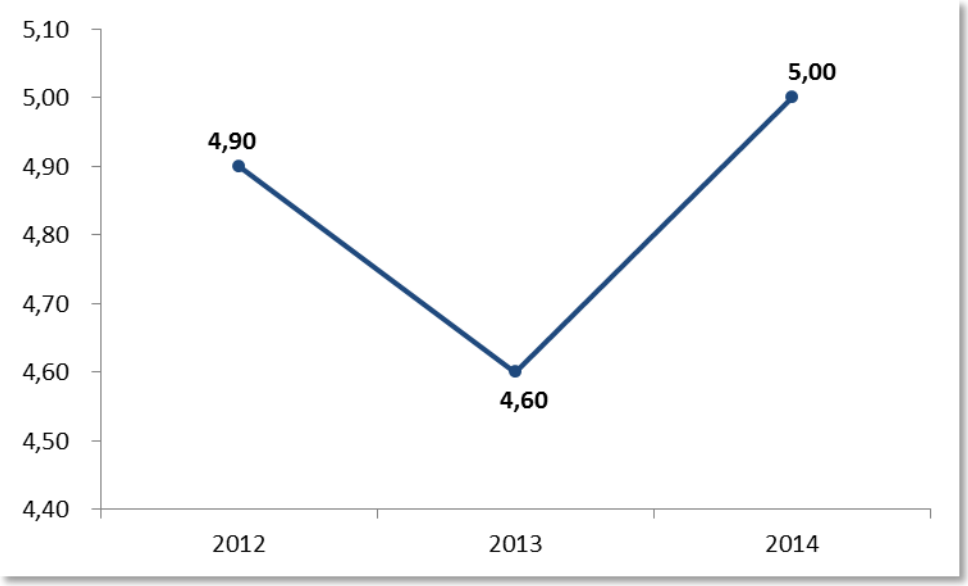

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

Tabel 2.32
Kelompok Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014

No	Kelompok Industri	Unit usaha	Tenaga Kerja	Investasi (juta rupiah)	Nilai Produksi (juta rupiah)
1	Industri makanan, minuman dan tembakau	71	182	253.025	1.915.470
2	Industri tektil, pakaian jadi, dan kulit	40	170	1.289.489	3.284.440
3	Industri kayu, bambu, rotan, rumput,n dan sejenisnya termasuk perabot RT	0	0	0	0
4	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan penerbitan	0	0	0	0
5	Industri kimia dan barang dari bahan kimia, minyak bumi	12	45	200.000	1.155.000
6	Industri barang galian bukan logam	0	0	0	0

No	Kelompok Industri	Unit usaha	Tenaga Kerja	Investasi (juta rupiah)	Nilai Produksi (juta rupiah)
7	Industri barang dari logam, mesin, dan peralatan	49	114	486.373	1.426.720
8	Jasa Industri	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka Tahun 2015

Industri yang cukup mendominasi pergerakan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, dimana pada tahun 2014 memiliki nilai produksi terbesar hingga mencapai 3,28 trilyun rupiah dan disusul oleh industri makanan, minuman dan tembakau yang mencapai nilai produksi 1,92 trilyun rupiah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing *(competitiveness)* merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/*infrastruktur*, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulannya. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setiap tahun terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi per bulan oleh masyarakat hingga mencapai Rp.633.020,- pada tahun 2014. Sebagian besar rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat per bulan masih berkisar pada pengeluaran konsumsi pangan dimana pada tahun 2014 sebesar Rp.427.695,- digunakan ntuk memenuhi kebutuhan pangan dan hanya sebesar 32,44 % saja dari pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non pangan.

Tabel 2.33
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2013

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah	443.070	567.428	586.614	633.020

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013
	Tangga per kapita				
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita	153.219	178.433	187.336	205.325
3	Pengeluaran Konsumsi pangan per kapita	289.851	388.995	399.278	427.695
4	persentasePengeluaran Konsumsi non Pangan	34,58	31,45	31,94	32,44

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu *indikator* untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan yang cukup *signifikan* dimana hal ini menjadi *warning* bagi dinas/instansi terkait untuk segera mengkaji penyebab dan dampak yang terjadi dari *fenomena* penurunan Nilai Tukar Petani ini. Nilai Tukar Petani pada tahun 2014 mencapai 99,77 yang berarti bahwa petani mengalami *defisit*/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi *relatif* lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga *input* biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Gambar 2. 32
Nilai Tukar Petani

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2013

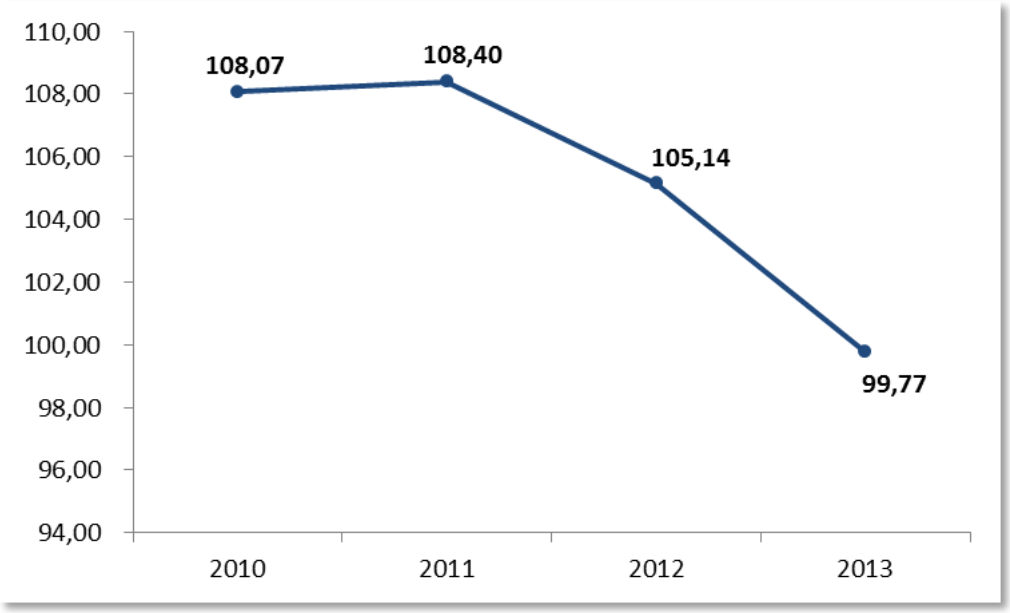

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

c. Kelistrikan dan Air Bersih

Fasilitas air bersih dan listrik merupakan fasilitas utama masyarakat dalam menjalani kehidupan layak. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebanyak 31,70 % masyarakat sudah menggunakan fasilitas air bersih. Angka ini cukup kecil dan harus menjadi perhatian penuh dari pemerintah karena terkait dengan derajat kesehatan masyarakat. Lain halnya dengan fasilitas listrik, sebanyak 91 % masyarakat telah menggunakan listrik di rumahnya.

Tabel 2.34
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Listrik
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih(%)	25,72	27,01	27,01	31,24	31,70
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 91,00 %	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

d. Angka kriminalitas

Salah satu syarat daerah dalam menarik investor masuk adalah keadaan aman dan damai daerah tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jumlah kriminalitas selama tahun 2014 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.35
Angka Kriminalitas

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014

No	Bulan	Jumlah Tindak pidana yang masuk di Kejaksaan Negeri	Penyelesaian	
			Dilimpahkan ke PN	Divonis
1	Januari	15	23	23
2	Februari	26	13	13
3	Maret	27	19	19
4	April	14	20	20
5	Mei	24	28	28
6	Juni	28	15	15
7	Juli	12	39	39
8	Agustus	11	6	6
9	September	10	15	15
10	Oktober	23	13	12
11	November	21	19	17
12	Desember	16	22	14

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka Tahun 2014

e. Perizinan investasi

Perizinan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup optimal dimana lama proses perizinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini berkisar antara 1 s.d. 15 hari.

f. Potensi Pencari Kerja

Secara umum, jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2.989 orang dengan penempatan kerja sebanyak 560 orang. Sebagian pencari kerja memiliki pendidikan hingga SMA/SMK sebesar 2.053 orang dimana hanya ditempatkan 287 orang saja.

Tabel 2.36
Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja (Terdaftar)	Ditempatkan
1	SD	24	23
2	SMP	222	18
3	SMU/SMK	2.053	287
4	DI/DII/DIII	689	232
5	S1	1	0
6	S2/S3	0	0
Jumlah		**2.989**	**560**

Sumber: RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

g. Rasio ketergantungan

Selain dari kualitas pendidikan, *poduktivitas* penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia *non* produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia *non* produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, jumlah usia *produktif* masyarakat mencapai 170.176 orang sedangkan usia *non produktif* mencapai 73.096 orang (usia *non produktif* muda) dan 13.835 orang (usia *non produktif* tua). Sehingga ketika dihitung *rasio* ketergantungan mencapai 51,08 yang berarti dari 100 penduduk usia *produktif* akan menanggung sebanyak 51-52 penduduk usia *non produktif*.

BAB III

CAPAIAN KINERJA DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menggambarkan capaian hasil-hasil pembangunan dan menggambarkan indikator dan target program prioritas yang termuat dalam RPJMD dan RKPD tahun 2015.

3.1. Kelompok Kesejahteraan Sosial

Prestasi dan kinerja kelompok kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut ini :

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan capaian indikator pendidikan mengalami peningkatan mulai dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2012 APK TK/RA sebesar 61,24%, meningkat dibandingkan dengan APK TK/RA tahun 2011 hanya sebesar 45,2%. Kondisi pada tahun 2012 menunjukkan bahwa anak usia 4 – 6 tahun yang sekolah pada TK/RA sebesar 61.24%, sebaliknya terdapat 48,76% anak usia 4 – 6 tahun yang belum atau tidak bersekolah pada jenjang TK/RA. Peningkatan APK TK/RA ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan anak.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. APM SD/MI tahun 2010 sebesar 85,44%, meningkat menjadi 90% tahun 2012. APM SMP/MTs tahun 2010 sebesar 71,12 % tahun 2011 meningkat menjadi 82,31% tahun 2012. APM SMA/MA/SMK tahun 2010 sebesar 59,70%, tahun 2012 meningkat menjadi 61,34%. Capaian APM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan yang berarti.

Khusus untuk APM SMA/MA/SMK masih perlu perhatian karena masih relative rendah (jauh di bawah 100%). Kondisi ini menunjukan masih terdapat anak usia 16 – 18 tahun yang belum bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Rendahnya APM pada jenjang pendidikan menengah salah satunya disebabkan oleh adalah ketidakmampuan orang tua. Alasan lain terutama pada beberapa desa pesisir dan juga di pegunungan anak usia 16 – 18 tahun sudah diharapkan sudah bekerja membantu orang tua sehingga tidak perlu melanjutkan sekolah.

Sementara itu untuk angka putus sekolah SD/MI mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 0,08% meningkat menjadi 0,10% tahun 2012. Angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2010 sebesar 0,45% meningkat menjadi 0,59% tahun 2012. Angka putus sekolah

SMA/MA/SMK juga mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 0,88% meningkat menjadi 0,91% tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sedikit menurun. Meningkatnya angka putus sekolah ini disebabkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi biaya pendidikan sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Angka kelulusan siswa SD/MI pada tahun 2012 mencapai 100%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai 99,80%. Angka Melanjutkan (AM) ke jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 99% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 97,54%, Angka Kelulusan SLTP/MTs sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 98,94%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,90%. Angka Melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2012 sebesar 80,02%. Angka Kelulusan siswa SMA/MA/SMK tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 Angka Lulus SMA/SMK/MA mencapai sebesar 99,93%, sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai 99,89%.

Pendidikan non formal dan informal juga menjadi perhatian pemerintah. Kondisi dilihat dari konsistensi pemerintah untuk menurunkan persentase buta aksara. Tahun 2012 penduduk usia 15-44 tahun yang dapat membaca dan menulis mencapai 99%, kondisi ini terus dipertahankan selama 3 tahun terakhir. Sementara itu dalam hal pendidikan khusus juga menjadi perhatian. Tahun 2012 persentase penduduk difable yang menjadi peserta didik di Sekolah Luar Biasa sebanyak 6,5% di tahun 2012. Pada tahun 2012 angka kelulusan siswa Sekolah Luar Biasa mencapai 99%.

Mutu pendidik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kualifikasi guru adalah lulus S1 atau D4. Guru yang memenuhi kualifikasi tersebut dikategorikan layak mengajar. Guru layak mengajar pada Jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 58%. Guru layak mengajar pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 85,70%. Guru SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi sebesar 94,59%. Kualifikasi guru pada jenjang pendidikan SD/MI termasuk kategori rendah, karena hampir separoh guru SD/MI tidak memenuhi kualifikasi.

Sekolah yang memiliki tata kelola yang baik dan pencitraan yang baik adalah sekolah yang telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah secara konsisten. Managemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada semua jenjang pendidikan tahun 2012 terlihat bahwa lembaga PAUD yang memiliki tata kelola dan citra baik sebesar 90%, SD/MI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah secara konsisten dan berkualitas sebesar 25%, jenjang SLPT /MTs yang menerapkan MBS sebesar 100% dan SMA/MA/SMK yang menerapkan MBS sebesar 90%.

Jika dilihat dari capaian pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang semuanya berjumlah 26 indikator, maka yang tercapai pada tahun 2015 baru 15 indikator atau 57,69%, dan yang tidak tercapai 6 indikator atau 23,08% dan yang tidak ada data sebesar 5 indikator atau 19,23%. Anggaran pendidikan merupakan yang terbesar dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai

Tengah sudah semestinya indicator capaiannya harus baik. Capaian indicator yang rendah ini sangat perlu mendapat perhatian dari SKPD yang bersangkutan agar nanti pada akhir RPJMD tahun 2015 tidak ditemukan lagi.(lihat lampiran evaluasi RPJMD misi 1).

2. Kesehatan

Capaian indikator pembangunan kesehatan pada tahun 2012 menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian indikator urusan kesehatan sebagaimana indicator dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Indikator Utama Pembangunan Kesehatan

Indikator utama pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Capaian AKI pada tahun 2011 sebesar 164 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini diatas capaian AKI Jawa Tengah pada tahun 2011 yaitu 116 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan AKB Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2011 sebesar 11,66 per 1.000 kelahiran hidup dan AKABA sebesar 12,95 per 1.000 kelahiran hidup. Angka AKB dan AKABA termasuk kategori sedang dan perlu mendapatkan perhatian. Pelayanan kesehatan ibu dan anak harus ditingkatkan dan diupayakan merata sampai ke pelosok desa.

b. Pelayanan Kesehatan Dasar

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami peningkatan. Tahun 2011 cakupan kunjungan K4 sebesar 95,60 %, meningkat menjadi 94,64 di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2012 maka capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 96,3%. Kondisi ini telah mencapai target dalam SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes 741 tahun 2008 (tahun 2015 sebesar 90%). Cakupan pelayanan anak balita tahun 2011 sebesar 81,92%, meningkat menjadi 100% pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan kineja pelayanan tenaga kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2012 cakupan *neonates* komplikasi yang ditangani sebesar 100%. cakupan neonatus komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Cakupan *neonates* komplikasi yang ditangani di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencapai target dalam SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes 741 tahun 2008 (tahun 2015 sebesar 80%). Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diukur melalui 18 indikator pelayanan kesehatan dasar, secara umum rata-rata capaian pelayanan kesehatan dasar telah melampaui target RPJMD 2012. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

c. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan. Tahun 2010 cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 95,1% tahun 2012 menjadi 52,23%. Persentase capaian kinerja tahun 2012 dibandingkan dengan target knerja tahun 2012 hanya dapat mencapai 61,56%.

d. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

Pelaksanaan penyelidikan epedemiologi dan penanggulangan KLB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diukur melali indikator cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, telah mencapai target yang ditentukan dalam RPJMD tahun 2015.

e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diukur melalui indikator cakupan desa siaga aktif. Capaian kinerja indikator ini telah mencapai target yang ditentukan dalam RPJMD tahun 2015.

Secara keseluruhan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2015 ditetapkan 34 indikator, dan baru 11 indikator atau 32,35% yang tercapai, sebanyak 20 indikator 58,82% belum tercapai dan belum ada data pencapaiannya sebesar 3 indikator (Lihat lampiran evaluasi RPJMD Misi 1).

3. Keluarga Berencana

Angka *unmet need* Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukan penurunan tahun 2012 angka *unmetneed* Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 11,65% lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya 11,67%. Untuk peserta KB baru juga mengalami penurunan tahun 2011 sebesar 100,62% tahun 2012 menurun menjadi 95,91%. Persentase KB aktif mengalami peningkatan tahun 2011 sebesar 78,74% tahun 2012 meningkat menjadi 98,92%. Sementara itu untuk persentase KB laki-laki masih rendah tahun 2012 sebesar 1,15%. Menurunya angka kegagalan penggunaan alat kontrasepsi tahun 2012 mencapai 100%.

Dalam rangka pelayanan KB menunjukan bahwa ratio petugas penyuluh KB disetiap desa/kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 3,45. Artinya bahwa 1 orang PLKB harus bertanggung jawab terhadap 3 desa/kelurahan. Jangkauan pelayanan PLKB yang cukup luas, menyebabkan belum optimalnya pelayanan petugas terutama pada wilayah-wilayah yang sulit di akses. Sementara itu untuk cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meningkat dari 26,83% tahun 2010 menjadi 28% tahun 2012.

4. Sosial

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilaksanakan, berbagai program baik di tingkat nasional maupun kabupaten sudah dilaksanakan. Upaya tersebut membuahkan hasil terbukti jumlah penduduk miskin dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menurun walaupun tidak drastis. Tahun 2007 jumlah penduduk miskin di pedesaan Hulu Sungai Tengah sebanyak 230.965 jiwa, tahun 2011 menurun menjadi 216.099 jiwa. Sementara itu untuk wilayah perkotaan jumlah penduduk miskin tahun 2007 sebanyak 6.660 jiwa, tahun 2011 menurun menjadi 6.058 jiwa. Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas masyarakat miskin. Ini ditunjukan dari jumlah fakir miskin yang memiliki ketrampilan tahun 2012 sebanyak 80 orang, jumlah keluarga miskin yang memiliki usaha tahun 2012 sebanyak 80 orang, PMKS yang memiliki ketrampilan sebanyak 75 orang. Meskipun jumlah masyarakat miskin yang meningkat kapasitasnya tidak terlalu besar namun memberikan dampak yang positif bagi pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan menunjukan perkembangan yang baik. Tahun 2012 jumlah kelompok perempuan dan kelompok PUG dan perlindungan anak terlatih mencapai lebih dari 100% atau melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam rangka menyediakan baseline data perencanaan juga telah disusun baseline data profil anak. Data base profil anak ini digunakan untuk mengisi indikator program, kegiatan dan permasalahan anak, dengan memiliki *data base* profil anak data capaian indikator perlindungan anak mudah ditemukan dan perkembangannya akan terus dapat dipantau. Upaya pencapaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Kabupaten/Kota Layak anak juga telah dilakukan. Upaya tersebut antara lain melaksanakan pelatihan konseling korban bagi tim PPT PKPA kecamatan dan Kabupaten, pelatihan manajemen kasus berbasis gender dan anak, fasilitasi penyediaan shelter bagi korban kekerasan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah PT PPO. Dalam rangka untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selaras dengan amanat Standart Pelayanan Minimal bidang Penanganan Terpadu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memiliki *shelter* bagi korban kekerasan. Selain itu Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga telah melakukan pencatatan terhadap pelaporan korban kekerasan tahun 2012. Pencatatan korban kekerasan tersebut telah mencapai 100%. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu tahun 2012 mencapai 100%. Sementara untuk cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2012 juga telah mencapai 100%.

Secara keseluruhan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak indicator capaian keberhasilan yang ditetapkan RPJM pada tahun 2015 sebanyak 20 indikator dan yang baru tercapai baru 11 indikator atau 55% dan yang belum tercapai 7 indikator atau 35% dan ayang tidak ada data pencapaiannya sebanyak 2 indikator. (Lihat Lampiran evaluasi RPJMD Misi IV).

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diukur melalui 4 indikator yaitu 1) tingkat kemampuan baik secara perorangan maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, 2) tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat, 3) tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan 4) tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam peneyelenggaraaan pemerintahan di desa/kelurahan. Capaian kinerja indikator tingkat kemampuan baik secara perorangan maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan menunjukan terjadi peningkatan partisipasi dari 25% tahun 2010 menjadi 35% tahun 2012. Sedangkan tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat dari 39% meningkat menjadi 50% tahun 2012. Indikator

tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan meningkat dari 25% tahun 2010 menjadi 35% tahun 2012. Sedangkan indikator tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraaan pemerintahan di desa/kelurahan juga meningkat dari 33% tahun 2010 menjadi 40% tahun 2012. Target kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ditetapkan sesuai RPJM pada tahun 2015 sebanyak 5 indikator dan yang telah dapat dicapai sebanyak 4 indikator atau 80% dan yang belum tercapai 1 indikator.(lihat lampiran evaluasi RPJMD Misi IV).

7. Kebudayaan

Tingkat perkembangan nilai budaya dalam masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan. Perkembangan nilai budaya ini belum selaras dengan upaya pelestarian budaya dan kesenian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tahun 2012 upaya pelestarian yang dilakukan sebesar 40 % masih belum dapat mencapai target RPJMD sebesar 45%. Total Capaian peningkatan upaya pelestarian budaya dan kesenian daerah baru mencapai 88,89%. Tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman budaya lokal ini juga belum dapat mencapai target tahun 2012 capaian kinerja intensitas keragaman budaya lokal mencapai 40% Sementara target RPJMD tahun 2012 sebesar 45%. Untuk capaian indikator yang ditetapkan RPJMD 2015 ini dapat dilihat pada lampiran evaluasi RPMJD Misi IV.

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat. Perkembangan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat, kondisi ini juga didukung oleh kemudahan pelayanan KTP. Tahun 2010 kepemilikan KTP sebesar 97,89% meningkat menjadi 98,81% tahun 2012. Kepemilikan KK tahun 2010 sebesar 99,15% meningkat menjadi 99,83% tahun 2012. Sementara itu untuk kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga mengalami peningkatan. Tahun 2010 kepemilikan akte kelahiran sebesar 66,79%, meningkat menjadi 71,88%. Peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil ini menujukan

bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, meskipun tidak semua indikator dapat mencapai target RPJMD tahun 2015.Jumlah indicator keberhasilan pada tahun 2015 ini sebanyak 5 indikator, tetapi sayangnya tidak ada data yang tersedia untuk menjelaskan tingkat keberhasilannya. (Lihat Lampiran evaluasi RPJMD Misi IV).

9. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 sebesar 473.515 orang menurun menjadi 472.944 orang. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2010 sebesar 26.395 orang, tahun 2012 turun menjadi sebesar 26.290 orang. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja diukur melalui beberapa indikator. Untuk indikator ketersediaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja menunjukan peningkatan dari 8 pelatihan tahun 2010 menjadi 14 pelatihan, capaian kinerja indicator ini tercapai 175%. Untuk indikator pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja menunjukan peningkatan tahun 2010 sebanyak 296 pencari kerja telah dilatih, tahun 2012 jumlah pencari kerja yang dilatih meningkat menjadi 563 orang. Sementara itu untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat, pemerintah telah menyusun informasi bursa kerja dan penyebaran informasi tenaga kerja per bulan yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi bursa kerja dan penebaran informasi dilakukan melalui beberapa media. Media tersebut antara lain website Kabupaten Hulu Sungai Tengah, papan informasi bursa kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui radio dan penyelenggaraan bursa kerja.

Jumlah indikator keberhasilan tenaga kerja, transmigrasi dan sosial yang ditargetkan pada tahun 2015 ini sebanyak 18 indikator, yang tercapai baru 10 indikator atau 55,56% dan yang belum berhasil sebanyak 6 indikator atau 33,33% dan belum ada data 2 indikator (lihat lampiran evaluasi RPJMD misi IV).

10. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga memiliki peran strategis dalam mendidik generasi muda menjadi orang yang kreatif dan inovatif yang memiliki jiwa sportif. Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kepemudaan dan ketengakerjaan pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan. Berbagai event dan berbagai aktivitas di bidang olahraga dan kepemudaan telah diselenggarakan. Berbagai kegiatan tersebut telah berhasil meningkatkan daya kreativitas dan sportivitas pemuda dan menyalurkan kegiatan pemuda ke kegiatan yang positif. Prestasi cabang yang diraih baik regional, nasional maupun internasional mengalami peningkatan, tahun 2010 sebesar 14 cabang meningkat menjadi 20 cabang tahun 2012. Organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan meningkat tahun 2012 sebesar 70% tahun 2012 meningkat menjadi 80%. Pengurus organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program

meningkat tahun 2010 sebesar 70% tahun 2012 meningkat menjadi 80%. Indikator keberhasilan yang ditetapkan pada tahun 2015 ini dapat dilihat pada lampiran evaluasi RPJMD misi IV.

11. Transmigrasi

Program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berusaha mencari penghidupan yang lebih layak di daerah lain. Pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi perbatasan di 15 lokasi, peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan tahun 2012 sebanyak 12 naskah, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi tahun 2012 disediakan bagi 28 kepala keluarga, pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM tahun 2012 dilakukan di 2 lokasi. Selain transmigrasi antar wilayah juga dilakukan program transmigrasi lokal. Program transmigrasi lokal diawali dengan penyuluhan transmigrasi lokal tahun 2012 ditargetkan bagi 50 orang dan tercapai lebih dari 100%. Demikian juga untuk pelatihan transmigrasi lokal tahun 2012 tercapai lebih dari 100%.

Capaian kelompok kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari capaian kinerja urusan 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) keluarga berencana, 4) sosial, 5) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 6) pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, 7) kebudayaan, 8) kependudukan dan catatan sipil, 9) ketenagakerjaan, 10) pemuda dan olah raga,dan 11) ketransmigrasian. Capaian keberhasilan indikator ini dapat dilihat pada lampiran evalusi RPJMD pada Misi IV.

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelompok Kesejahteraan Sosial

No	Urusan	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Sesuai RKPD	% Capaian
1	Pendidikan	25	18	5	2	72%
2	Kesehatan	27	19	8	0	70%
3	RSUD Damanhuri	9	6	1	2	67%
4	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	18	2	0	90%
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	4	1	0	80%
6	Tenaga Kerja, Transimigrasi dan Sosial	6	5	1	0	83%
7	Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata	10	8	2	0	80%
8	Kependudukan dan Catatan Sipil	5	3	2	0	60%
	Jumlah	**107**	**81**	**22**	**4**	
	% Total		**76%**	**21%**	**4%**	

Sumber: Lihat lampiran matrik evaluasi RPJMD Kab. HST

3.2. Kelompok Pelayanan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Keamanan dan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan pada tahun 2010 -2011 sebesar 100%, tahun 2012 menurun menjadi 67,83%. Untuk peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dilakukan pelatihan dan sarasehan tentang wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Tahun 2012 telah dilatih 300 orang masyarakat. Sementara itu selama periode 3 tahun terakhir dilakukan peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pelatihan.

Capaian target RPJMD pada indikator ini tercapai lebih dari 100%. Sementara itu untuk upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan mitigasi bencana. Tahun 2010 sebanyak 40 orang terlatih, tahun 2012 meningkat menjadi 65 orang. Capaian kinerja untuk tahun 2015 sesuai yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 8 indikator yang tercapai baru 3 indikator atau 37,5% (lihat lampiran evaluasi RPJMD Misi IV).

2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilaksanakan secara optimal dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk melaksanakan berbagai kegiatan.

Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah menetapkan target capaian SPM untuk sebanyak 14 SPM. Standart Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2012 telah menetapkan target capaian indikator 14 SPM. Kondisi ini telah melampaui target RPJMD tahun 2012 yang menetapkan 3 SPM.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur jumlah PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan I dan II, golongan tahun 2012 sebesar 100%, dan yang mengikuti diklat kepemimpinan sebesar 100%. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan disiplin aparatur seluruh indikator dalam RPJMD telah dapat mencapai target RPJMD tahun 2012 sebesar 100%. Peningkatan kesejahteraan pegawai diukur melalui indikator pemberian santunan PTT Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2012 tercapai lebih dari 100%. Dalam upaya meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyusun sejumlah MoU dengan pemerintah daerah sekitar dan dengan dunia usaha, meskipun demikian capaian kinerja ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Jumlah MoU dengan pemerintah daerah sekitar tahun 2012 hanya tercapai 41,67% dari target yang ditetapkan, sementara untuk MoU dengan swasta dan PT hanya tercapai 20% dari target yang ditetapkan tahun 2012.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2012 telah menjukkan adanya peningkatan. Pengelolaan keuangan daerah menuju pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus diupayakan dan pada tahun 2015 predikat WTP telah tercapai. Pengelolaan keuangan daerah semakin transpran dan akuntabel. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada

tahun 2012 pendapatan asli daerah meningkat mencapai 30% dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk target capaian kinerja pada tahun 2015 ini dapat pada lampiran evaluasi RPJMD misi IV).

3. Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2012 telah menunjukkan kinerja yang baik. Perencanaan sektoral dan perencanaan dalam rangka pemenuhan target nasional dan global juga telah dilaksanakan. Pada tahun 2012 telah disusun 18 dokumen statistik, dan 5 kajian penelitian dan perencanaan. Salah satu dokumen perencanaan sektoral yang telah disusun sebagai amanat undang-undang dan Permendagri adalah Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Selain dokumen statistic dan penelitian, tahun 2012 juga telah disusun dokumen perencanaan bidang sosial budaya dan dokumen perencanaan prasarana sarana dan sumberdaya serta dokumen rawan bencana.

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan perencanaan telah dilakukan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMDes di semua desa. Penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa diharapkan akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa agar lebih terarah dalam melaksanakan pembangunan desa. Semua proses penyusunan perencanaan tahunan seperti RKPD, KUA, PPAS dan RPJMDes telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku, diantaranya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat. Hasil capaian kinerja pada tahun 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD dapat dilihat pada lampiran matrik evaluasi RPJM Misi IV.

4. Statistik

Data statistik merupakan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data statistik yang akurat yang dihimpun dari berbagai sumber, utamanya SKPD terus diupayakan. Data yang akurat dan obyektif akan sangat membentu dalam pengambilan kebijakan. Pada tahun 2014 tingkat ketersediaan data statistik mencapai 100%. Dokumen statistik yang disusun diantaranya Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan beberapa dokumen penelitian yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Kearsipan

Keberhasilan penyelenggaraaan urusan kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari capaian beberapa indikator pembangunan di bidang kearsipan meliputi : 1) persentase penyelamatan dan pelestarian arsip dalam bentuk tekstual, 2) akuisisi arsip rutin dan berkala, 3) kegiatan diklat/bintek kearsipan bagi SKPD, kecamatan dan desa/kelurahan, 4) Arsiparis, 5) SDM yang mengikuti kegiatan diklat/ bintek kearsipan. Hasil evaluasi Penyelamatan dan pelestarian arsip dalam bentuk tekstual mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 35%, tahun 2012 meningkat menjadi 37%. Akuisisi arsip rutin dan berkala juga mengalami peningkatan dari

20% menjadi 30% tahun 2012. Untuk menunjang kinerja kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka ditingkatkan jumlah SDM Arsiparis menjadi 3 orang di tahun 2012. Capaian kinerja pada tahun 2015 dapat dilihat dari lampiran hasil evaluasi RPJMD.

6. Keperpustakaan

Minat baca masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah nampaknya masih rendah. Kondisi ini terlihat dari rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan. Tahun 2010 jumlah pengunjung perpustakaan hanya sebesar 18%, meningkat sebesar 1% di tahun 2012 menjadi 19%. Meskipun mengalami peningkatan jumlah pengujung perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih jauh dari target yang di tetapkan dalam RPJMD tahun 2012 yaitu sebesar 26%. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berupaya untuk meningkatkan budaya membaca dalam masyarakat melalui peningkatan jumlah perpustakaan baik perpustakaan masyarakat maupun sekolah.

Capaian kelompok Pelayanan Umum secara keseluruhan tergambarkan dari capaian kinerja urusan 1) kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2) Otonomi Daerah, 3) Perencanaan Pembangunan, 4) Statistik, 5) Kearsipan, dan 6) Keperpustakaan. Capaian kinerja pada tahun 2015 dimana ditargetkan 2 indikator dan semuanya dapat tercapai. (lihat lampiran Misi V).

Tabel 3.2.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelompok Pelayanan Umum

No	Urusan	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Sesuai RKPD	% Capaian
1	Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas	8	8	0	0	100%
2	Satpol PP	8	8	0	0	100%
3	Perencanaan Pembangunan Daerah	13	8	5	0	62%
4	Sekretariat Daerah	13	9	4	0	69%
5	Sekretariat DPRD	1	1	0	0	100%
6	Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	8	7	1	0	88%
7	Inspektorat	3	0	3	0	0%

8	Perijinan, Pelayanan Terpadu dan UPT	**3**	**2**	**1**	**0**	**67%**
9	Keperpustakaan dan Arsip Daerah	**4**	**4**		**0**	**100%**
10	Kepegawaian Daerah	**6**	**5**	**1**	**0**	**83%**
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	**5**	**4**	**1**	**0**	**80%**
	Jumlah	**72**	**56**	**16**	**0**	
	% Total		**78%**	**22%**	**0%**	

Sumber: Lihat Lampiran Matrik evaluasi RPJMD Kab. HST

3.3. Kelompok Daya Saing Daerah

1. Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi. Infrastruktur baik jalan, jembatan, irigasi, drainase, sampai pada sanitasi seharusnya tersedia memadai dan dalam kondisi yang baik. Perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukan kecenderungan menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2012 peningkatan jalan aspal sebesar 3,10% lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,40%, perbaikan jalan sebesar 4,97 % lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,01%, peningkatan ruas jalan kondisi baik sebesar 32% lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 49,33%, dan peningkatan kondisi jembatan baik sebesar 71,27% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67,40%. Rata-rata persentase capaian kinerja tahun 2012 untuk peningkatan jalan dan jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 56,40%.

Dalam bidang perkotaan dan perdesaan telah dilakukan penetapan kawasan strategis perkotaan. Tahun 2012 telah dilakukan penetapan lokasi kawasan strategis di 20 lokasi, kondisi ini telah melampaui target RPJMD tahun 2012 yang ditetapkan hanya 2 lokasi, sementara untuk kawasan pusat pertumbuhan juga telah ditetapkan di 20 lokasi. Secara keseluruhan indikator kinerja perkotaan dan perdesaan telah melampaui target yang ditetapkan.

Dalam bidang konservasi sumberdaya air dilakukan konservasi rehabilitasi kawasan lindung di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tahun 2012 dilakukan di 18 lokasi. Sementara itu untuk efisiensi penggunaan jaringan irigasi di musim kemarau telah mengalami peningkatan mencapai 50% di tahun 2012, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk revitalisasi jaringan irigasi juga mengalami peningkatan tahun 2012 mencapai 59%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada bidang pengelolaan air limbah tahun 2012 telah dibangun 6 lokasi prasarana air limbah sistem setempat/on site dan 6 lokasi pembangunan prasarana air limbah sistem terpusat. Sementara itu pada bidang air minum peningkatan kapasitas pelayanan PDAM di kawasan perkotaan meningkat melampaui target RPJMD. Untuk penanganan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedikit mengalami penurunan. Tahun 2010 persentase sampah terangkut sebesar 85%, tahun 2012 menurun menjadi 83%.

2. Perumahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia selain kebutuhan sandang dan pangan. Keadaan/kondisi tempat tinggal di suatu wilayah dapat dijadikan salah satu gambaran keberhasilan pembangunan dalam hal seberapa jauh program yang berkenaan dengan tempat tinggal dapat menjangkau lapisan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2011 sekitar 88,8 persen rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempati rumah dengan status milik sendiri, 8,26 persen menempati milik orang tua atau saudara sedang sisanya 2,94 persen menempati rumah dengan status kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. Jika dilihat dari jenis lantai terluas rumah yang ditempati sekitar 34,19 persen masih berupa tanah. Angka ini jauh diatas angka Jawa Tengah yaitu berkisar 21,28 persen.

Capaian kinerja urusan perumahan diukur melalui indikator 1) terealisasinya bantuan peningkatan kualitas permukiman (Paket), 2) tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah 25 % dari kegiatan program, 3) tersusunnya peraturan tentang bangunan dan gedung, 4) tersusunnya Program peningkatan kualitas permukiman. Seluruh target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012 telah dapat dicapai 100%. Capaian kinerja pada tahun 2015 untuk pekerjaan umum dan pengembangan wilayah ditetapkan 16 indikator dan yang baru tercapai sebanyak 9 indikator atau 56,25% dan sisanya belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 43,75% (lihat lampiran matrik evaluasi RPJMD).

3. Penataan Ruang

Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2011. Untuk mendukung kegiatan penataan ruang di setiap kecamatan telah menyusun dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota. Kondisi sampai dengan tahun 2012 telah disusun sebanyak 11 dokumen di Kecamatan. Selain dokumen tersebut juga disusun dokumen Rencana Tata Ruang Kota di Kawasan Strategis. Untuk 2015 kinerja keberhasilannya dapat dilihat pada lampiran matrik evaluasi RPJM.

4. Pertanahan

Pada tahun 2012 jumlah tanah yang disertifikatkan mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 6 %, tahun 2012 meningkat mencapai 10%. Meningkatnya persentase capaian ini disebabkan semakin meningkatnya kemudahan dalam administrasi pertanahan. Sejalan dengan

hal tersebut tingkat kualitas pelayanan administrasi juga meningkat tahun 2012 mencapai 88%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 84%. Sementara itu penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya juga mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukan bahwa masyarakat semakin sadar dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Perkotaan.

5. Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki fasilitas terminal, meliputi satu buah Kelas B berlokasi di Kecamatan Labuan Amas Utara dan 1 buah kelas C. Capaian kinerja indikator terminal kelas C telah dapat mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas, maka diperlukan ramburambu dan marka jalan serta fasilitas lalu lintas ditempatkan pada tempat yang strategis. Meskipun telah tersedia rambu-rambu lalu lintas, namun itu kondisi ini belum dapat mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas. Tahun 2010 terjadi 385 kasus kecelakaan lalu lintas, tahun 2012 kasus kecelakaan lalu lintas semakin meningkat tajam menjadi 618 kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan belum dapat mencapai target RPJMD tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 214 kasus. Melihat kondisi ini perlu adanya upaya peningkatan kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

6. Komunikasi dan Informatika

Pelayanan di bidang jasa pos di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilayani oleh 12 Kantor Pos, yang terdiri dari 1 (satu) kantor Pos Induk yang berlokasi di tingkat Kabupaten dan 11 Kantor Pos Pembantu di setiap Kecamatan, kecuali Kecamatan Kota Hulu Sungai Tengah. Pelayanan kantor pos meliputi jasa pengiriman surat, paket dan tempat pembayaran berbagai tagihan. Tahun 2012 desa yang mendapat pelayanan akses telekomunikasi mencapai 63,63%. Kondisi ini melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 50%. Penyediaan jaringan internet (ISP) yang dilaksanakan oleh PT Telkom Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan tahun 2010 sebanyak 12 buah. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan akses penggunaan fasilitas internet. Tahun 2012 Perdesaan yang mendapat pelayanan akses internet mencapai 46,15 %, masih dibawah target RPJMD tahun 2012 sebesar 50%. Meskipun demikian kondisi ini menunjukan adanya kemajuan pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Capaian kinerja pada tahun 2015 dimana perhubungan, komunikasi dan informatika ditetapkan 9 indikator dan yang baru tercapai sebanyak 4 indikator atau 44,44% dan yang belum tercapai sebanyak 5 indikator atau 55,56% (lihat lampiran matrik evaluasi RPJMD).

7. Pariwisata

Kondisi pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan, tahun 2012 rata-rata lama tinggal wisatawan di Hulu Sungai Tengah selama 2 hari, hal ini didukung adanya pengembangan tujuan wisata baru. Tahun 2012 terdapat 2 lokasi wisata baru tujuan wisata baik lokal maupun nasional. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat sebesar 12%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai 5%. Meningkatnya kunjungan wisatawan ini berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah dari kunjungan wisata. Tahun 2012 pendapatan daerah pada sektor ini meningkat menajdi 64% jauh melampaui target RPJMD yang ditargetkan hanya 5%. Ini merupakan salah satu prestasi kinerja urusan pariwisata.

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilaksanakan event pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyelenggarakan berbagai event yang memungkinkan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penyelenggaraan event pariwisata belum secara optimal menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jumlah kunjungan wisata masih rendah dan di bawah target RPJMD tahun 2012. Untuk capaian 2015 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran matrik evaluasi RPJMD

8. Koperasi UMKM

Koperasi yang berbadan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan. Tahun 2012 jumlah koperasi berbadan hukum sebanyak 507 koperasi dari 533 koperasi yang ada. Untuk UMKM yang mempunyai SIUP, TDP dan lainnya sebanyak 67 UMKM atau 100% telah mencapai target RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2012. Iklim usaha di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Berbagai usaha muncul dan banyak usaha yang mampu mengembangkan diri sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Koperasi yang telah mampu mengakses kredit/pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainya sebanyak 100 unit. Sementara itu rata-rata peningkatan wirausaha baru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2012 mencapai 25%. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Untuk keberhasilan pembangunan koperasi dan UMKM pada tahun 2015 seperti yang diamanatkan RPJMD dapat dilihat pada lampiran matrik evaluasi RPJMD.

9. Industri

Jumlah industri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2012 sebanyak 17.843 industri, kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 17.693 industri atau meningkat sebesar 0,84%. Dari jumlah tersebut sebanyak 75% industri telah menerapkan standar industri. Sentra industri yang dikembangkan tahun 2012 sebesar 85% atau meningkat 6,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase jejaring IKM dengan industri berskala menengah dan besar selama 3 tahun terakhir hanya mencapai 75%, kondisi ini masih dibawah

target RPJMD tahun 2012. Untuk tahun 2015 capaian kinerja pembangunan industri dapat dilihat pada matrik evalusi RPJMD.

10. Perdagangan

Nilai perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah pasar tradisional yang terbangun sebanyak 1 unit pertahun dari tahun 2010-2012. Sementara itu jumlah perusahaan yang telah memiliki SIUP tahun 2012 mencapai 100%. Persentase ketersedian kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2012 mencapai 100%, dengan demikian kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dapat dipenuhi. Sementara itu untuk pengawasan peredaran barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun tahun 2012 mencapai 22%. Kondisi ini telah mencapai target RPJMD tahun 2012 lebih dari 100%. Untuk tahun 2015 keberhasilan pembangunan perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran matrik evaluasi RPJMD

11. Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan promosi dan kerjasama investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menggunakan website sebagai sarana promosi. Penggunaan website tersebut cukup efektif menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Investor tidak perlu datang langsung ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bisa mengetahui kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan peluang investasi yang ditawarkan. Selain itu untuk meningkatkan investasi juga dilakukan pelayanan investasi dengan sistem online. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2012. Ketersediaan layanan perijinan investasi online yang sesuai dengan perkembangan teknologi selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2010 sebesar 25%, tahun 2011 sebesar 35% dan tahun 2012 sebesar 45%. Jumlah perijinan yang diterbitkan juga mengalami peningkatan. Tahun 2010 sebanyak 9.400 buah meningkat menjadi 17.157 buah. Nilai realisasi investasi baru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2012 meningkat pada tahun 2015.

12. Pertanian

Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber non karbohidrat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan tahun 2012 mencapai 96%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 93%. Kondisi ini menunjukan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dapat mencukupi kebutuhan bahan pangan daerah. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2012, capaian kinerjanya lebih dari 100%. Daya serap terhadap hasil produksi pertanian dan perkebunan juga mencapai 97%.

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian/perkebunan petani telah memanfaatkan teknologi tepat guna. Penggunaan teknologi tepat guna antara lain pada saat penanaman padi, teknologi pasca panen dan lain sebagainya. Pada tahun 2012 penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian mencapai 75%. Pada tahun 2012 tingkat produktivitas,

kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan mencapai 8%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai 6%. Serapan pasar pada produksi komoditas peternakan mencapai 100% di tahun 2012. Capaian kinerja pembangunan pada tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran matrik evaluasi RPJMD.

13. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan pada satu wilayah dilihat dari empat aspek yaitu aspek ketersediaan, diversifikasi pangan, distribusi pangan dan keamanan pangan. Kinerja urusan ketahanan pangan ditandai dengan menigkatnya ketersediaan pangan utama khususnya beras, peningkatan konsumsi pangan dan peningkatan lumbung pangan.Tahun 2012 ketersediaan sumber pangan utama dan non utama mencapai 94%. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 93%. Kondisi daya serap masyarakat terhadap produk pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 97%. Ini menunjukan adanya tingkat konsumsi yang cukup tinggi pada hasil produksi pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sementara itu jumlah lumbung pangan desa juga mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 13 unit, meningkat menjadi 22 unit di tahun 2012. Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2015 ditetapkan 5 indikator dan baru tercapai 2 indikator atau 40% (lihat lampiran matirk evaluasi RPJMD).

14. Lingkungan Hidup

Kasus kerusakan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 3 kasus, tahun 2012 meningkat menjadi 5 kasus. Sementara itu kerusakan di lahan kritis dan lahan pesisir mengalami penurunan. Kerusakan lahan kritis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 sebesar 60 Ha tahun 2012 menurun menjadi 50 Ha. Untuk kerusakan lahan kawasan hutan dan bantaran sungai tahun 2012 sebesar 50 Ha. Kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan. Tahun 2010 sebesar 12 kasus menurun menjadi 10 kasus tahun 2012. Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga ekosistem kawasan hutan. Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu air tahun 2010 mencapai 64,64%. Sementara itu untuk persentase usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu udara tahun 2012 mencapai 75%. Untuk persentase tindak lanjut aduan kasus lingkungan tahun 2012 sebesar 100%, kondisi ini telah melampaui target RPJMD tahun 2012 dan target SPM Nasional yang ditetapkan sebesar 90% di tahun 2015. Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2015 ditetapkan 11 indikator dan yang telah tercapai 10 indikator (lihat lampiran matrik evaluasi RPJMD).

15. Perikanan

Perikanan tangkap dan perikanan budidaya merupakan salah satu andalan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 1.386 ton meningkat menjadi 1.763 ton pada tahun 2012. Untuk produksi

perikanan budidaya air tawar tahun 2010 sebesar 6.452 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 7.148 ton. Produksi perikanan budidaya air tawar tahun 2010 sebesar 627,7 ton tahun 2012 meningkat menjadi 663.185 ton. Tingkat konsumsi ikan tahun 2012 mencapai 12,3 kg/kap/tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa secara gradual ada peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha di bidang perikanan termasuk para nelayan.

Jumlah usaha pengelolaan ikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan dari 43 unit tahun 2010, meningkat menjadi 79 unit tahun 2012. Rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan meningkat di tahun 2012. Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Rata-rata pendapatan nelayan tahun 2012 sebesar 8,08%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6%. Sementara untuk rata-rata pendapatan pembudidaya ikan meningkat sebesar 17% ditahun 2012. Kondisi ini telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012. Untuk capaian kinerja tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran evaluasi RPJMD.

16. Energi Sumber Daya Mineral

Pengembangan energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sepesat urusan yang lain. Potensi energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif terbatas. Namun demikian usaha pengelolaan pertambangan bahan galian C dan bahan tambang lain mengalami peningkatan. Terbukti masyarakat yang mengajukan Surat Ijin Usahan Pertambangan Daerah (SIPD) semakin meningkat. Surat Ijin usaha pertambangan Daerah (SIPD), yang dikeluarkan mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 9 SIPD, tahun 2012 meningkat menjadi 14 SIPD. Ijin pemanfaatan air bawah tanah tahun 2010 sebanyak 100 ijin meningkat menjadi 105 ijin tahun 2012.

Pembinaan dan pengawasan pengusaha pertambangan telah dilakukan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tahun 2012 pengawasan dan perijinan pertambangan mineral mencapai 30%. Sementara itu di tahun 2012 telah dikeluarkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Minerba Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk ijin ketenagalistrikan belum dapat mencapai target yang ditetapkan karena capaian kinerjanya baru sebesar 4%.Untuk capaian kinerja tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran evaluasi RPJMD.

17. Kehutanan

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagian berupa hutan, baik hutan rakyat maupun hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani. Produksi hasil hutan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil produksi hutan tahun 2012 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 3%. Sementara itu peningkatan hasil produksi hutan juga diselarakan dengan upaya untuk merehabilitasi hutan. Tahun 2012 upaya rehabilitasi hutan juga telah melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMD sebesar 11%, meningkat menjadi 12%. Untuk tingkat peran

serta masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota tahun 2012 mencapai 50%. Selain partisipasi masyarakat dalam penghijauan kota, masyarakat juga sudah banyak yang memiliki kesadaran dalam menciptakan budidaya secara organik di lingkungan kehutanan.

Capaian kelompok Daya Saing Daerah secara keseluruhan tergambarkan dari capaian kinerja urusan 1) Pekerjaan Umum, 2) Perumahan, 3) Penataan Ruang, 4)Pertanahan, 5) perhubungan, 6) Komunikasi dan Informatika, 7) Pariwisata, 8) Koperasi UMKM, 9) Industri, 10) Perdagangan, 11) Penanaman Modal, 12) Pertanian, 13) Ketahanan Pangan, 14) Lingkungan Hidup, 15) Perikanan, 16) Energi Sumber Daya Mineral, dan 17) Kehutanan. Untuk capaian kinerja tahun 2011- 2015 dapat dilihat pada lampiran evaluasi RPJMD.

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelompok Daya Saing

No	Urusan	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Sesuai RKPD	Capaian
1	Pekerjaaan Umum	**16**	**11**	**5**	**0**	**69%**
2	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	**9**	**7**	**2**	**0**	**78%**
3	Perdagangan, Koperasi dan UKM	**15**	**8**	**6**	**1**	**53%**
4	Perindustrian, Pertambangan dan Energi	**10**	**9**	**1**	**0**	**90%**
5	Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan	**11**	**9**	**2**	**0**	**82%**
6	Ketahanan Pangan	**6**	**3**	**3**	**0**	**50%**
7	Pengelola Lingkungan Hidup	**14**	**7**	**2**	**5**	**50%**
8	Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	**15**	**15**	**0**	**0**	**100%**
9	Pelaksana Penyuluhan	**8**	**6**	**2**	**0**	**75%**
10	TK, Transimigrasi dan Sosial	**6**	**5**	**1**	**0**	**83%**
11	Pemuda OR, Budaya dan Pariwisata	**3**	**2**	**1**	**0**	**67%**
12	Pelayanan Perijinan Terpadu	**3**	**2**	**1**	**0**	**67%**
	Jumlah	**116**	**84**	**26**	**6**	**72%**
	Total		**72%**	**22%**	**5%**	

Sumber: Lihat lampiran matrik evaluasi RPJMD Kab. HST

Tabel 3.4.
Rekapitulasi Capaian Kinerja SKPD dalam Menjalankan Program RPJMD

NO	SKPD	TERCAPAI	BELUM	TOTAL	% (TERCAPAI)	% (BELUM)	KINERJA
1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	82	17	99	82.83	17.17	166.00
2	Perindustrian dan Pertambangan	4	16	20	20.00	80.00	80.00
3	BPBD	20	0	20	100.00	0.00	64.20
4	PU BINA MARGA	3	3	6	50.00	50.00	94.20
5	BAPPEDA	31	10	41	75.61	24.39	85.37

6	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	17	3	20	85.00	15.00	100.00
7	DINAS DUKCAPIL	17	7	24	70.83	29.17	83.70
8	KBPPPA	10	1	11	90.91	9.09	117.10
9	KAPUSTARDA	4	5	9	44.44	55.56	75.59
10	KETAHANAN PANGAN	23	5	28	82.14	17.86	88.81
11	SDA	6	0	6	100.00	0.00	103.33
12	KP2T	28	1	29	96.55	3.45	109.91
13	DISPORABUDPAR	7	0	7	100.00	0.00	98.79
14	BPP	7	2	9	77.78	22.22	85.00
15	BPMPD	24	9	33	72.73	27.27	97.43
16	BPLH	29	2	31	93.55	6.45	90.90
17	KESBANGPOL	1	24	25	4.00	96.00	90.00
18	KORPRI	5	14	19	26.32	73.68	71.00
19	KECAMATAN HARUYAN	4	0	4	100.00	0.00	96.88
20	KECAMATAN LAS	27	2	29	93.10	6.90	86.38
21	KECAMATAN LAU	25	2	27	92.59	7.41	86.38
22	KECAMATAN BAT	24	5	29	82.76	17.24	79.41
23	KECAMATAN BARABAI	37	8	45	82.22	17.78	92.00
24	KECAMATAN BATU BENAWA	27	0	27	100.00	0.00	100.00
25	KECAMATAN PANDAWAN	40	2	42	95.24	4.76	99.44
26	KECAMATAN HANTAKAN	3	31	34	8.82	91.18	78.00
27	KECAMATAN LIMPASU	26	22	48	54.17	45.83	65.00
28	KECAMATAN BAU	2	25	27	7.41	337.50	84.46
29	KECAMATAN BAS	25	2	27	92.59	2.16	84.46
	JUMLAH/RATA-RATA	533	216	749	73.67	39.11	95.16

Dalam menjalankan program kerja dalam RPJMD yang telah ditetapkan setelah dilakukan rekapitulasi berdasarkan data yang masuk maka capaian rata-rata per SKPD mencapai target 73,67%. Namun yang menggembirakan adalah kinerja SKPD untuk berusaha mencapai target tersebut patut mendapar apresiasi tinggi dengan kinerja yang sangat tinggi yaitu mencapai 95,16%. Jadi capaian kinerja ini bukan hanya didukung oleh factor internal aparatur dan SKPD tetapi oleh factor lainnya dan keterkaitan dengan SKPD lainnya.

BAB IV
EVALUASI PROGRAM PRIORITAS RPJMD
DENGAN PROGRAM PRIORITAS RKPD

4.1. Pencapaian Misi Program Prioritas Pembanggunan RPJMD

Pencapaian misi yang paling tinggi adalah misi 3 dan 4 sebesar 93,93% dan 81 % dalam Mengembangkan Kehidupan Sosial, Politik, Dan Budaya Yang Bermartabat. Selanjutnya misi 1 dan 2 masing-masing 77,42 % dan 77, 46% yaitu misi 1 Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, Terampil dan Menguasai IPTEK dan misi 2 Menumbuhkan Dan Mengembangkan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berdaya Saing dan Misi 6 Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Masyarakat masing-masing sebesar 75%, Selanjutnya Misi 5 hanya 72%. Realisasi total yang tercapai sebesar 79%, yang belum 21 % dan yang tidak sesuai 2,4%.

Tabel 4.1. Pencapaian Misi Program Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Program Prioritas Pembangunan Rpjmd	Indikator Kinerja RPJMD	Capaian			%
			Tercapai	Belum	Tidak Sesuai	Capaian
Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berakhlak Mulia, Kreatif, Inovatif, Terampil Dan Menguasai Ipteks						
1	Misi I	62	48	14	7	77,42%
Misi 2 Menumbuhkan Dan Mengembangkan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berdaya Saing						
2	Misi II	71	55	16	2	77,46%
Misi 3 Pemanfaatan Dan Distribusi SDA Dengan Menjaga, Memelihara Dan Melestarikan Lingkungan						
3	Misi III	31	29	2	0	93,93%
Misi 4 Mengembangkan Kehidupan Sosial, Politik, Dan Budaya Yang Bermartabat						
4	Misi IV	54	44	10	0	81%
Misi 5 Penyelenggaraan Otonomi Luas Dan Menerapkan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik						
5	Misi V	43	31	12	0	72%
Misi 6 Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Masyarakat						
6	Misi VI	28	21	7	0	75%
	Total	**289**	**228**	**63**	**7**	
	% Total		**79%**	**21%**	**2,4%**	

4.2. Pencapaian Program Prioritas Per SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Dinas Pendidikan

Program pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, PAUD, pendidikan non formal, peningkatan mutu tenaga pendidikan dan kependidikan. Kebijakan yang dilakukan dengan menyelenggarakan wajar 12 tahun, perluasan pendidikan PAUD, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan, pengembangan teknologi dan komunikasi, mengembangkan sistem evaluasi akreditasi dan sertifikasi, manajemen pendidikan, sistem pembiyaan, meningkatkan

mutu pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana, penyediaan gedung sekolah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 25 indikator yang tercapai sebanyak 18 indikator yang masih belum tercapai 5 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 2 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 72% (kategori **Baik**).

2. **Dinas Kesehatan**

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 27 indikator yang tercapai sebanyak 19 indikator yang masih belum tercapai 8 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 70% (kategori **Baik**).

3. **RSUD Damanhuri**

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 9 indikator yang tercapai sebanyak 6 indikator yang masih belum tercapai 1 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 2 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 67% (kategori **Cukup Baik**).

4. **Dinas Pekerjaan Umum**

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 16 indikator yang tercapai sebanyak 11 indikator yang masih belum tercapai 5 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 69% (kategori **Cukup Baik**).

5. **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 9 indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator yang masih belum tercapai 2 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 78% (kategori **Baik**).

6. **Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi**

Program pengemangan IKM, peningkatan teknologi industri, pembinaan dan pengawasan pertambangan, pembinaan dan pengembangan *energy alternative*, pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan, potensi air bawah tanah. Strategi internal berupa potensi bahan baku industri, pertambangan dan energi, tersedianya strategi eksternal dengan tingginya potensi pasar produksi industri, pertambangan dan energi dan banyaknya calon investor yang berminat.

Kebijakan yang dibuat dengan meningkatkan perusahaan yang melaksanakan produktivitias IKM, GKM, jumlah industri potensial hasil hutan dan pertanian, dan pertambangan berwawasan lingkungan. Hulu Sungai Tengah yang dihadapi terbatasnya infrastruktur, SDM yang mampu meningkatkan nilai tambah, isu lingkungan terkait pertambangan.

Strategi mengatasi Hulu Sungai Tengah dengan menumbuhkan *cluster industry*, mengembangkan inovasi dan kreasi, penguatan legalitas, kualitas dan nilai tambah bahan baku tambang, optimalisasi pemanfaatan *energy alternative*, penertiban pemanfaatan air bawah tanah. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi akses perbankan dan ijin, kemitraan, pembinaan

kemampuan, pengembangan, pelayanan dan penerapan SNI teknologi industri, peningkatan pertambangan berwawasan lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan *energy alternative* dan pemanfaatan air bawah tanah. Realisasi program mencapai 90 % dari target RPJMD. Terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja, terlayaninya perijinan dan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 10 indikator yang tercapai sebanyak 9 indikator yang masih belum tercapai 1 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD tidak ada sehingga capaian kinerja sebesar 90% (kategori **Sangat Baik**).

7. **Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM**

Program Bidang Koperasi, perdagangan dan pengelolaan pusat yang dilaksanakan dengan Rencana Kerja Tahunan. Dalam penganggarannya ada beberapa kegiatan yang dalam pembahasan DPRD tidak disetujui dan memasukkan kegiatan usulan dari DPRD. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 15 indikator yang tercapai sebanyak 8 indikator yang masih belum tercapai 6 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 1 indikator sehingga capaian kinerja hanya sebesar 53% (kategori **Cukup**).

8. **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)**

Program peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja yang tercapai 138,9% dan pencapaian pendapatan daerah mencapai 94,47%. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 8 indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator yang masih belum tercapai 1 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 88% (kategori **Sangat Baik**).

9. **Dinas Tenaga Kerja, Transimigrasi dan Sosial.**

Program kerja SKPD yang terlaksana pada bidang tenaga kerja adalah perlindungan dan pengembangan lembaga ketenega kerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Pada bidang sosial adalah pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, pelestarian nilai-nilai kejuangan dan penyuluhan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Strategi yang dilakukan dengan penguatan kelembagaan produktivitas dan pelatihan, pengembangan kualitas, sistem informasi pasar kerja, bursa kerja dan perluasan kesempatan kerja serta penempatan kerja. Membangun hubungan industrial yang harmonis, kampanye sosial, partisipasi sosial, advokasi dan pendampingan sosial. Kebijakan untuk melaksanakan strategi adalah peningkatan kompetensi dan kualitas produktivias tenaga keja, perluasan penciptaan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pegelolaan iklim kerja kondusif, peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenaga kerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum, meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil, meningkatkan professional SDM kesejahtraan sosial, memantapkan manajemen

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat.

Hulu Sungai Tengah pelaksanaan adalah alokasi anggaran yang belum memadai, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, banyak pencari kerja yang berkeinginan mengikuti diklat namun fasilitas dan kesempatan terbatas, terbatasnya jangkauan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Strategi mengatasi Hulu Sungai Tengah dengan perlunya tambahan dana anggaran, penambahan pegawai/instruktur, penegakan disiplin pegawai, peningkatan motivasi dan budaya kerja, sinkronisasi program daerah, provinsi dan pusat, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pencapaian kinerja pada tahun 2011 tercapai 87,69% dari target 94,76, tahun 2012 realisasi mencapai 90,08% dan 2013 mencapai 89,34%. Dampak program bidang sosial dengan meningkatnya pelayanan PMKS dan kesejahteraan sosial, terpenuhinya kebutuhan kesempatan penerimaan layanan sosial, memutus mata rantai kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 6 indikator yang tercapai sebanyak 5 indikator yang masih belum tercapai 1 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 83% (kategori **Sangat Baik**).

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 17 indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator yang masih belum tercapai sehingga capaian kinerja sebesar 70,83% (kategori **Baik**).

11. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Peningkatan peran serta kepemudaan, pengembangan kebijakan manajemen organisasi olahraga, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya. Dari keseluruhan program tersebut yang mencapai target pada ahun 2013 adalah sebanyak 80%. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pada bidang pelayanan umum/publik dengan 10 indikator yang tercapai sebanyak 10 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 100% (kategori **Sangat Baik**). Dan untuk program daya saing pencapaian target mencapai 67% (kategori **Cukup Baik**).

12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 5 indikator yang tercapai sebanyak 4 indikator yang masih belum tercapai 1 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 80% (kategori **Sangat Baik**).

13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 11 indikator yang tercapai sebanyak 82 indikator yang masih belum tercapai 17 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 82,83% (kategori **Sangat Baik**).

14. Dinas Kehutanan Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 15 indikator yang tercapai sebanyak 15 indikator yang masih belum tercapai 0 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 100% (kategori **Sangat Baik**).

15. Badan Pelaksana Penyuluhan

Program peningkatan kesejahteraan petani, pemberdayaan penyuluh. Strateginya dengan peningkatan kinerja, pendanaan dan SDM. Dampak pembangunan dengan meningkatnya produksi pertanian, kesejahteraan petani, peningkatan SDM penyuluh dan petani, pendampingan usaha tani menuju agribisnis, kelestarian agrosistem, peningkatan pendapatan petani miskin menuju petani sejahtera. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 9 indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator yang masih belum tercapai 2 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 77,78% (kategori **Baik**).

16. Badan Ketahanan Pangan

Program ketahanan pangan dilaksanakan dengan strategi : pengembangan sistem pengamanan harga, perkuatan permodalan (LUEP) dalam jual beli gabah/beras. Diversifikasi pangan, pengembangan sistem pemantauan produksi, pembinaan sistem pelaporan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Kebijakan aspek ketersediaan yang dilakukan adalah meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi menuju kemandirian pangan, mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan, mencegah dan menanggulangai rawan pangan.

Kebijakan aspek distribusi dan stabilisasi dengan mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif, mengembangkan kordinasi sinergis lintas sektor, meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat. Kebijakan aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan mempercepat penganeka ragaman konsumsi pangan, mengembangkan teknologi pengelolaan pangan, mengembangkan keamanan pangan.

Hulu Sungai Tengah yang dihadapi adalah perilaku masyarakat terhadap pangan belum sesuai harapan, jual beli pada saat panen raya sehingga mengurangi pendapatan petani, perwilayaahan sumber daya pangan (gunung, dataran rendah dan rawa) menimbulkan masalah distribusi.

Strategi mengatasi masalah dengan memberikan pemahaman, pembinaan dan memperkuat sistem ketahanan pangan dengan pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja pada indikator ketersediaan energi dan protein, stabilitas harga komoditas sudah tercapai. Dampak program dengan tersedianya pangan, kecukupan pangan dan cadangannya, terjaminnya stabilitas harga, akses pangan, peran serta masyarakat, tersedianya informasi harga komoditas dan produk, terfasilitasinya masyarakat miskin sehingga pendapatan petani meningkat. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 23 indikator yang tercapai sebanyak 5

indikator yang masih belum tercapai sehingga capaian kinerja sebesar 82,14% (kategori Sangat Baik).

17. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 31 indikator yang tercapai sebanyak 29 indikator yang masih belum tercapai 2 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 5 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 93,55% (kategori **Sangat Baik**).

18. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA).

Program yang telah dilaksanakan BKBPPPA ini adalah program KB, model operasional BKB, Posyandu dan PAUD, pembinaan peran serta masyarakat dan pelayanan KB/KR yang mandiri, pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KIR-KRR), penguatan dan pengarusutamaan gender dan anak, penigkatan peran serta dan kesetaraan gender dan pembangunan, keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

Strategi yang digunakan adalah strategi operasional, internal, desentralisasi, pemberdayaan, kemitraan segmentasi sasaran dan kualitas. Kebijakan yang dibuat untuk mendukung strategi adalah membangun komitmen dengan semua *steakholder* terkait, menggalang kemitraan dan menfasilitasi pelaksanaan program. Hulu Sungai Tengah yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, pendanaan APBD, dan belum optimalnya partisipasi dan peran serta masyarakat. Strategi mengatasi Hulu Sungai Tengah dengan memaksimalkan SDM dan pengadaan pegawai kontrak, *sharing* anggaran dengan APBN (DAK) dan APBD provinsi, serta meningkatkan inovasi, kreatifitas, komunikasi informasi edukatif.

Dampak program terhadap pembangunan daerah adalah dengan rendahnya laju pertumbuhan penduduk 1,18% dibawah rerata nasional 2,6%. Pelayanan telah merata pada 169 desa dalam 11 kecamatan. Pemberdayaan melalui 22 model posyandu, 16 buah kelompok ekonomi perempuan, 30 buah kelompok PIK-KRR, 3 kecamatan GSI, 6 desa P2W KSS. Pelayanan dengan membentuk lembaga P2TP2A, Gugus Tugas ABH, 7 buah balai penyuluhan KB dan 21 klinik KB. Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dan Berkualitas berwawasan Gender. Penurunan prosentase jumlah penduduk miskin dengan menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 dibanding total keluarga. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 11 indikator yang tercapai sebanyak 10 indikator yang masih belum tercapai 1 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 90,1% (kategori **Sangat Baik**).

19. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, pelayanan secara on line. Kebijakan mendukung program tersebut adalah pelayanan perizinan gratis, menyederhanakan prosedur pelayanan. Hulu Sungai Tengah yang dihadapi adalah kantor pelayanan tidak standar

dan sumberdaya yang terbatas. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 3 indikator yang tercapai sebanyak 2 indikator yang masih belum tercapai 1 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 67% (kategori **Cukup Baik**).

20. Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 8 indikator yang tercapai sebanyak 8 indikator yang masih belum tercapai 0 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 100% (kategori **Sangat Baik**).

21. Satuan Polisi Pamong Praja

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kambtibmas, penegakan tindakan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban. Strategi peningkatan sumber daya aparatur, bimtek dan diklat satpol PP. kebijakan kerjasama dengan kepolisian dan TNI serta kejaksaan. Hulu Sungai Tengah yang dihadapi kurangnya aparat satpol PP, kurangnya pelatihan tingkat provinsi dan pusat. Strateginya meningkatkan diklat satpol PP. Didukung satpol PP pembangunan berjalan aman dan tenteram, lapangan pekerjaan yang lebih baik, peningkatan pelayanan masyarakat, lingkungan kondusif dan berkurangnya tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 8 indikator yang tercapai sebanyak 8 indikator yang masih belum tercapai 0 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 100% (kategori **Sangat Baik**).

22. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian arsip daerah, peningkatan kualitas pelayaan informal. Melalui kebijakan pengembangan fungsi perpustakaan sebagai pusat belajar mandiri, pelayanan informasi, penelitian dan rekreasi masyarakat, dan pengembangan sistem kearsipan. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 4 indikator yang tercapai sebanyak 4 indikator yang masih belum tercapai 0 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 100% (kategori **Sangat Baik**).

23. Badan Kepegawaian Daerah

Program BKD yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan diklat, penempatan PNS sesuai kompetensi, peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, pertumbuhan PNS, penanganan kasus pelanggaran disiplin, dan peningkatan kompetensi aparatur.

Strategi dengan perbaikan sarana dan prasarana sistem administrasi dan penunjangnya, peningkatan pendidikan formal dan informal aparatur, kualias SDM, disiplin dan kesejahtraan pegawai. Kebijakan yang dilakukan melalui proses pengisian pegawai dan struktur perangkat daerah, memberikan kesempatan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, menjadi perguruan tinggi dalam kemitraan pengembangan pendidikan dan pelatihan, mendorong disiplin pegawai, dan memberikan reward pada pegawai berprestasi dan disiplin tinggi.

Hulu Sungai Tengah dalam pelaksanaan adalah kualitas SDM, kuantitas SDM, belum tersedianya SOP dan SPM, belum optimalnya penerapan teknologi informasi (SIMPEG dan SAPK), lemahnya etos kerja dan disiplin SDM, terbatasnya anggaran. Strategi untuk mengatasi dengan melakukan perubahan budaya kerja dan etos kerja, peningkatan kualitas SDM professional, pemanfaatan sarana dan prasarana optimal, konsistensi kebijakan, peningkatan kerjasama dengan badan diklat provinsi dan perguruan tinggi. Dampaknya dengan terwujudnya aparatur daerah yang semakin professional dan peningkatan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 6 indikator yang tercapai sebanyak 6 indikator yang masih belum tercapai 0 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 100% (kategori **Sangat Baik**).

24. Sekretariat DPRD

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan strategi pembahasan raperda, rapat kelengkapan dewan, rapat paripurna, kegiatan reses, sosialisasi, kunjungan kerja, dan peningkatan kapasitas. Kebijakan yang dilkaukan adalah menetapkan prolegda, program tahunan, mengagendakan peningkatan kapasitas DPRD (bimtek 8 kali/tahun). Strategi melalui peningkatan kapasitas melalui bimtek, pengawasan, penerapan pokja penyelesaian target. Kinerja sekretariat dewan mencapai 100%.

Dampak pembangunan semakin meningkat jika kinerja DPRD berjalan lancar, reses media memeratakan pembangunan, rapat paripurna dan kelengkapan dewan, dengar pendapat untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, pembahasan raperda dan perda berwawasan lingkungan dan berpihak pada pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 1 indikator yang tercapai sebanyak 1 indikator yang masih belum tercapai 0 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 100% (kategori **Sangat Baik**).

25. Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 13 indikator yang tercapai sebanyak 10 indikator yang masih belum tercapai 3 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 76% (kategori **Baik**).

26. Bappeda

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 41 indikator yang tercapai sebanyak 31 indikator yang masih belum tercapai 10 indikator dan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan RKPD 0 indikator sehingga capaian kinerja sebesar 75,61% (kategori **Baik**).

27. Inspektorat

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja dengan 3 indikator yang tercapai sebanyak 0 indikator yang masih belum tercapai 3 indikator namun capaian indikator kinerja dengan

progres sebesar 83% dari target 100 % sehingga masih dalam kategori **Sangat Baik** dalam progres namun belum tercapai dalam target indikator.

BAB V

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI 2011-2015

1. ANALISIS SEKTOR EKONOMI ANDALAN

Tabel 5.1. Analisis Sektor Basis 9 SektorPerekonomian Kabupaten HST

Periode RPJMD 2011-2015

Sektor	LQ Kabupaten HST	Tahun			Total	Rata-Rata
		2011	2012	2013		
1	Pertanian Agriculture	1,666	1,704	1,683	5,05	1,684
2	Pertambangan dan Penggalian	0,020	0,020	0,021	0,06	0,021
3	Industri Pengolahan	0,817	0,830	0,856	2,50	0,834
4	Litrik dan Air Minum	0,560	0,561	0,569	1,69	0,563
5	BangunanKonstruksi	0,771	0,758	0,738	2,27	0,756
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,932	0,907	0,881	2,72	0,907
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,766	0,757	0,759	2,28	0,761
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,445	1,426	1,407	4,28	1,426
9	Jasa-Jasa	2,165	2,140	2,169	6,47	2,158

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011-2014

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbasiskan sektor pertanian, keuangan dan jasa-jasa. Sedangkan sektor yang mendekati sektor basis adalah sektor perdagangan, pengangkutan dan kontruksi. Sektor basis merupakan sektor unggulan daerah yang menjadi tumpuan perekonomian daerah dan yang banyak berproduksi dan menyerap tenaga kerja bagi masyarakat.

Setelah BPS melakukan pemecahan sector ekonomi dari 9 sektor menjadi 17 sektor ekonomi utama dalam PDRB maka terdapat perbedaan analisis. Analisis dapat lebih terperinci melihat sector yang menjadi sector basis dan andalan daerah. Berdasarkan pengolahan data yang lebih detail, terjadi

pergeseran ekonomi basis yang menjadi andalan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode RPJMD 2011-2015.

Hasil pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan prestasi yang baik selama 5 tahun ini karena 13 sektor dari 17 sektor merupakan sector basis yang merupakan andalan daerah sehingga dapat menjadi leading sector yang menggerakkan perekonomian sector lainnya. Hanya 4 sector yang tidak menjadi basis andalan yaitu pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa perusahaan namun sector ini menunjukkan trend peningkatan sehingga masih sangat prospektif dan potensial. Apabila sector lainnya meningkat maka ke empat sector ini yang merupakan sector ikutan akan terdorong naik dan nantinya akan mampu menjadi andalan. RPJMD periode berikutnya dapat memprogramkan pembangunan yang dapat mendorong sector ini menjadi basis.

Tabel 5.2. Analisis Sektor Basis 17 Sektor Perekonomian Kabupaten HST

Periode RPJMD 2011-2015

NO	Sektor Ekonomi	LQ 2010	LQ 2014	LQ	Progres	Kretaria	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.7393	1.8227	1.7810	Naik	>1	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0.0242	0.0252	0.0247	Naik	<1	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1.1551	1.2248	1.1900	Naik	>1	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.3127	1.2819	1.2973	Turun	>1	Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah, Sampah dan Daur Ulang	1.2804	1.3164	1.2984	Naik	>1	Basis
6	Kontruksi	1.1765	1.1936	1.1851	Naik	>1	Basis
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.2028	1.2034	1.2031	Naik	>1	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0.8763	0.8786	0.8774	Naik	<1	Non Basis

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.9877	1.9721	1.9799	Turun	>1	Basis
10	Informasi dan Komunikasi	1.2875	1.3179	1.3027	Naik	>1	Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.6644	0.6434	0.6539	Turun	<1	Non Basis
12	Real Estate	1.5406	1.5967	1.5687	Naik	>1	Basis
13	Jasa Perusahaan	0.3433	0.3378	0.3406	Turun	<1	Non Basis
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan danJamso	1.8469	1.9052	1.8761	Naik	>1	Basis
15	Jasa Pendidikan	1.6757	1.7317	1.7037	Naik	>1	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.0873	1.1214	1.1043	Naik	>1	Basis
17	Jasa Lainnya	12.0093	1.2786	6.6439	Turun	>1	Basis

Tabel 5.3. Analisis Struktur Ekonomi 17 Sektor Perekonomian Kabupaten HST

Periode RPJMD 2011-2015

NO	Sektor Ekonomi	Proporsi 2010	Proporsi 2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.21	26.37
2	Pertambangan dan Penggalian	0.68	0.72
3	Industri Pengolahan	16.00	15.57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah, Sampah dan Daur Ulang	0.51	0.48
6	Kontruksi	8.47	8.58
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.15	9.69
8	Transportasi dan Pergudangan	4.73	4.86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.44	3.56
10	Informasi dan Komunikasi	4.09	4.35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.87	2.03
12	Real Estate	3.31	3.44
13	Jasa Perusahaan	0.18	0.18
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan danJamso	9.56	9.92
15	Jasa Pendidikan	6.69	6.98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.69	1.85
17	Jasa Lainnya	1.33	1.31

Pergerakan sector ekonomi dari tahun periode awal RPJMD sampai berakhirnya masa RPJMD 2011-2015 struktur ekonomi tidak mengalami perubahan yang menonjol, sector yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap pembangunan daerah terjadi pada sector pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, kontruksi, perdagangan besar, eceran, revarasi mobil dan motor, transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, jasa keuangan dan asuransi, real estate, adm pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan. Hanya beberapa yang tidak meningkat kontribusinya secara proporsi seperti pertanian, namun masih menjadi sector basis andalan daerah.

2. ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN (BERKEMBANG PESAT, BERDAYA SAING DAN BERKONTRIBUSI TERHADAP REGIONAL)

Tabel 5.4. Analisis Sektor Unggulan 9 Sektor Ekonomi Kabupaten HST

Analisis Shift Share PDRB dan Ratio PDRB Kab. HST dalam Propinsi Kalimantan Selatan							
Menurut Sektor Ekonomi tahun 2010 dan 2014 (Dalam Jutaan Rupiah) data BPS 2011-2015							
	PDRB Kab. HST		PDRB Kalsel		Ratio	Ratio	PDRB
Sektor	2010	2014	2010	2014	HST	Kalsel	Agre
	(Eij)	(E'ij)	(Ei)	(E'i)	(ri)	(Ri)	(Ra)
1. Pertanian	431.388	465.061	7.259.482	7.805.273	1,08	1,08	**1,12**
2. Pertambangan	4.935	5.619	6.811.200	7.447.870	1,14	1,09	**1,12**
3. Industri Pengolahan	94.607	105.606	3.247.974	3.485.905	1,12	1,07	**1,12**
4. Listrik, Gas, dan Air	3.108	3.582	155.553	177.867	1,15	1,14	**1,12**
5. Konstruksi	46.952	52.793	1.707.344	2.019.648	1,12	1,18	**1,12**

6. Perdagangan	157.223	175.713	4.731.902	5.631.059	1,12	1,19	**1,12**
7. Angkutan/	73.364	82.664	2.684.844	3.075.251	1,13	1,15	**1,12**
8. Lembaga Keuangan	64.952	72.368	1.260.123	1.452.927	1,11	1,15	**1,12**
9. Jasa-jasa	217.444	255.103	2.815.703	3.322.737	1,17	1,18	**1,12**
Jumlah	**1.093.972**	**1.218.510**	**30.674.124**	**34.418.537**			
Sumber : BPS, Kabupaten HST							

Analisis Shift-Share (Komponen Perubahan PDRB Kabupaten HST)

Sebagai Persentase PDRB Tahun Dasar dan Penjelasannya Tahun 2010 dan 2014

Sektor	PDRB	NG	IMG	RSG	Effek	Kenaikan	Rangking
	HST				Bersih	Aktual	
1. Pertanian	**7,81**	**12,21**	**(4,69)**	**0,29**	**(4,40)**	**7,81**	IX
2. Pertambgn & Penggalian	**13,87**	**12,21**	**(2,86)**	**4,52**	**1,66**	**13,87**	III
3. Industri Pengolahan	**11,63**	**12,21**	**(4,88)**	**4,30**	**(0,58)**	**11,63**	VII
4. Listrik, Gas, dan Air	**15,26**	**12,21**	**2,14**	**0,92**	**3,05**	**15,26**	II
5. Konstruksi	**12,44**	**12,21**	**6,08**	**(5,85)**	**0,23**	**12,44**	V
6. Perdagangan	**11,76**	**12,21**	**6,79**	**(7,24)**	**(0,45)**	**11,76**	VI
7. Angkutan/Transportasi	**12,68**	**12,21**	**2,33**	**(1,86)**	**0,47**	**12,68**	IV
8. Lembaga Keuangan	**11,42**	**12,21**	**3,09**	**(3,88)**	**(0,79)**	**11,42**	VIII
9. Jasa-jasa	**17,32**	**12,21**	**5,80**	**(0,69)**	**5,11**	**17,32**	I

Keterangan :
IMG Positif menunjukkan sektor ekonomi yang berkembang
IMG negatif menunjukkan sektor ekonomi yang tidak berkembang
RSG positif berarti posisi daya saing kuat
RSG negatif berarti posisi daya saing yang lemah
Efek bersih positif berarti sebagai penambah PDRB Propinsi
Efek bersih negatif berarti sebagai pengurang PDRB Propinsi

Berdasarkan rangking sektor ekonomi unggulan dala m pertumbuhan, daya saing, dan kontribusi PDRB adalah sektor jasa, listrik, gas dan air, pertambangan dan penggalian, angkutan, kontruksi, perdagangan industry dan pertanian. namun yang menjadi sektor basis dan andalan adalah sektor pertanian, perdaganga dan jasa.

1. Sektor Ekonomi yang Berkembang Pesat

Sektor Ekonomi yang berkembang pesat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2011-2015 ini adalah sektor listrik, gas dan air, sektor kontruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan, sektor lembaga keuangan dan jasa-jasa termasuk jasa pemerintahan. Namun sektor yang kurang berkembang adalah sektor pertanian, sektor pertambangan&penggalian dan sektor iindustri

2. Sektor Ekonomi yang mempunyai daya saing kuat

Sektor yang kurang berkembang namun memiliki daya saing yang kuat adalah sektor pertanian, sektor pertambangan&penggalian dan sektor iindustri. Sektor yang berkembang pesat dan berdaya saing kuat adalah sektor listrik, gas dan air, sedangkan sektor ektor kontruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan, sektor lembaga keuangan dan jasa-jasa termasuk jasa pemerintahan.kurang berdaya saing kuat.

3. Sektor Ekonomi yang Berkontribusi Positif terhadap Perekonomian Provinsi

Sektor pertambangan&penggalian, sektor listrik, gas dan air, sektor kontruksi, sektor angkutan dan sektor jasa-jasa (termasuk perusahaan dan pemerintahan) merupakan sektor yang berkontribusi positif

terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Sementara itu sektor pertanian, industry, perdagangan, dan lembaga keuangan kurang berkontribusi positif terhadap perekonomian Kalimantan Selatan.

Tabel 5.5. Analisis Sektor Unggulan 17 Sektor Ekonomi Kabupaten HST

NO	Sektor Ekonomi	PDRB HST		PDRB Kalsel		Ratio	Ratio	PDRB
		2010	2014	2010	2014	HST	Kalsel	Agregat
NO		(Eij)	(E'ij)	(Ei)	(E'i)	(ri)	(Ri)	(Ra)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	845,329	981,585	13,701,548	15,452,608	1.16	1.13	1.26
2	Pertambangan dan Penggalian	20,359	26,915	23,681,718	30,689,238	1.32	1.30	1.26
3	Industri Pengolahan	479,470	579,512	11,702,276	13,576,570	1.21	1.16	1.26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,012	4,184	64,689	93,654	1.39	1.45	1.26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah, Sampah dan Daur Ulang	15,347	17,948	337,918	391,232	1.17	1.16	1.26
6	Kontruksi	253,693	319,287	6,079,159	7,675,542	1.26	1.26	1.26
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	274,081	360,893	6,424,054	8,605,196	1.32	1.34	1.26
8	Transportasi dan Pergudangan	141,791	180,852	4,561,492	5,906,807	1.28	1.29	1.26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102,983	132,348	1,460,610	1,925,697	1.29	1.32	1.26
10	Informasi dan Komunikasi	122,594	162,077	2,684,445	3,528,920	1.32	1.31	1.26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	56,084	75,733	2,379,828	3,377,393	1.35	1.42	1.26
12	Real Estate	99,041	127,973	1,812,342	2,299,864	1.29	1.27	1.26
13	Jasa Perusahaan	5,317	6,777	436,579	575,623	1.27	1.32	1.26
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan danJamso	286,322	369,160	4,370,533	5,559,981	1.29	1.27	1.26
15	Jasa Pendidikan	200,346	259,798	3,370,535	4,304,961	1.30	1.28	1.26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,652	68,866	1,313,373	1,762,193	1.36	1.34	1.26
17	Jasa Lainnya	39,988	48,804	93,873	1,095,230	1.22	11.67	1.26

	Jumlah	2,996,409	3,722,712	84,474,972	106,820,709	1.24	1.26	1.26
		249,701	310,226	7,039,581	8,901,726			
	Sumber : BPS Kalsel							

Tabel 5.6. Analisis Sektor Unggulan dan Ranking 17 Sektor Ekonomi Kabupaten HST

NO	Sektor Ekonomi	PDRB	NG (Ra-1)	IMG (Ri-Ra)	RSG(ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rank
		HST				Bersih	Aktual	2010-2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.12	26.45	(13.67)	3.34	(10.33)	16.12	17
2	Pertambangan dan							5

	Penggalian	32.20	26.45	3.14	2.61	5.75	32.20	
3	Industri Pengolahan	20.87	26.45	(10.44)	4.85	(5.59)	20.87	15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	38.91	26.45	18.32	(5.86)	12.46	38.91	1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah, Sampah dan Daur Ulang	16.95	26.45	(10.68)	1.17	(9.50)	16.95	16
6	Kontruksi	25.86	26.45	(0.19)	(0.40)	(0.60)	25.86	13
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.67	26.45	7.50	(2.28)	5.22	31.67	6
8	Transportasi dan Pergudangan	27.55	26.45	3.04	(1.94)	1.10	27.55	11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.51	26.45	5.39	(3.33)	2.06	28.51	10
10	Informasi dan Komunikasi	32.21	26.45	5.01	0.75	5.75	32.21	4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	35.03	26.45	15.47	(6.88)	8.58	35.03	3
12	Real Estate	29.21	26.45	0.45	2.31	2.76	29.21	8
13	Jasa Perusahaan	27.46	26.45	5.40	(4.39)	1.01	27.46	12
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan danJamso	28.93	26.45	0.76	1.72	2.48	28.93	8
15	Jasa Pendidikan	29.67	26.45	1.27	1.95	3.22	29.67	7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35.96	26.45	7.72	1.79	9.51	35.96	2
17	Jasa Lainnya	22.05	26.45	1,040.26	(1,044.67)	(4.41)	22.05	14

Table 5.6 menampilkan gambaran ranking 17 sektor perekonomian, sector yang mendominasi berkontribusi terhadap perekonomian daerah dengan keunggulan dan daya saingnya adalah sector listrik dan gas, jasa kesehatan, jasa keuangan, informasi dan komunikasi n.amun semuanya menunjukan **kenaikan actual** yang berarti berkontribusi terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dan Kabupaten sekitarnya.

Sektor ekonomi yang kurang berkembang adalah sector pertanian, industry pengolahan, pengadaan air, kontruksi, sehingga sector memerlukan program yang menyentuh perbaikan yang mendorong pertumbuhan sehingga pada periode RPJMD yang akan datang meningkat pertumbuhannya. Sector yang lainnya **berkembang pesat** terutama jasa lainnya, pengadaan listrik, jasa keuangan, jasa kesehatan, perdagangan dll.

Sektor yang mengalami **peningkatan daya saing** adalah sector pertanian, pertambangan, industry, pengadaan air, informasi dan komunikasi, real estate, adm pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan sehingga sector ini semakin dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah di era persaingan yang semakin berat. Sector yang kurang bisa bersaing dapat ditingkatkan daya saingnya dengan perbaikan teknologi dan ilmu pengetahuan.

B. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kinerja Pembangunan Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Program pembanguan sektor ekonomi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehigga kinerja pertumbuhan harus diikuti oleh pemerataan dan pemberdayaan ekonomi yang saling mendukung.

Tabel 5.7. Kinerja Pembangunan Bidang Pertumbuhan Ekonomi

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score Akhir	Nilai Akhir
1	TAPIN	0,0886	0,0027	0,1514	0,1541	78,11239
2	HSS	-0,1649	-0,0050	-0,2819	-0,2869	74,14830
3	HST	-0,2371	-0,0072	-0,4054	-0,4126	73,01897

4	HSU	-0,1143	-0,0035	-0,1954	-0,1988	74,93996
5	BALANGAN	-1,4186	-0,0430	-2,4249	-2,4679	54,54541
6	TABALONG	0,1137	0,0034	0,1943	0,1978	78,50497
7	BANJARBARU	-0,5800	-0,0176	-0,9914	-1,0089	67,65860
8	BANJAR	-0,1553	-0,0047	-0,2655	-0,2702	74,29866
9	TANAH LAUT	0,2093	0,0063	0,3578	0,3641	80,00000
10	TANAH BUMBU	-0,1832	-0,0056	-0,3131	-0,3187	73,86268
11	KOTA BARU	-1,7093	-0,0518	-2,9218	-2,9736	50,00000
12	BARITO KUALA	0,0594	0,0018	0,1015	0,1033	77,65596
13	BANJARMASIN	-0,2399	-0,0073	-0,4101	-0,4174	72,97558

Kinerja pembangunan bidang pertumbuhan ekonomi kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam 5 tahun ternyata berada pada urutan yang ke 9 yang berarti masih berada pada kelompok papan tengah. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih mengandalkan sektor pertanian, perdagangan dan jasa tidak seperti kabupaten lainnya yang secara optimal memanfaatkan sumber daya alam sektor pertambangan, sehingga pertumbuhannya tinggi. Akan tetapi pada tahun 2014-2015 ini sektor pertambangan terpuruk sehingga kabupaten yang mengandalkan ini mengalami perlambatan ekonomi.

2. Kinerja Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan

Kinerja pembangunan bidang pemerataan pembangunan pada kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada urutan ke 6 pada 13 kab/kota menunjukkan pemerataan daerah ini lebih baik dibandingkan beberapa daerah lainnya karena termasuk papan tengah ke atas dengan yang terbaik kabupaten Tanah Laut. Pemerataan pembangunan menunjukkan masyarakat lebih merata dalam menikmati hasil-hasil pembangunan selama periode 5 tahun ini.

Tabel 5.8. Kinerja Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score Akhir	Nilai Akhir

1	TAPIN	0,6732	0,0293	1,2778	1,3071	77,49064
2	HSS	0,2154	0,0094	0,4088	0,4181	69,14100
3	HST	0,4293	0,0187	0,8149	0,8336	73,04313
4	HSU	0,6047	0,0263	1,1479	1,1742	76,24227
5	BALANGAN	-0,8342	-0,0363	-1,5834	-1,6197	50,00000
6	TABALONG	0,4371	0,0190	0,8297	0,8487	73,18501
7	BANJARBARU	0,3786	0,0165	0,7187	0,7351	72,11857
8	BANJAR	0,6104	0,0265	1,1587	1,1853	76,34629
9	TANAH LAUT	0,8108	0,0353	1,5390	1,5742	80,00000
10	TANAH BUMBU	0,3497	0,0152	0,6637	0,6789	71,59069
11	KOTA BARU	-0,8342	-0,0363	-1,5834	-1,6197	50,00000
12	BARITO KUALA	-0,1131	-0,0049	-0,2146	-0,2196	63,15113
13	BANJARMASIN	0,3304	0,0144	0,6271	0,6415	71,23851

3. Kinerja Pemberdayaan Ekonomi

Tabel 5.9. Kinerja Pemberdayaan Ekonomi

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score	Nilai Akhir
1	TAPIN	0,4788	0,0299	0,9200	0,9499	79,73056
2	HSS	0,0975	0,0061	0,1873	0,1934	72,61409
3	HST	0,2477	0,0155	0,4760	0,4915	75,41840
4	HSU	0,0372	0,0023	0,0715	0,0738	71,48951

5	BALANGAN	-1,0962	-0,0685	-2,1062	-2,1747	50,33714
6	TABALONG	0,1558	0,0097	0,2994	0,3091	73,70264
7	BANJARBARU	0,0997	0,0062	0,1916	0,1978	72,65589
8	BANJAR	-0,0390	-0,0024	-0,0748	-0,0773	70,06786
9	TANAH LAUT	-0,0157	-0,0010	-0,0302	-0,0311	70,50187
10	TANAH BUMBU	0,1924	0,0120	0,3697	0,3818	74,38625
11	KOTA BARU	-1,1143	-0,0696	-2,1409	-2,2106	50,00000
12	BARITO KUALA	-0,5125	-0,0320	-0,9847	-1,0167	61,23059
13	BANJARMASIN	0,4932	0,0308	0,9477	0,9785	80,00000

Berdasarkan tabel 5.3 kinerja pemberdayaan ekonomi kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki nilai 75,41 yang merupakan urutan ke 3 dari 13 kab/kota menunjukkan prestasi yang sangat baik karena hal ini bermakna bahwa upaya pemberdayaan ekonomi berhasil dalam pembangunan sehingga tingkat pemberdayaan ekonomi termasuk tiga tertinggi di Kalimantan Selatan. Hal ini berarti program pembangunan dan partisipasi masyarakat seiring dalam pemberdayaan ekonomi.

4. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

Kinerja bidang pendidika selama 5 tahun sudah berhasil karena berada pada urutan ke 4 dalam Provinsi Kalimantan Selatan hanya berada di bawah Tanah Bumbu, Banjarbaru dan Barito Kuala. Kinerja ini memberikan gambaran keberhasilan program pembangunan pada bidang pendidikan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 5.6. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score	Nilai Akhir
1	TAPIN	0,2268	0,0073	0,3047	0,3120	64,2118
2	HSS	0,0232	0,0007	0,0312	0,0319	61,6929

3	HST	0,4735	0,0153	0,6363	0,6516	67,2653
4	HSU	0,0136	0,0004	0,0183	0,0187	61,5742
5	BALANGAN	-0,2879	-0,0093	-0,3868	-0,3961	57,8434
6	TABALONG	-0,3222	-0,0104	-0,4329	-0,4433	57,4192
7	BANJARBARU	1,4762	0,0476	1,9835	2,0311	79,6716
8	BANJAR	-0,0076	-0,0002	-0,0102	-0,0104	61,3122
9	TANAH LAUT	0,4496	0,0145	0,6041	0,6186	66,9694
10	TANAH BUMBU	1,5027	0,0485	2,0191	2,0676	80,0000
11	KOTA BARU	-0,9218	-0,0297	-1,2385	-1,2683	50,0000
12	BARITO KUALA	1,2560	0,0405	1,6875	1,7281	76,9465
13	BANJARMASIN	-0,3122	-0,0101	-0,4195	-0,4296	57,5423

5. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Kinerja pelayanan kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk yang terbaik keberhasilannya dengan berada pada urutan ke 2 setelah Kota Banjarbaru. Kinerja yang berhasil ini karena adanya perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan perbaikan manajemen serta pelayanan bidang kesehatan. Hal ini juga tidak terlepas dari membaiknya pelayanan dan manajemen rumah sakit RSUD Damanhuri yang menjadi rumah sakit rujukan wilayah sekitar.

Tabel 5.10. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score	Nilai Akhir

1	TAPIN	0,1996	0,0083	0,3076	0,3159	70,1064
2	HSS	0,4014	0,0167	0,6184	0,6351	73,0349
3	HST	0,8235	0,0343	1,2688	1,3031	79,1629
4	HSU	-0,1289	-0,0054	-0,1986	-0,2040	65,3375
5	BALANGAN	-1,0761	-0,0448	-1,6580	-1,7028	51,5876
6	TABALONG	-0,4267	-0,0178	-0,6574	-0,6752	61,0143
7	BANJARBARU	0,8812	0,0367	1,3576	1,3944	80,0000
8	BANJAR	0,5617	0,0234	0,8655	0,8889	75,3627
9	TANAH LAUT	-0,0226	-0,0009	-0,0349	-0,0358	66,8797
10	TANAH BUMBU	0,4815	0,0201	0,7419	0,7619	74,1983
11	KOTA BARU	-1,1855	-0,0494	-1,8265	-1,8759	50,0000
12	BARITO KUALA	0,3048	0,0127	0,4696	0,4823	71,6327
13	BANJARMASIN	0,3052	0,0127	0,4702	0,4829	71,6383

6. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Administrasi

Kinerja pelayanan public bidang administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam evaluasi 5 tahun ini ternyata berada pada posisi terbaik se Kalimantan Selatan dalam penilaian yaitu nilai tertinggi 80 di atas Tanah Bumbu dan Barito Kuala. Artinya aparat pemerintahan telah maksimal melayani masyarakat dalam hal bidang administrasi.

Tabel 5.11. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Administrasi

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score	Nilai Akhir
1	TAPIN	-0,2765	-0,0184	-0,7891	-0,8076	72,6495
2	HSS	-0,2891	-0,0193	-0,8250	-0,8443	72,3178

3	HST	0,0021	0,0001	0,0059	0,0061	80,0000
4	HSU	-0,2277	-0,0152	-0,6497	-0,6649	73,9383
5	BALANGAN	-0,9658	-0,0644	-2,7563	-2,8207	54,4623
6	TABALONG	-0,5091	-0,0339	-1,4529	-1,4869	66,5125
7	BANJARBARU	-0,2232	-0,0149	-0,6369	-0,6518	74,0570
8	BANJAR	-0,0908	-0,0061	-0,2592	-0,2653	77,5485
9	TANAH LAUT	-0,3112	-0,0207	-0,8883	-0,9090	71,7330
10	TANAH BUMBU	-0,0357	-0,0024	-0,1018	-0,1041	79,0044
11	KOTA BARU	-1,1349	-0,0757	-3,2390	-3,3147	50,0000
12	BARITO KUALA	-0,0421	-0,0028	-0,1202	-0,1230	78,8343
13	BANJARMASIN	-0,5132	-0,0342	-1,4646	-1,4988	66,4050

7. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Sarana/Infrastruktur

Kinerja bidang pembangunan infrastruktur Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada posisi tengah yaitu urutan 7 yang artinya program pembangunan sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Hal ini terlihat dari adanya perbaikan dalam infrastruktur jalan dan akses yang semakin baik, sarana pendidikan, kesehatan, olah raga, drainase dan pertamanan, sanitasi lingkungan dan lain sebagainya.

Tabel 5.12. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Sarana/Infrastruktur

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score	Nilai Akhir
1	TAPIN	0,3613	0,0181	0,5203	0,5384	64,7590
2	HSS	0,3880	0,0194	0,5589	0,5783	65,2136
3	HST	0,1144	0,0057	0,1647	0,1704	60,5688
4	HSU	0,2260	0,0113	0,3255	0,3368	62,4633
5	BALANGAN	-0,9134	-0,0457	-1,3156	-1,3612	43,1260
6	TABALONG	-0,0087	-0,0004	-0,0125	-0,0129	58,4808

7	BANJARBARU	-0,1092	-0,0055	-0,1572	-0,1627	56,7750
8	BANJAR	-0,4651	-0,0233	-0,6699	-0,6932	50,7340
9	TANAH LAUT	1,2593	0,0630	1,8137	1,8767	80,0000
10	TANAH BUMBU	1,0847	0,0542	1,5623	1,6165	77,0374
11	KOTA BARU	-1,0976	-0,0549	-1,5808	-1,6357	40,0000
12	BARITO KUALA	0,4419	0,0221	0,6365	0,6586	66,1282
13	BANJARMASIN	-0,5102	-0,0255	-0,7348	-0,7603	49,9695

8. Kinerja Pembangunan Bidang Partisipasi Publik

Tabel 5.13. Kinerja Pembangunan Bidang Partisipasi Publik

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score	Nilai Akhir
1	TAPIN	-0,0007	-0,0001	-0,0030	-0,0031	62,0125
2	HSS	-0,0354	-0,0027	-0,1532	-0,1559	60,6196
3	HST	0,0118	0,0009	0,0510	0,0519	62,5134
4	HSU	-0,1564	-0,0120	-0,6770	-0,6891	55,7608
5	BALANGAN	-0,2999	-0,0231	-1,2981	-1,3212	50,0000
6	TABALONG	0,4472	0,0344	1,9362	1,9706	80,0000
7	BANJARBARU	-0,2231	-0,0172	-0,9657	-0,9829	53,0830
8	BANJAR	0,2965	0,0228	1,2837	1,3065	73,9474
9	TANAH LAUT	-0,0916	-0,0070	-0,3966	-0,4036	58,3625
10	TANAH BUMBU	0,1892	0,0146	0,8189	0,8334	69,6361
11	KOTA BARU	-0,2999	-0,0231	-1,2981	-1,3212	50,0000
12	BARITO KUALA	-0,2579	-0,0198	-1,1163	-1,1362	51,6862
13	BANJARMASIN	-0,0665	-0,0051	-0,2879	-0,2930	59,3703

Kinerja pembangunan bidang partisipasi public berada pada urutan ke 4 yang berarti masih di atas kabupeten/kota lainnya dalam kinerja pembangunan sehingga ini mengindikasikan bahwa program melibatkan public dalam pembanguna berhasil.

9. Kinerja Pembangunan Bidang Kelembagaan Politik dan Masyarakat

Program bidang pembangunan kelembagaan politik dan masyarakat kinerjanya berada diurutan 7 diantara 13 kab/kota sehingga memberika gambaran bahwa kelembagaan politik masyarakat cukup dinamis dan berkembang sehingga suasana perpolitikan dan kelembagaan masyarakat mendorong pembangunan yang kondusif.

Tabel 5.14. Kinerja Pembangunan Bidang Kelembagaan Politik dan Masyarakat

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score	Nilai Akhir
1	TAPIN	1,2492	0,2082	1,7458	1,9541	71,4229
2	HSS	1,2647	0,2108	1,7675	1,9783	71,6148
3	HST	0,7804	0,1301	1,0906	1,2207	65,6208
4	HSU	0,9153	0,1526	1,2792	1,4318	67,2908
5	BALANGAN	-0,4337	-0,0723	-0,6061	-0,6784	50,5960
6	TABALONG	0,7966	0,1328	1,1133	1,2461	65,8221
7	BANJARBARU	0,2339	0,0390	0,3269	0,3659	58,8581
8	BANJAR	1,9423	0,3237	2,7144	3,0382	80,0000
9	TANAH LAUT	1,2118	0,2020	1,6935	1,8955	70,9598
10	TANAH BUMBU	0,4290	0,0715	0,5996	0,6711	61,2728
11	KOTA BARU	-0,4819	-0,0803	-0,6734	-0,7537	50,0000
12	BARITO KUALA	-0,1383	-0,0231	-0,1933	-0,2164	54,2513
13	BANJARMASIN	0,5257	0,0876	0,7347	0,8224	62,4694

10. Kinerja Pembangunan Bidang Akuntabilitas Publik

Kinerja pembangunan bidang akuntabilitas public berada diuruta 5 besar se Kalimantan Selatan yang terbukti dengan adanya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai indikator akuntabilitas keuangan public. Bidang akuntabilitas public lainnya juga cukup transparan dan baik sehingg program yang dijalankan oleh dinas terkait sudah berhasil.

Tabel 5.15. Kinerja Pembangunan Bidang Akuntabilitas Publik

No	Kab/Kota	Score Total	Rata2	Score	Score	Nilai Akhir
1	TAPIN	0,0017	0,0003	0,0020	0,0024	77,3570
2	HSS	-1,3156	-0,2631	-1,5224	-1,7855	59,3380
3	HST	-0,6490	-0,1298	-0,7510	-0,8808	68,4558
4	HSU	-1,9983	-0,3997	-2,3124	-2,7121	50,0000
5	BALANGAN	-1,9983	-0,3997	-2,3124	-2,7121	50,0000
6	TABALONG	0,1950	0,0390	0,2256	0,2646	80,0000
7	BANJARBARU	-1,9983	-0,3997	-2,3124	-2,7121	50,0000
8	BANJAR	-0,5997	-0,1199	-0,6940	-0,8139	69,1303

9	TANAH LAUT	-0,7268	-0,1454	-0,8410	-0,9864	67,3922
10	TANAH BUMBU	-1,9983	-0,3997	-2,3124	-2,7121	50,0000
11	KOTA BARU	-1,9983	-0,3997	-2,3124	-2,7121	50,0000
12	BARITO KUALA	-1,9983	-0,3997	-2,3124	-2,7121	50,0000
13	BANJARMASIN	-0,2777	-0,0555	-0,3213	-0,3768	73,5354

11. Kompilasi Kinerja Daya Saing Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode RPJMD 2011-2015 dalam Performance Bidang Perekonomian, Pelayanan Publik dan Politik

Tabel 5.16. Kompilasi Kinerja Daya Saing Daerah Kab. HST di Prov. Kalimnatan Selatan

No	Kab/Kota	EKONOMI			PELAYANAN PUBLIK		POLITIK LOKAL	
		Tumbuh	Rata	Daya	Adm	Sarana	Partisipasi	Kelembagaan
		20%	10%	10%	15%	20%	15%	10%
1	TAPIN	78,11	77,49	79,74	72,65	64,76	62,01	71,42
2	HSS	74,15	69,14	72,61	72,32	65,21	60,62	71,61
3	HST	73,02	73,01	75,36	80,00	60,57	62,51	65,62
4	HSU	74,94	76,24	71,49	73,94	62,46	55,76	67,29
5	BALANGAN	54,55	50,00	50,34	54,46	43,13	50,00	50,60
6	TABALONG	78,50	73,19	73,71	66,51	58,48	80,00	65,82
7	BANJARBARU	67,66	72,12	72,66	74,06	56,78	53,08	58,86
8	BANJAR	74,30	76,35	70,07	77,55	50,73	73,95	80,00
9	TANAH LAUT	80,00	80,00	70,50	71,73	80,00	58,36	70,96
10	TANAH BUMBU	73,86	71,59	74,39	79,00	77,04	69,64	61,27
11	KOTA BARU	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00	50,00	50,00
12	BARITO KUALA	77,66	63,15	61,23	78,83	66,13	51,69	54,25
13	BANJARMASIN	72,98	71,24	80,00	66,41	49,97	59,37	62,47

Berdasarkan tabel kompilasi tersebut maka Kabupaten HST unggul dalam hal pelayanan administrasi public yang menggambarkan kualitas pelayana yang dilakukan aparat pemerintah daerah dan kepuasan masyarakat.

12. Survei Publik terhadap Kinerja Pembangunan Daerah

Tabel 5.17. Survei Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pembangunan

No	Kabupaten/Kota	SKOR NILAI (0-100)											
		PEMB. EKONOMI			PELAYANAN PUBLIK				PERFORMA POLITIK			KHUSUS	
		PT_E	PM_E	PB_E	P_PD	P_KS	P_AD	SAPRAS	PART	KESNB	AKUN	DSD	PKL
1	TAPIN	71,50	70,80	71,40	71,00	74,27	75,20	75,50	71,40	74,07	71,60	69,78	68,31
2	HSS	65,60	62,80	63,40	68,66	68,08	65,90	68,00	58,55	66,42	59,43	65,92	66,92
3	HST	56,50	57,80	58,40	68,18	60,64	69,40	63,60	49,77	59,44	49,70	57,73	57,05
4	HSU	58,50	60,30	58,70	70,23	60,22	59,60	58,20	56,01	56,42	57,86	57,20	57,16
5	BALANGAN	62,00	57,30	58,10	64,38	64,33	62,19	63,90	59,95	57,29	58,81	59,99	58,64
6	TABALONG	71,90	72,70	73,00	74,75	76,62	74,70	74,80	69,18	72,34	70,02	68,33	68,07
7	BANJARBARU	69,90	63,10	63,40	71,97	69,51	69,60	70,30	64,26	69,06	64,40	66,70	66,60
8	BANJAR	66,20	54,40	58,70	71,75	66,28	66,50	55,70	56,75	56,74	52,39	59,14	63,79
9	TANAH LAUT	67,61	58,15	58,05	69,57	67,66	67,71	69,33	58,99	64,51	60,53	62,46	61,61
10	TANAH BUMBU	70,70	71,10	70,20	73,72	72,64	74,90	75,50	72,40	74,14	71,12	69,36	68,40
11	KOTABARU	64,90	64,00	61,70	69,01	67,37	66,50	59,00	61,35	56,23	59,61	63,85	64,43
12	BARITO KUALA	61,00	63,00	61,00	66,70	63,07	64,90	60,10	59,09	55,14	57,64	61,02	58,41
13	BANJARMASIN	62,00	62,20	63,20	64,98	63,33	60,50	62,70	56,70	59,81	58,77	61,55	61,91
RATA-RATA (KALSEL)		65,25	62,90	63,02	69,61	67,23	67,51	65,89	61,11	63,20	60,91	63,31	63,18
		Dibawah	Dibawah	Dibawah	Dibawah	Dibawah	Di atas	Dibawah	Dibawah	Dibawah	Dibawah	Dibawah	Dibawah

Terkait kepuasan masyarakat ternyata Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya berada pada tingkat cukup memuaskan saja belum mendapatkan penilaian yang terbaik dari masyarakat karena tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pembangunan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemerintah daerah meningkatkan kinerja yang semakin memberikan kepuasan bagi masyarakat.

13. Kinerja Pendapatan Daerah

Tabel 5.18. Kinerja Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Tahun			
		2011	**2012**	**2013**	**2014**
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	100,82	116,58	100,67	94,68
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	117,16	107,46	100.00	94,68
1.1.1	Pajak Daerah	118,35	97,64	81,44	92,33
1.1.2	Retribusi Daerah	83,3	91,95	84,45	84,66
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	111,62	100,01	100,03	105,2
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146,21	115,24	107,3	102.91
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	98,7	152,1	101,45	90,55
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	93,5	167,42	107,86	98,02

1.2.2	Dana Alokasi Umum	100	100	100	89,99
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	100	100	100	100
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	111,43	152,1	97,6	100
1.3.1	Bantuan Dana Hibah	-	-	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	134,49	241,63		89,97
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	88,44	100	94,63	78,83
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	100	

Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2011-2013 telah tercapai targetnya namun pada tahun 2014 karena perlambatan ekonomi secara umum maka realiasasi hanya 94,68% berada dibawah target. Demikian pula dana perimbangan hanya 90,55%. Kondisi ini terjadi pada semua item pendapatan mengalami penurunan hanya dana DAK dan lain-lain pendapatan yang sah saja yang mencapai target. Sehingga periode RPJMD yang akan datang memerlukan kerja keras dalam kemandirian keuangan daerah.

14. Kinerja Belanja Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015

Tabel 5.19. Kinerja Belanja Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Uraian	Tahun			
		2011	**2012**	**2013**	**2014**
	BELANJA DAERAH	79,43	83,27	83,41	86,84
1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	90,54	94,81	87,83	91,83
1.1	Belanja Pegawai	92,51	94,62	87,60	91,85
1.2	Belanja Hibah	60,97	99,63	94,78	91,20
1.3	Belanja Bantuan Sosial	72,39	94,48	47,88	88,95
1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	100,00	100,00	*100,00*	98,63
1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	93,46	99,24	100,00	99,35
1.6	Belanja Tidak Terduga	36,20	83,68	*100,00*	18,15
2.	**BELANJA LANGSUNG**	64,26	70,39	100,00	82,87
2.1	Belanja Pegawai	52,62	89,17	72,26	73,80
2.2	Belanja Barang / Jasa	69,37	79,46	79,38	81,16
2.3	Belanja Modal	61,94	61,36	77,59	86,15

Serapan anggaran dari tahun 2011-2015 masih cukup baik dengan kisaran antara 80-90 % sehingga kondisi ini cukup mendorong perekonomian daerah. Program pembangunan berjalan cukup baik dengan dukungan belanja daerah. Belanja daerah bisa lebih baik lagi apabila didukung oleh kemandirian daerah.

15. Analisis Kinerja Penurunan Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tabel 5.17. Investasi Swasta, Investasi Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, TK dan Penduduk Miskin

Tahun	Investasi Swasta	Investasi Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi	Tenaga Kerja	Jumlah Penduduk Miskin
2001	128.312	34.857	7,74	121.669	34.632
2002	134.728	52.644	4,91	114.863	27.300
2003	141.464	35.046	4,38	122.407	28.200
2004	148.537	28.011	4,12	127.051	23.100
2005	155.964	30.896	5,36	121.572	21.300
2006	163.762	187.685	6,02	121.836	24.881
2007	171.950	123.725	6,30	122.959	19.275
2008	180.548	292.020	7,70	126.349	17.151
2009	189.575	253.310	6,77	128.036	13.924

2010	8.263.380	267.486	4,75	121.382	15.385
2011	9.603.041	286.625	6,35	127.511	14.891
2012	8.896.462	307.115	6,90	136.497	14.200
2013	*8.899.533*	*310.186*	5,90	*143.322*	14.195
2014	*8.902.604*	*313.257*	5,00	*150. 147*	14.181

Untuk menganalisis pengaruh investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap penurunan penduduk miskin maka digunakan program SPSS. Pengaruh program pembangunan melalui investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada hasil analisis berikut ini :

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.883[a]	.780	.655	3879.070	.780	6.216	4	7	.019	2.888

a. Predictors: (Constant), PTK, PE, INVES_PEM, INVES_SWA

b. Dependent Variable: PEND_MISKIN

Secara bersama-sama investasi (swasta dan pemerintah), pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap penurunan penduduk miskin dengan kekuatan 78 % sehingga program pembanguan pada bidang ini perlu ditingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	58838.657	33450.426		1.759	.122	-20259.033	137936.346					
INVES_PEM	.000	.000	.143	.541	.605	.000	.001	-.584	.200	.096	.450	2.221
INVES_SWA	-.052	.017	-.930	-3.114	.017	-.091	-.012	-.810	-.762	-.552	.352	2.840
PE	2110.899	1197.750	.395	1.762	.121	-721.329	4943.126	-.139	.554	.312	.624	1.603
PTK	-.342	.284	-.274	-1.205	.267	-1.014	.329	-.603	-.414	-.213	.605	1.652

a. Dependent Variable: PEND_MISKIN

Program investasi swasta merupakan variabel yang paing dominan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin diihat dari nilai signifikansinya 0,017 dengan meningkatnya investasi 100 juta maka akan menurunkan penduduk miskin 2 orang. Sektor lainnya yang menurunka penduduk miskin adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan bertambahnya tenaga kerja 10 orang akan menurukan penduduk miskin 3 orang. Dari hasil analisis ini maka program kedua bidang ini sangat baik jika ditingkatkan.

16. Analisis Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung bagi Perekonomian Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968[a]	.937	.810	.35592

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968[a]	.937	.810	.35592

a. Predictors: (Constant), BL, BTL

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.462	10.049		-.942	.519
	BTL	.116	.099	.409	1.173	.450
	BL	.062	.018	1.204	3.456	.179

a. Dependent Variable: PE

Pertumbuhan ekonomi meningkat 0,12% meningkat jika Belanja Tidak Langsung ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi meningkat 0,1% jika Belanja Langsung ditingkatkan. Kekuatan pengaruh ini mencapai 93 % hal ini menunjukkan perekonomian daerah masih dipengaruhi belanja pemerintah. Belanja pegawai yang menjadi item belanja tidak langsung mendiorong lebih tinggi perekonomian daerah yang berarti masih pada sektor konsumsi dan ekonomi rakyat yang terdorong.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Siklus pembangunan daerah mencakup tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan (implementasi), serta monitoring dan evaluasi pembangunan pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan, khususnya evaluasi hasil pembangunan sangat diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam periode berkenaan mapun pada periode berikutnya. Evaluasi akhir RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2011-2015 ini sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh capaian target-target pembangunan daerah hingga tahun 2015. Berikut simpulan Indikator Kinerja RPJMD :

No	Program Prioritas Pembangunan Rpjmd	Indikator Kinerja RPJMD	Capaian			%
			Tercapai	Belum	Tidak Sesuai	Capaian
Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berakhlak Mulia, Kreatif, Inovatif, Terampil Dan Menguasai Ipteks						
1	Misi I	62	48	14	7	77,42%
Misi 2 Menumbuhkan Dan Mengembangkan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berdaya Saing						
2	Misi II	71	55	16	2	77,46%
Misi 3 Pemanfaatan Dan Distribusi SDA Dengan Menjaga, Memelihara Dan Melestarikan Lingkungan						
3	Misi III	31	29	2	0	93,93%
Misi 4 Mengembangkan Kehidupan Sosial, Politik, Dan Budaya Yang Bermartabat						
4	Misi IV	54	44	10	0	81%
Misi 5 Penyelenggaraan Otonomi Luas Dan Menerapkan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik						
5	Misi V	43	31	12	0	72%
Misi 6 Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Masyarakat						
6	Misi VI	28	21	7	0	75%
	Total	**289**	**228**	**63**	**7**	
	% Total		**79%**	**21%**	**2,4%**	

Pencapaian misi yang paling tinggi adalah misi 3 dan 4 sebesar 93,93% dan 81 % dalam Mengembangkan Kehidupan Sosial, Politik, Dan Budaya Yang Bermartabat. Selanjutnya misi 1 dan 2 masing-masing 77,42 % dan 77, 46% yaitu misi 1 Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, Terampil dan Menguasai IPTEK dan misi 2 Menumbuhkan Dan Mengembangkan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berdaya Saing dan Misi 6 Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Masyarakat masing-masing sebesar 75%, Selanjutnya Misi 5 hanya 72%. Realisasi total yang tercapai sebesar 79%, yang belum 21 % dan yang tidak sesuai 2,4%.

Berdasarkan hasil maka kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan RPJMD ini disimpulkan dengan hasil baik.

2. Rekomendasi

Hasil evaluasi RPJMD masih banyak indikator yang belum tercapai, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut ini :

a. Indikator Kinerja yang berstatus telah tercapai, dipertahankan dan ditingkatkan pada masa periode RPJMD tahap berikutnya dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;.
b. Indikator Kinerja yang tidak tercapai, perlu ditingkatkan kinerja capaiannya sehingga pada RPJMD berikutnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
c. Program Prioritas RPJMD pada perencanaan mendatang menjadi fokus pembangunan dengan penganggaran yang cukup dan diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dibawahnya sehingga mampu meningkatkan capaian kinerjanya.
d. Bagi semua SKPD yang indikator kinerjanya masih banyak yang belum tercapai sudah seharusnya bekerja lebih baik lagi.
e. Perlunya peningkatan upaya investasi daerah dan investasi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
f. Perlunya peningkatan kinerja pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menfasilitasi kinerja SKPD
g. Perlunya peningkatan iklim bekerja yang nyaman dan saling sinergisitas antar SKPD sehingga tidak ada ego sektoral
h. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam SKPD masing-masing
i. Perlunya pembangunan pengembangan kawasan pembangunan agar lebih merata
j. Diperlukan pemetaaan dan pendataan yang akurat dalam permasalahan pembangunan dan permasalahan pada masing-masing SKPD sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat
k. Perlunya leadership yang kuat dalam mendorong agar pencapaian RPJMD selanjutnya lebih baik lagi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN TERHADAP MASYARAKAT
Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basery Kayu Tangi, Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 330524
Website : http://lemlit-unlam.ac.id email : lemlit_unlam@yahoo.co.id

Nomor : 127e/UN.8.2/PL/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Swakelola

Banjarmasin, 22 Mei 2016

Kepada Yth.:
Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-
Barabai

Dengan hormat,

Berdasarkan surat saudara Nomor 050/05/Dalitbang/Bappeda/ 2016, tanggal 09 Mei 2016 perihal Permohonan Pelaksanaan Swakelola Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sub Kigiatan Evaluasi RPJMD tahun 2015 Tahun Anggaran 2016. Dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan demaksud sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya guna pelaksanaan selanjutnya. Atas kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Terhadap Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M. Sc
NIP. 19600623 198801 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basery Kayu Tangi, Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 330524
Website : http://lemlit-unlam.ac.id email : lemlit_unlam@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : 127d /UN.8.2/PL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M. Sc
NIP : NIP. 19600623 198801 1 001
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri 70123 Kayu Tangi Banjarmasin
Jabatan : Ketua LPPM ULM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ULM berdasarkan PP. No 41 tahun 1960 dan PP No. 60 tahun 1999 tanggal 1 Novmber 1999 beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi tugas kepada:

No	Nama/NIP	Posisi Penugasan	Pangkat/Gol
1	Dr. Ahmad Yunani, SE, M.Si /19730207 199903 1 003	Ahli Utama	Pembina/IV a
2	Drs. M. Saleh, MP. /19720908 199803 1 005	Ahli Utama	Pembina Utama/IV c
3	Chairul Sa'roni, SE, M. Si /19720908 199803 1 005	Ahli Madya	Pembina/IV a
4	Drs. FS Ampong, ME. /19600602 198701 1 001	Ahli Madya	Penata /III c
5	Dra. Enny Fahraty, MP /19620801 198811 2 001	Ahli Madya	Pembina /IV a
6	Khairi Fahlevi, Spi, M. Si /19720722	Ahli Madya	Penata /III c

Dipindai dengan CamScanner

	200604 1 003		
7	Drs. Rudi Safruddin, M. Si /19560629 198910 1 001	Ahli Madya	Penata /III c
8	Dra. SM Zulfaridatul Yakin, MT /19560727 198503 2 001	Ahli Muda	Pembina /IV a
9	Ali Wardhana, SP, M. Si /19751003 200501 1 003	Ahli Muda	Penata /III c
10	Lina Suherty, SE, MP /19761113 200003 2 001	Ahli Muda	Pembina /IV a
11	Yunita Sifiana, SE, MSE /19760625 200501 2 003	Ahli Muda	Penata Tk I/III d
12	Subhan Annor, SPd /19791107 200501 1 004	Ahli Muda	Penata /III c

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Tugas.

Penerima Kuasa mewakili Lembaga Penelitian untuk:

1. Urusan Administrasi Penelitian
2. Pengumpulan Data Sekonder
3. Melakukan Tugas Lapangan dan Pelaporan Sub Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelporan Sub Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016.

Surat tugas ini tidak dapat dilimpahkan lagi pada orang lain.

Banjarmasin, April 2016

Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M. Sc
NIP. 19600623 198801 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dengan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN TERHADAP
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

Nomor: 050/ 02/ Dalitbang/Bappeda/2016
127b /un.8.2/PL/2016

Tentang :

EVALUASI RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas,bertempat di Barabai,kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Ir.H. Ahmad Syahriani Effendi, MT : Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beralamat di Jalan Bhakti Nomor 09 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ,selaku Pengguna Anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KESATU.

2. Prof.Dr.Ir.H.M. Arief Soendjoto, M. Sc : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan. Bregadir Jenderal H. Hasan Basery Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Kerjasama Swakelola untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Dipindai dengan CamScanne

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 adalah sesuai ketentuan dan acuan sebagai berikut :

a. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
b. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DPA Bappeda) Tahun 2016.Kesepakatan Bersama Antara
d. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin No. 180/ 02/MoU/Tahun 2016 dan No. 928/UN8/DN/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian/ Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
e. Kerangka Acuan Kerja Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan yang merupakan pedoman dasar mencakup pendahuluan, latar belakang masalah, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, metode kajian dan sistematika kajian, anggaran dan penutup.
2. Biaya kegiatan disusun oleh PIHAK KESATU dengan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja dan DPA Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

TUGAS KEGIATAN

PIHAK KESATU mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Sepakat untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, hasil kegiatan diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(A) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun Laporan Awal yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang disusun PIHAK KESATU.
4. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan.
5. Membuat laporan hasil pekerjaan.
6. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

7. Berkewajiban dan bersedia untuk menyempurnakan dan merevisi kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki, apabila setelah dilaksanakan penyampaian hasil survei terdapat kekurangan/ perlu penyempurnaan berdasarkan hasil rumuan seminar.

(B) PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut:

1. Menerima alokasi biaya berdasarkan pembayaran langsung yang besarannya merupakan biaya maksimal pekerjaan.
2. Merancang kebutuhan tenaga dan vahan yang diproses pengadaannya didasrkan pada peraturan perundang-undangan.

(C) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
2. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.

(D) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut;

1. Menyusun KAK yang menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA.
2. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh pihak kedua.
3. Melakukan pembayaran berdasarkan pembayaran langsung atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar-besranya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan pihak kedua.

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN PAJAK ATAS KEGIATAN

Pembiayaan kegiatan yang akan diserahkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini sebesar **Rp. 146.000.000,00.-** (*Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*) termasuk pajak-pajak.

Pasal 6

ATURAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung (LS) berdasarkan perhitungan anggaran perhari/perjam selama 4 (empat) bulan (120 hari kalender) sesuai absensi kehadiran yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dengan ketentuan, yaitu :
   a. PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Awal
   b. PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Akhir
   c. Laporan tersebut disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *File* dan akan dicetak oleh PIHAK KESATU.
3. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA harus sudah dilakukan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 5 (lima) bulan atau 153 (seratus lima puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 April s/d 9 Agustus 2016.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

1. Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
2. Pertanggungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan setelah progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK KESATU berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA :

1. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaan.

2. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota :
   a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU
   b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
   c. Seorang Ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Pada tingkat terakhir, bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 12

P E N U T U P

1. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta berlaku pada tanggal penandatanganan oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan dibubuhi materai secukupnya.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah sepenuhnya oleh PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala Bappeda Kabupaten	Ketua Lembaga Penelitian
Hulu Sungai Tengah	Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Selaku Pengguna Anggaran,	Universitas Lambung Mangkurat
	Banjarmasin

MATERAI TEMPEL 6000

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2011-2015

KERJASAMA ANTARA

KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 3305240
Website : http://lemlit.unlam.ac.id email : lemlit_unlam@yahoo.co.id

dengan

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. Bhakti No. 09 Telepon (0517) 41836

TAHUN 2016

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian :
   KajianEvaluasiRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD)KabupatenHulu Sungai Tengah 2011-2015
2. Peneliti
   a. Nama Lengkap : DR. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si
   b. NIP : 197302071999031003
   c. Pangkat/Ruang : Pembina/IV A
   d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
   e. Unit Kerja : Fakultas EkonomidanBisnis UniversitasLambungMangkurat

   Anggota :
   1. Drs. H.M. Saleh, MP
   2. Dra. Hj. SitiMutmainahZulfaridatulYaqin, MT
   3. KhairiFahlevi, S.Pi, M.Si
   4. SubhanAnnor, S.Pd, M.Si

3. Lokasi Penelitian : Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
4. JangkaWaktuPenelitian : 12April – 9 Agustus2016
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten HST
6. Besarnya Dana : Rp. 146.000.000,- (SeratusEmpatPuluhEnamJutaRibu Rupiah)

Banjarmasin, 9 Agustus 2016

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Jurusan FESP

DR.H. Ahmad Yunani, SE., M. Si
NIP. 197302071999031003

KetuaPeneliti,

DR.H. Ahmad Yunani, SE., M.Si
NIP. 197302071999031003

Dekan Fakultas EkonomidanBisnis
Universitas Lambung Mangkurat

DR. H.M. RizaFirdaus, SE, MM
NIP. 196709091993031001

Mengetahui/Menyetujui
Ketua LPPM
Universitas Lambung Mangkurat

Prof DR.Ir.H.M. AriefSoendjoto, M.Sc
NIP. 196712311995121002

Dipindai dengan CamScanner